

MULTIKULTURALISME

Berebut Identitas di Ruang Publik

Andri Ashadi



MULTIKULTURALISME
Berebut Identitas di Ruang Publik

Andri Ashadi

Editor

Nurus Shalihin

Desain Isi

Lelo Legowo

Desain Sampul

Kaoem Koesam Syndicate (KKS)

Hak pengarang dilindungi undang-undang
All right reserved

Cetakan I, Agustus 2015

Diterbitkan oleh

Imam Bonjol Press

Anggota IKAPI

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Sumatera Barat

Kode Pos: 25153, Telp (0751) 24435-35711, Fax. (0751) 20923

Email : ib_press@yahoo.co.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Andri Ashadi

Multikulturalisme; Berebut Identitas di Ruang Publik /Andri Ashadi;

Cet. I--Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

x + 188 hlm.; 15,5 x 23 cm.

ISBN:.....

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
All Rights Reserved

Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang tersayang, sumber inspirasi dan motivasi dalam menapaki “tebing terjal” dunia akademik. Ayah, Amai, Istriku Aliyatul Imra dan Anak-anakku; sikembar Zaki Abdussalam-Habiburrahman dan Imaduddin Mustafa serta adik-adik yang mengadu nasib di perantauan.

PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah dipersembahkan kehadiran Allah SWT atas kekuatan dan kesehatan yang dilimpahkan pada kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan naskah buku yang berjudul “Multikulturalisme: Berebut Identitas di Ruang Publik.” Selawat dan salam, keselamatan dan kesejahteraan semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah menghadirkan Islam sebagai jalan keselamatan dan kedamaian bagi semesta alam.

Buku ini berasal dari dua studi tentang fenomena multikulturalisme dalam ruang publik sekolah. Riset pertama berlangsung pada tahun 2013 dengan fokus pengalaman multikulturalisme dikalangan pelajar Muslim dan Kristen dengan mengambil studi di SMA Don Bosco. Sedangkan riset kedua dilaksanakan pada tahun 2014, memilih fokus kebijakan multikulturalisme pada dua sekolah negeri di Kota Padang yaitu SMAN 6 dan SMKN 2.

Pengabungan kedua buah studi didasari karena keduanya sama-sama berbicara tentang isu multikulturalisme, meski lokusnya berbeda; studi di SMA Don Bosco menyorot pengalaman multikulturalisme, sementara di SMAN 6 dan SMKN 2 pada kebijakan multikulturalisme. Kendati SMA Don Bosco sekolah swasta yang berafiliasi kepada Kristen Katolik, namun terbuka bagi semua peserta dari beragam etnis dan agama termasuk juga para guru

dan karyawannya. Ini memungkinkan terutama pelajarnya mengalami secara intensif berbagai bentuk pengalaman multikulturalisme. Sebaliknya, SMAN 6 dan SMKN 2 sesungguhnya adalah ruang multikulturalisme bagi semua peserta didik dari beragam etnis dan agama karena disediakan oleh negara yang tidak berafiliasi pada etnis dan agama tertentu. Namun searah otonomi daerah, tampak kian tertutup dan menjadi seragam dengan sejumlah program dan kegiatan keislaman. Ini di satu sisi menimbulkan ambivalensi sikap di kalangan pelajar muslim, sementara bagi pelajar Kristen lebih dirasakan sebagai sebuah diskriminasi.

Terima kasih yang tak terhingga pertama-tama patut disampaikan kepada Nurus Shalihin, Ph.D sebagai ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Imam Bonjol Padang yang tidak saja menganggarkan dana penelitian, namun juga menyita banyak waktu dan pikirannya untuk mempertajam masalah maupun analisis penelitian ini. Semuanya merupakan sumbangan yang berharga bagi kami yang masih “tertatih-tatih” dalam dunia riset. Terima kasih yang sama juga kami sampaikan pada Muhammad Syukri, M.Si selaku *reviewer* yang telah memberikan saran, kritikan dan masukan demi kesempurnaan kedua riset ini. Terima kasih selanjutnya perlu kami sampaikan beberapa orang Guru SMA Don Bosco, Pelajar Muslim dan Kristen SMA Don Bosco, Para Orang Tua mereka, Kepada Dinas Pendidikan Kota Padang, Pihak Sekolah SMAN 6 dan SMKN 2 Padang, Komite Sekolah SMAN 6 Padang, Guru Pendidikan Agama Islam pada kedua sekolah, Para Orang Tua Pelajar Muslim dan Kristen SMAN 6 dan SMKN 2, Para Pelajar Muslim dan Kristen SMAN 6 dan SMKN 2 Padang yang tidak mungkin diurut namanya satu per satu. Mereka semua telah menjadi sumber informasi sekaligus inspirasi karena di sela-sela kesibukan, masih berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi dan diwawancarai. Terima kasih tak lupa pula disampaikan kepada

anggota tim peneliti; Ayu Rustriana Rusli, Susilawati dan MHB atas kerja keras dan waktu yang dicurahkan. Mudah-mudahan menjadi amal akademik bagi dunia ilmu pengetahuan sekaligus amal ibadah di sisi Allah SWT.

Akhirnya “tak ada gading yang tak retak”; dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan kami berharap catatan, kritikan dan masukan untuk kesempurnaan buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB I Memperdebatkan Multikulturalisme	1
A. Dari Pluralisme ke Multikulturalisme.....	1
B. Memperebutkan Ruang Multikulturalisme.	6
C. <i>Setting</i> Multikulturalisme.....	16
BAB II Memperlakukan Multikulturalisme	41
A. Mengargumeni Budaya Dominan.....	41
B. Menata Keragaman di Atas Keseragaman....	57
C. Menjadi Seragam Bukan Beragam	68
D. Menjadi Kami Bukan Kita.....	73
BAB III Menjadi yang Lain Diparuh Waktu	79
A. Memilih Menjadi Baik	79
B. Beda Waktu Berlainan Gaya.....	83
C. Memilih Yang Bukan Pilihan	101
D. Seidentitas Tak Seiman	106
BAB IV Mengalami Menjadi yang Berbeda	125
A. Memilih untuk Berbeda	126
B. Belajar untuk Memahami	133
C. Bersama untuk Berprestasi	138
D. Mengalami untuk Menjadi Multikulturalis	146
Daftar Pustaka	179
Tentang Penulis	187

BAB I

MEMPERDEBATKAN MULTIKULTURALISME

A. Dari Pluralisme ke Multikulturalisme

Masyarakat yang memuat unsur keberagaman baik keberagaman ras, suku, agama dan berbagai unsur kebudayaan lainnya, sering digambarkan dalam tiga terma yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*) dan multikultural (*multiculture*). Ketiga konsep tersebut sebenarnya tidak merepresentasikan hal yang sama, meski ketiganya mengacu kepada adanya ketidaktunggalan. Konsep pluralitas mengandaikan terdapatnya hal-hal yang lebih dari satu. keragaman mengacu pada bahwa keberadaan hal-hal yang “lebih dari satu” tersebut berbeda-beda, bahkan tak dapat disamakan (Zainal Abidin, 2009). Lalu bagaimana halnya dengan multikulturalisme? Dibandingkan dengan dua konsep terdahulu, multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Secara harfiah memang berarti “keberagaman budaya” (Scott Lash dan Mike Featherstone, ed, 2002), Dalam konteks penelitian ini konsep plural dan multikultural akan dielaborasi lebih lanjut.

Konsep pluralitas terambil dari kata plural artinya banyak (Hassan Sadily, 1988), sementara pluralitas, salah satu turunan dari istilah plural mengacu kepada terdapatnya hal-hal yang lebih dari satu. Hal-hal yang lebih dari satu tersebut bisa menyangkut

suku bangsa, ras, bahasa, agama dan unsur-unsur kebudayaan lainnya sehingga untuk menggambarkan masyarakat yang memuat unsur tersebut digunakan istilah *plural society*. Hanya saja dalam konteks Indonesia, terjemahan yang lebih populer untuk kata yang sama adalah masyarakat majemuk atau masyarakat yang beragam (diversity). Menurut Nasikun, yang pertama kali memperkenalkan istilah masyarakat majemuk untuk masyarakat Indonesia adalah Furnivall, seorang administrator kolonial Inggris. Sejak zaman Hindia Belanda, masyarakat Indonesia digambarkan Furnivall sebagai masyarakat yang majemuk (*plural society*) yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Ciri masyarakat majemuk Indonesia disebutkan sebagai tipe daerah tropis; mereka yang berkuasa dan yang dikuasai memiliki perbedaan ras (Nasikum, 2014). Orang-orang Belanda kendati minoritas adalah yang memerintah sejumlah besar orang Indonesia yang disebut sebagai golongan pribumi yang menjadi warga negara kelas tiga di negeri sendiri. Sementara orang-orang Tionghoa sebagai entitas terbesar dari orang-orang Timur asing lainnya disebut sebagai warga negara kelas dua.

Pertanda paling jelas dari kemajemukan kehidupan politik adalah tidak adanya kehendak bersama (*common well*). Orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja. Kehidupannya semata-mata berada di sekitar pekerjaannya itu dan dalam persepsi mereka, masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik Indonesia tidak sebagai warga negara, melainkan sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Ada yang sudah menetap lebih dari 20 tahun, akan tetapi pengetahuannya tentang Indonesia tak lebih dari pengetahuan mereka ketika pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia. Ironisnya, sisa-sisa usia mereka justru dihabiskan di negeri asalnya. Orang-orang Tionghoa kebanyakan juga begitu,

semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Sementara orang-orang pribumi kehidupan mereka tidak lebih dari pelayan di negeri sendiri. Secara keseluruhan menurut Nasikun masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda adalah masyarakat yang tumbuh atas dasar sistem kasta tanpa ikatan agama. Masing-masing mempertahankan atau memelihara pola pikir dan cara-cara hidup masing-masing. Hasilnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, berupa masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kehendak bersama (Nasikun, 2014).

Ini memang ciri masyarakat Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda, namun Nasikun berkeyakinan bahwa substansi konsep tersebut masih relevan untuk menyorot masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Hal ini ditandai oleh sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang terbagi-bagi sedemikian rupa, sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain (Nasikun, 2014). Ciri lain yang dapat dideretkan untuk masyarakat majemuk adalah *pertama*, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain; *kedua*, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; *ketiga*, kurang mengembangkan konsensus di antara anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; *keempat*, relatif seringkali mengalami konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain; *kelima*, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi; serta *keenam* adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain (Nasikun, 2014). Ciri-ciri ini tampak relevan untuk memahami keragaman ruang publik sekolah dengan semesta kepentingan yang mengitarinya dan bagaimana ruang publik tersebut diperlakukan, dipelihara, diperebutkan bahkan

dipermainkan berbagai pihak utama komponen-komponen yang berkepentingan dengan ruang publik sekolah.

Lalu bagaimana halnya dengan multikulturalisme? Bagi Azyumardi Azra, multikulturalisme merupakan sebuah pandangan dunia tentang kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama. (Azyumardi Azra, 20007) Jika pluralitas hanya merepresentasikan adanya kemajemukan (lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di ruang publik termasuk dalam institusi pendidikan.

Dengan demikian multikulturalisme menjadi semacam respon baru terhadap keragaman. Adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup, sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas tersebut diperlakukan sama pada ruang publik jika ruang publik itu bernama sekolah tentu oleh semua komponen sekolah yang mengelola keragaman tersebut. Oleh sebab itu, sebagai sebuah gerakan ia menuntut pengakuan terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya. Dalam pendidikan multikultural, pengakuan tersebut tercermin dalam bentuk penentangan terhadap segala bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah dan masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya. Pengakuan tersebut terjelma dalam bentuk politik rekognisi, representasi dan redistribusi (Zainal Abidin Bagir dkk, 2011)

Politik rekognisi dapat dipahami sebagai pengakuan atau penghargaan terhadap keragaman. Pada tingkat politik formal rekognisi dapat dilihat dari sejauhmana negara di tingkat pusat atau daerah menghormati dan mengakui berbagai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Pengakuan tersebut setidaknya

terekspresi pada konstitusi dan kebijakan negara yang menegaskan jaminan konstitusi tersebut. Sementara itu, dalam pergaulan sehari-hari ukuran rekognisi dapat dilihat dari sejauhmana entitas-entitas plural dalam masyarakat bersikap toleran; menghormati dan mengakui berbagai keragaman dalam masyarakat. Sedangkan politik representasi mengacu pada keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan tentang hidup bersama, dan setelah itu diikuti oleh kontestasi ide-ide yang akan dipilih melalui mekanisme pemilihan. Representasi penting untuk menghadirkan aspirasi warga negara dalam ranah publik. Setidaknya terdapat tiga bentuk representasi; *pertama* representasi simbolik yang meliputi keterwakilan kultur, kepercayaan dan identifikasi; *kedua* representasi deskriptif adalah tingkat kemiripan antara yang mewakili dengan yang diwakili; dan *ketiga* representasi substantif adalah aktivitas memperjuangkan kepentingan tertentu yang direpresentasikan dalam ranah publik. Sementara politik redistribusi menyangkut beberapa perhatian. Pada ranah kehidupan sehari-hari, fokus pada struktur ekonomi yang terbangun dalam masyarakat, siapa yang menguasai atau siapa memiliki apa? Bagaimana pola hubungan produksi dalam masyarakat agraris, semi industrial dan industrial? Khusus pada ranah komunitas keagamaan, isunya adalah apakah pola hubungan produksi sebangun dengan pengelompokan sosial keagamaan atau sebaliknya, saling silang? Isu-isu identitas keagamaan apa saja yang muncul dalam pola hubungan produksi tersebut?

Untuk memahami aspek-aspek multikulturalisme di atas, setidaknya ada dua dimensi yang sangat penting dalam kajian-kajian multikulturalisme, pertama *kebijakan* dan kedua *pengalaman*. Kebijakan dapat disebut sebagai aturan-aturan tertulis yang merupakan keputusan formal sebuah organisasi atau institusi (<http://become-teacher.blogspot.com/2013/05/pengertian-kebijakan.html> diakses tanggal 25 Februari 2014 jam 6.00 WIB). Keputusan

tersebut bersifat mengikat, yang mengatur pola perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat atau warga sekolah. Dalam konteks pendidikan bisa menyangkut standar isi atau kurikulum, bisa pula berkaitan dengan standar proses termasuk juga dalam standar pengelolaan. Mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, semuanya “harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.” (Tim Fokusindo Mandiri, 2012).

Sementara itu, untuk mendalami aspek-aspek multikulturalisme rekognisi, representasi dan redistribusi, maka pengalaman subjek langsung terhadap aspek-aspek multikulturalisme tersebut menjadi penting pula dilakukan. Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami baik yang sudah berlalu atau yang baru saja terjadi.¹ Pada umumnya sikap orang pada orang lain yang berbeda tidak dibentuk berdasarkan pengalaman interaksinya sendiri, tetapi lebih ditentukan oleh serapan atas berbagai persepsi, prasangka, stereotipe, stigma atau *labelling* yang berkembang di lingkungan tempatnya tumbuh. Dalam interaksi antar budaya atau agama yang seringkali lebih banyak didasarkan atas prasangka ketimbang informasi yang akurat tentang orang lain, maka *expose* atau peristiwa berjumpa dengan orang lain itu sangat menentukan dan seluruh pandangan atau prasangka tentang orang lain dapat terkoreksi akibat perjumpaan itu.

B. Memperebutkan Ruang Multikulturalisme

Kendati di dalam Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 tahun 2003 tidak secara eksplisit

1. Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1993), h. 456

menyatakan bahwa pendidikan harus dikelola secara multikultural,² namun sangat jelas meniscayakan perlakuan tersebut pada seluruh peserta didik terutama pada sekolah atau madrasah negeri. Sekolah atau madrasah negeri sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional adalah ruang publik bagi semua komponen anak bangsa tanpa pertimbangan dan afiliasi berbasis terutama ikatan primordial kesukuan dan keagamaan. Ini setidaknya dapat dipahami dari prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tertuang pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa” (Tim Fokusindo Mandiri, 2012).

Jika pendidikan dianggap sebagai entitas yang tidak terpisah dari bangsa dan negara, maka prinsip ini menyiratkan bahwa pada satu sisi satuan pendidikan baik dasar maupun menengah harus meruangkan nilai-nilai kebangsaan (nilai keagamaan dan nilai kultural), namun di sisi lain juga harus mengakomodir nilai-nilai kenegaraan (hak asasi manusia dan kemajemukan bangsa). Dalam implementasinya, nilai-nilai ini dijabarkan dalam sejumlah standar yang disebut sebagai Standar Nasional Pendidikan di antaranya terlihat pada standar isi, standar proses, dan standar pengelolaan. Standar-standar tersebut dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum dimaksudkan sebagai “kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Tim Fokusindo Mandiri, 2012). Artinya standar-standar tersebut

2. Perlakuan dimaksud adalah bagaimana semua peserta didik dengan segala keunikan dan keragamannya sebagai entitas yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya. Pengakuan tersebut tercermin dalam bentuk penentangan terhadap segala hal yang berbau rasisme dan diskriminasi di ruang sekolah dan masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas etnis, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya (Ari Dwipayana, 2003)

berlaku untuk seluruh jenis dan jenjang satuan pendidikan baik di pusat maupun di daerah.

Dalam konteks *standar isi*, struktur kurikulum pada satuan pendidikan SMA/SMK, selain memuat sejumlah mata pelajaran wajib juga terdapat muatan lokal dan pengembangan diri.³ Namun ketiganya dikembangkan salah satunya dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah). Dalam kerangka ini juga, terkait dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dalam *Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah* harus memperhatikan

-
3. Komponen mata pelajaran wajib untuk SMA/MA kelas XI dan XII jurusan IPS misalnya adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Teknologi Informasi serta Keterampilan/Bahasa Asing. Seluruh mata pelajaran dirancang dengan memasukan kompetensi inti yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Untuk komponen sikap seluruh mata pelajaran harus memuat wawasan multikultural misalnya terlihat dari salah satu kompetensi sikap dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI, yaitu memahami makna toleransi dan kerukunan serta memahami bahaya tindakan kekerasan dalam kehidupan (lihat Permendiknas No 22 tahun 2006). Kompetensi dasar yang kurang lebih sama juga diharapkan setelah belajar pendidikan kewarganegaraan yaitu, mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia; mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI (Ibid). Sementara untuk muatan lokal disebutkan sebagai kegiatan kurikuler untuk pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dimasukan ke dalam kelompok mata pelajaran yang ada. Kegiatan pengembangan diri juga bukan mata pelajaran yang diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengapresiasi diri sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat dan kondisi sekolah (Lihat kembali Permendiknas yang sama).

perbedaan individu peserta didik. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 memang disebutkan bahwa RPP disusun harus memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar yang sudah menjadi concern dunia pendidikan selama ini. Namun perhatian yang tidak kalah pentingnya juga harus dialamatkan pada latar belakang budaya, norma, nilai dan atau lingkungan peserta didik (Salinan Lampiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah). Juga dikatakan bahwa dalam pengelolaan kelas (*Standar Pengelolaan*), guru harus menghargai peserta didik tanpa memang latar belakang agama, suku, jenis kelamin dan status sosial ekonomi. Semuanya ini hendek menegaskan kembali bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif baik pada sekolah swasta maupun -terlebih- pada sekolah umum negeri yang dibiayai oleh negara (Indonesia) yang tidak berdasarkan etnik dan agama tertentu, sekalipun lembaga pendidikan dan peserta didiknya berada di ranah Minang yang berfilosofikan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.⁴

Hanya saja menggiringgi semangat otonomi daerah, telah muncul dua model pengelolaan keragaman terhadap peserta didik di Kota Padang. Pertama *model struktural* yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan Kota Padang. Kebijakan yang seharusnya meruangkan keragaman pelajar di ruang publik sekolah searah proses demokratisasi bangsa, justru

4. Sebuah konstruk yang sering dipakai untuk mengidentikan antara keminangan dengan keislaman. Sayuti Datuak Pangulu, ketua LKAAM, mengutip Buya Hamka, menyebut bahwa yang disebut orang Minang adalah yang nenek moyangnya berasal dari puncak merapi, berkiblat ke Ka'batullah dan menganut adat Minangkabau (Harian Mimbar Minang, 22 Juni 1999).

berkembang kearah peneragaman dan penunggalan termasuk pada isu-isu etnik dan agama seperti yang terepresentasi pada SMAN 6 dan SMKN 2 Padang.

Di SMAN 6 Padang misalnya, peserta didik tak mendapatkan pelajaran yang memadai tentang toleransi. Isu ini hanya disinggung secara terbatas dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (larangan toleransi dalam bidang akidah) dan Pendidikan Kewarganegaraan (toleransi politik). Dalam prakteknya ketika pelajar Muslim belajar agamanya, pelajar Kristen yang seharusnya juga mendapatkan hak yang sama dibiarkan keluar ruangan atau pulang lebih awal. Perayaan hari-hari besar keagamaan selain Islam juga tak pernah dilakukan di lingkungan sekolah (G, Pelajar Muslim SMAN 6 Padang, wawancara, 23-04-2014). Uniknya perayaan hari-hari besar agama Islam dirayakan pada tanggal, bulan dan tahun peringatannya oleh seluruh warga sekolah kecuali pelajar non-muslim, sementara pada saat yang lain ketika peringatan hari-hari besar agama non-muslim justru warga sekolah libur karena memang masuk dalam agenda libur nasional. Hal yang sama juga terjadi di SMKN 2 Padang. Bahkan ketika pelajar Muslim masih belajar agama (pada pengujung jam pelajaran), pelajar Kristen sudah diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Praktek toleransi lebih merupakan inisiatif sesama pelajar. Itupun lebih banyak dimulai dan dilakukan oleh pelajar Kristen (S, Pelajar Kristen SMKN 2 Padang, wawancara, 18-04-2014).

Selain itu, seluruh pelajar Muslim diwajibkan untuk berbusana muslim dan muslimah (perempuan memakai baju kurung dengan mudhawarahnya dan laki-laki khusus hari Jumat memakai baju koko dan dianjurkan untuk memakai peci nasional (Peraturan dan Tata Tertib Pelajar SMKN 2 Padang, 2014). Dalam prakteknya, di SMAN 6 Padang, kewajiban tersebut hanya dipenuhi ketika berada di sekolah. Kebanyakan pelajar puteri tak lagi mengenakan

busana muslimah di luar hari dan jam-jam sekolah. Uniknya, di SMKN 2 kewajiban tersebut tampak ketat diperlakukan saat jam pelajaran resmi saja. Ketika ada les tambahan meski di lingkungan sekolah, mereka diperbolehkan untuk tidak mengenakan busana muslimah (N, Pelajar Muslim SMKN 2, wawancara, 03-03-2014 dan T, pelajar Muslim-alumni SMKN 2 Padang Tahun 2013, wawancara, 24-4-2014). Mengaji atau membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sebelum belajar, tahfiz dan kultumpun dinilai sebagian pelajar tidak efisien karena dalam prakteknya sering memolorkan jam pelajaran lain dan membuyarkan konsentrasi untuk memahami pelajaran (G, Pelajar Muslim SMA 06 Padang, wawancara, 23-04-2014). Sementara untuk pelajar Kristen SMAN 6 dianjurkan untuk memakai busana muslim dan muslimah (jilbab) agar tidak terlalu berbeda dari teman-temannya yang muslim, jarang menjadi ketua kelas dan tidak pernah bisa menjadi ketua OSIS yang dikait-kaitkan dengan syarat agama (Sefriyono, 2013). Di sisi lain, pada SMKN 2 sudah sejak pendaftaran mereka disodori untuk harus berjilbab, dianjurkan untuk ikut kultum termasuk membaca bacaan asmaul husna (S, Pelajar Kristen SKMN 2 Padang, wawancara, 21-04-2014) Meski untuk mata pelajaran selain agama dan akses beasiswa baik di SMAN 6 maupun di SMKN 2 mereka memiliki akses yang sama dengan pelajar Muslim.

Pertanyaannya adalah mengapa muncul kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam mengelola keragaman di kalangan pelajar Muslim dan Kristen? Jika pelajar Kristen dianjurkan untuk mengikuti kultum yang merupakan bahagian dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam, mengapa di saat belajar Pendidikan Agama Islam, mereka justru diizinkan keluar bahkan sudah bisa pulang? Ataukah kultum (kuliah tujuh menit) yang di dalamnya termuat juga bacaan asmaul husna dianggap bukan bahagian dari pembelajaran Agama Islam? Begitu pula dengan

keharusan berbusana muslim dan muslimah bagi semua pelajar. Jika hal ini dikaitkan dengan instruksi Walikota Padang nomor 451.422/Binsos-iii/2005, bukankah dalam instruksi tersebut kewajiban hanya berlaku terhadap murid/pelajar yang beragama Islam dan bagi yang non muslim “dianjurkan” untuk memakai baju kurung bagi yang perempuan dan celana panjang bagi laki-laki? Bukankah sang penginstruksi sudah mengingatkan, “Kalau terbukti ada sekolah yang memaksakan pakaian muslim dan muslimah untuk pelajar dan siswa non-muslim, maka akan diberikan tindakan tegas.” (wawancaranya dengan Tempo edisi 8, 14-20 April 2008). Demikian juga jika hal ini dikaitkan pula dengan kewajiban untuk berbusana muslim dan muslimah, terhadap pelajar Muslim pun hanya ditandaskan untuk berbusana muslim dan muslimah, tidak terdapat ketentuan baku dalam soal model dan bentuknya?

Buku ini akan menelusuri pertama, faktor dan alasan apa saja yang mendorong munculnya kebijakan multikulturalisme yang ambivalen terhadap pelajar Muslim dan Kristen di SMAN 6 dan SMKN 2 Padang. Kedua, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan terhadap pelajar Muslim dan Kristen pada SMAN 6 dan SMKN 2 Padang; dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan terakhir, ketiga adalah bagaimana pelajar Muslim dan Kristen merespon kebijakan tersebut?

Kedua *model kultural* ala SMA Don Bosco, yang mengembangkan pendidikan multikultural. Tidak hanya guru yang berasal dari etnis dan agama yang beragam, tetapi juga pelajar-pelajar yang bersekolah di sana. Selain itu, karena ini merupakan tempat di mana pelajar Islam dan pelajar Kristen paling banyak bersekolah di samping pelajar Budha dan Hindu. Dari sudut etnispun mereka sangat beragam.

Secara rekognitif, mereka mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing, diizinkan untuk merayakan

peringatan hari besar keagamaan pada jam sekolah dan tersedia jam istirahat untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu, kendati tidak disediakan rumah ibadah dalam lingkungan sekolah (Natan; nama samaran, guru, *wawancara*, 19-10-2013).

Sementara itu, secara representative, mereka juga dapat berkiprah pada berbagai kegiatan dan program sekolah seperti menjadi ketua kelas dan pengurus OSIS dan berbagai kegiatan ekstra kurikuler termasuk akses untuk mendapatkan beasiswa.⁵ Hanya saja berbeda dari sekolah negeri pada umumnya yang berbusana muslim, semua siswa termasuk siswa muslim mengenakan pakaian seragam nasional; celana panjang abu-abu untuk yang putra dan rok abu-abu bagi yang putri. Pada hari Sabtu semua memakai seragam pramuka dan dalam rangka menjaga kesopanan, siswi putri harus memakai rok panjang. Untuk hal ini tidak ada teguran dari Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Padang (<http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=3615> diakses tanggal 28 Oktober 2013 jam 16.00). Mengapa demikian? Pihak sekolah beralasan, “Kalau di sekolah seragam anak berbeda-beda, dengan sendirinya terjadi pengkotak-kotakan berdasarkan identitas seseorang dan itu membahayakan kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk” (Ibid). Selain alasan tersebut juga mempertimbangkan keberatan internal umat Katolik. Yessi, guru SMP Frater yang masih satu yayasan dengan SMA Don Bosco menyebutkan, “Kalau siswi muslim diperbolehkan memakai jilbab di sekolah Katolik, nanti apa kata umat kami, di sekolah kita kok mereka berjilbab” (Yessi; nama samaran, guru, *wawancara*, 04-11-2013). Buku ini

5. Distribusi beasiswa tahun 2012/2013 misalnya, tersebar untuk 31 orang siswa muslim, 44 orang siswa Katolik, 22 orang Protestan dan 1 orang siswa Budha. <http://donbosco-pdg.sch.id/?p=206#more-206> diakses tgl 28 Oktober 2013 jam 1300. Sementara pengkategorian siswa dari sudut agama berdasarkan data-data pribadi Natan, guru SMA Don Bosco Padang.

juga akan menghadirkan faktor dan argumen-argumen mengapa mereka memilih sekolah multicultural seperti SMA Don Bosco di tengah menguatnya ikatan-ikatan yang bernuansa primordialisme dan bagaimana mereka (pelajar Muslim dan Kristen) mengalami keragaman di sana.

Mengapa kajian ini penting dilakukan? Untuk kasus SMAN 6 dan SMKN 2 didasarkan pada beberapa alasan; *Pertama*, di dalam Undang Undang SISDIKNAS No 20 tahun 2003 pemerintah memang mengakui bahwa pendidikan keagamaan -seperti Madrasah Aliyah (Khusus) atau pondok pesantren- berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama (Pasal 30 ayat 1). Sementara pendidikan umum -seperti SMA/SMK- disebut-sebut sebagai pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu (penjelasan pasal 15 UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2013). Hanya saja dalam prakteknya, pada lokasi penelitian ini, di samping mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, peserta didik masih harus mempraktekan mengaji sebelum mulai belajar, kultum, tahfizh dan keharusan berbusana muslim dan muslimah dalam lingkungan sekolah mirip pendidikan keagamaan. Untuk yang terakhir ini tanpa membedakan antara pelajar Muslim dan Kristen. *Kedua*, jika penyelenggaraan pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan kemajemukan bangsa, maka ruang publik seperti sekolah umum yang dibiayai oleh negara yang tidak berdasarkan agama atau etnik tertentu ini idealnya menjadi ruang untuk menyemai nilai-nilai HAM dan kemajemukan bangsa. Sekolah umum milik pemerintah adalah sedikit di antara ruang publik yang tersisa untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah di tengah

menguatnya politik identitas mengiringi otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Bukan malah sebaliknya, menjadi ajang kontestasi dan penguatan nilai atau identitas tertentu, diskriminasi dan keseragaman. *Ketiga*, meski kebijakan yang bernuansa keagamaan tersebut secara umum diterima peserta didik, namun masih tetap menyisakan ketidakpuasan. Untuk kasus berbusana muslimah misalnya, meski pelajar puteri “tampak” menerima peraturan tersebut namun jamak diketahui kalau sebagian di antara mereka hanya berbusana muslimah saat saat belajar saja. Mengaji sebelum belajar, tahfizh dan kultumpun dinilai sebagian pelajar tidak efisien karena dalam prakteknya sering memolorkan jam pelajaran lain dan membuyarkan konsentrasi untuk memahami pelajaran. Sementara bagi pelajar Kristen, meski disebut-sebut memakai busana muslim dan muslimah karena tidak ingin kelihatan terlalu berbeda dengan pelajar muslim, tetap saja dalam perasaan tertekan dan terpaksa.

Sementara untuk kasus SMA Don Bosco juga didasarkan pada beberapa alasan; *Pertama*, penguatan identitas kedaerahan, kesukaan, kebudayaan dan terutama keagamaan sedang bergerak searah pergerakan demokratisasi bangsa ke berbagai sektor kehidupan termasuk ke ruang-ruang publik seperti sekolah. Padahal ruang publik merupakan satu-satunya wadah di mana keragaman dapat tumbuh dan berkembang secara elegan. *Kedua*, semakin menguatnya sikap radikal-eksklusif di kalangan pelajar mengiringi proses demokratisasi yang sedang berjalan. Sikap radikal-eksklusif sering tidak mentolerir adanya perbedaan termasuk di arena sekolah. *Ketiga*, Kecenderungan radikal eksklusif di kalangan sebagian pelajar Muslim dan Kristen tak menutup ruang bagi mereka yang bersikap inklusif dalam menentukan pilihan untuk bersekolah. *Keempat*, SMU Don Bosco, jelas berbeda dengan SMU negeri lainnya dan SMU Islam di kota Padang. Perbedaan yang cukup mencolok terletak pada perlakuan multikulturalisme dalam pengertian memberikan akses

kepada pelajar dari beragam etnis dan agama untuk menimba ilmu pengetahuan di sana, sehingga bagaimana pelajar-pelajar Muslim dan Kristen mengalami keragaman, menjadi sesuatu yang penting untuk diungkap.

C. Setting Multikulturalisme

Baik SMAN 6 dan SMKN maupun SMA Don Bosco, ketiga sekolah berada di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. SMAN 6 adalah sekolah menengah umum sementara SMKN 2 adalah sekolah menengah kejuruan negeri, kedua sekolah terbuka untuk semua warga negara. Namun dalam satu dasa warsa terakhir sedang giat-giatnya menjalankan berbagai program dan kegiatan keislaman mengiringgi proses demokratisasi dan otonomi daerah. Sedangkan SMA Don Bosco merupakan sekolah swasta tertua di kota ini yang dikelola oleh Yayasan Proyoga di bawah naungan keuskupan Padang, namun sama halnya dengan SMAN 6 dan SMKN 2, juga terbuka terhadap pelajar dari beragam etnis dan agama. Narasi berikut akan menjelaskan profil singkat ketiga sekolah.

I. Sekolah Menengah Atas Negeri 6

SMA Negeri 6 didirikan pada tanggal 14 Januari tahun 1984 yang merupakan kelas jauh dari SMA Negeri 1 Padang. Layaknya sekolah filial, pada tahap awal (1983/1984), proses pembelajaran berlangsung dengan status menumpang di SD Negeri No. 53, Jembatan Buai Mato Air. Setahun berjalan, proses pembelajaran dipindahkan ke SD Negeri No. 38 Seberang Padang Selatan dengan status kepala sekolah dirangkap oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Padang, Rusli. Tiga bulan kemudian proses pembelajaran kembali mengalami pemindahan ke SD Negeri No. 22 Koto Kaciak, Padang (Sejarah Singkat SMA Negeri 6 Padang, Mei 2014).

Cita-cita untuk memiliki gedung sendiri baru terwujud pada tahun 1985 dengan dibangunnya tujuh ruang sekolah, sementara jumlah pelajar waktu itu tercatat sebanyak 280 orang. Cikal bakal lokal ini dari tahun ke tahun bertambah hingga mencapai 27 lokal di luar ruang labor komputer, ruang kepala, ruang guru, mushalla yang sekarang sudah dipergunakan sebagai mesjid, labor biologi, labor kimia, ruang OSIS dan kantin. 9.300 M² lahan sudah terpakai untuk bangunan dari 15.000 M² lahan yang tersedia.

Dalam perkembangannya di lahan seluas 15.000 M² tersebut juga terdapat hutan sekolah, kebun buah naga, kebun buah markisa, *green house*, 6 *gazebo*, lasehan, sumur serapan 6 buah, 2 toga, komposter 37 titik, biospori 21 lubang, 2 buah kolam ikan, galeri dan bank sampah (Sejarah Singkat SMA Negeri 6 Padang, Mei 2014).



Gambar 1: *Green House* yang berisi aneka tanaman hijau
(sumber: dokumen tim peneliti)



Gambar 2: tampak gedung di antara ruang belajar yang disebut sebagai *lasehan* yang dikelilingi oleh aneka tanaman hijau (sumber: dokumen tim peneliti)



Gambar 3: sebuah kolam ikan di antara ruang belajar yang dilingkari oleh berbagai tanaman hijau (sumber: dokumen tim peneliti)

Ini telah menjadi titik masuk untuk mengukir prestasi di bidang lingkungan hidup yang ditandai dengan diperbaharainya kesepakatan antara Bapelda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Kota Padang dengan pihak sekolah sejak tahun 2005 tentang program Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Program tersebut disempurnakan pada tahun 2010 dengan program pendidikan lingkungan hidup, adiwiyata. Pada tahun 2010 itu juga SMA Negeri 6 menjadi pemenang Adiwiyata tingkat Kota Padang. Berturut-turut setelah itu pada tahun 2011 menjadi pemenang Adiwiyata pada tingkat propinsi, pada 5 Juni 2012 meraih Adiwiyata tingkat nasional dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 10 Juni 2013 dinyatakan kembali sebagai pemenang sekolah adiwiyata (sekolah mandiri) sebagai penyempurna prestasi Adiwiyata sebelumnya. Tidak hanya sampai di situ. Di tahun 2013 SMA Negeri 6 Padang juga menjadi utusan yang diundang ke Jepang pada “Student Forum of Unesco AsPnet in the Asia Fasific Region di Sakay City, Osaka” (Sejarah Singkat SMA Negeri 6 Padang, Mei 2014).

Selain lingkungan yang nyaman, bersih dan asri, SMA Negeri 6 juga kental dengan nuansa religius. Berbagai kegiatan keagamaan intens dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Untuk pelajar seperti yang akan dipaparkan nanti, mengenakan seragam sekolah (busana muslim-muslimah), sebelum belajar melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an, waktu Zuhur dan Ashar sholat berjamaah di mesjid sekolah yang diikuti dengan kegiatan kultum. Pada hari Jum’at pagi mereka melakukan kegiatan muhadarah, ceramah singkat satu paket dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, saritilawah dan nyanyian religi. Peringatan hari-hari besar keagamaan juga meriah dilakukan. Selain ada kegiatan ceramah, juga dilakukan perlombaan-perlombaan untuk memeriahkannya. Nuansa religius juga tampak

pada slogan-slogan atau kata-kata mutiara yang bernuansa keislaman terpampang di pojok-pojok sekolah, termasuk foto-foto majelis guru dengan seragam busana muslim-muslimahnya.



Gambar 4: slogan Beriman dan Berbudi Pekerti Luhur disandingkan pada Orang yang Cerdas dan Terampil (sumber: dokumen tim peneliti)



Gambar 5: kendati slogannya biasa, namun padanannya tak lupa ditulis dalam Bahasa Arab (sumber : dokumen tim peneliti)



Gambar 6: seruan agar menghentikan segala aktivitas saat azan berkumandang (sumber: dokumen tim peneliti)



Gambar 7: foto para majelis guru, mengenakan seragam muslim-muslimah (sumber: dokumen tim peneliti)

Pada tahun ajaran 2014/2015 tercatat tidak kurang dari 829 orang pelajar menimba ilmu pengetahuan di SMA Negeri 6 Padang yang terdiri dari 809 orang pelajar Muslim dan 20 orang pelajar Kristen; 12 orang Protestan dan 8 orang Katolik. Tidak terdapat pelajar dari agama lain seperti Hindu, Budha dan Konghucu. Diasuh oleh 70 orang guru; 54 orang guru PNS dan 16 orang guru GTT (guru tidak tetap) dilengkapi oleh 20 orang pegawai; 9 orang PNS dan 11 orang PTT (pegawai tidak tetap). Semuanya beragama Islam.

Kendati SMAN 6 adalah sekolah umum, namun dalam visi terbarunya semua komponen sekolah telah bersepakat mengusung visi “Berakhlak Mulia, Berprestasi, Kompetitif dan Berbudaya Lingkungan” dan motto, “Sehat, Bersih, Cerdas, dan Asri.” Visi tersebut dituangkan dalam sejumlah misi (1) membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, (2) menghasilkan lulusan yang berprestasi, berkepribadian tangguh, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi globalisasi, (3) mengembangkan pembelajaran dan keterampilan yang berbasis

sains dan teknologi, (4) membentuk peserta didik yang bertingkah laku baik, berpenampilan sesuai dengan norma agama, dan adat istiadat, (5) menumbuhkembangkan nilai-nilai tradisional dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, (6) memberikan teladan dalam setiap tindakan dan perbuatan, (7) meningkatkan kesadaran warga sekolah dalam kelestarian lingkungan yang bersih, asri dan nyaman, (8) meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang sehat, (9) membentuk peserta didik yang mampu mengolah sampah menjadi bernilai tambah dan bermanfaat (dapat dilihat di depan halaman SMA Negeri 6 Padang)

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, maka SMAN 6 menerapkan sejumlah tata tertib. Hanya saja sesuai dengan fokus penelitian, yang akan dipaparkan adalah sejumlah tata tertib yang ditujukan terhadap pelajar Muslim namun pada saat yang sama berdampak terhadap pelajar non-muslim. *Pertama*, kerapian berpakaian pelajar yang tertuang dalam dua ketentuan; penjadwalan penggunaan pakaian seragam sekolah dan tata cara memakai. Untuk jadwal hari Senin-Selasa berpakaian putih abu-abu, hari Rabu berpakaian batik SMAN 6, hari Kamis berpakaian pramuka lengkap, hari Jum'at berpakaian muslim SMAN 6 Padang, dan hari Sabtu berpakaian olah raga SMAN 6 Padang. Sedangkan tata cara memakai; pelajar puteri memakai rok panjang sampai mata kaki, pakaian dalam tidak kontras, dan model rok sesuai ketentuan pada gambar pakaian yang telah ditentukan (tidak memakai rok di bawah pinggul). Sedangkan pelajar putera, celana panjang tidak ketat atau mengecil ke bawah (minimal 20 CM), tidak di bawah pinggul dan memakai sabuk berwarna hitam polos berlogo SMAN 6 Padang (Tata Tertib Siswa/Siswi SMAN 6 Padang tahun 2014).

Kedua, aturan tentang sholat berjamaah dan kultum; (1) setiap pelajar yang Muslim dan muslimah wajib sholat berjamaah di mushola pada saat Zuhur dan Ashar, (2) setiap pelajar wajib

menjalankan piket kultum yang sudah ditentukan (Ibid). Selain kedua bentuk aturan di atas, masih terdapat sejumlah ketentuan lain yang tidak termuat secara tertulis dalam tata tertib pelajar, namun sebetulnya diberlakukan dalam proses belajar mengajar misalnya ketika berdo'a dan mengaji sebelum jam pelajaran dimulai, pelajar non-muslim juga berada dalam ruangan termasuk ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Meski sebagian di antaranya ada yang keluar atau pulang lebih awal.

Bila di antara pelajar memakai pakaian atau atribut tidak lengkap, maka akan mengalami pengurangan skor sebanyak 5 poin, sedangkan tidak mengikuti upacara/kegiatan keagamaan di sekolah mendapatkan pengurangan skor 10 poin. Dalam batas interval pengurangan nilai antara 5-10 poin akan mendapat peringatan lisan, 11-20 mendapatkan peringatan tertulis dari wali kelas dan panggilan kepada orang tua untuk menghadap wali kelas (Dokumen V, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 6 Padang).

2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 (disingkat SMKN 2) didirikan pada bulan Juli 1951. Gagasan pendirian sekolah dicetuskan oleh Agus Taib dan Ali Loeis. Agus Taib adalah mantan guru sebuah sekolah dagang di Kayu Tanam pada tahun 1940 an, sementara rekannya, Ali Loeis, adalah pemilik ijazah M.H.S dan bertugas sebagai patih (setingkat sekretaris daerah) di Balai Kota Padang serta pada saat yang sama menduduki jabatan pula sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Kemasyarakatan (SPK) Kantor Gubernur Sumatera Tengah di Padang. Tidak hanya sampai di situ, ia juga menjadi direktur sebuah sekolah swasta ekonomi, SMEA Hermes. Keduanya sepakat untuk mewujudkan sebuah sekolah menengah ekonomi negeri yang pada satu sisi diarahkan untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh para pemuda-pemudi

Sumatera Barat khususnya dan Sumatera Tengah umumnya untuk melanjutkan pendidikan mengingat besarnya minat mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah ekonomi. Pada sisi lain juga didasarkan atas kenyataan bahwa masyarakat Minang banyak mengisi sektor kehidupan perdagangan (<http://invest.smk2padang.sch.id/html/index.php?id=profil&kode=11&profil=Visi%20dan%20Misi>, 25 September 2014 jam 04. 00)

Untuk merealisasikan keputusan di atas maka dimulailah penerimaan pelajar baru untuk tahun ajaran 1952/1953 yang bertempat di kantor Inspeksi SMP Sumatera Tengah. Jumlah pelajar yang dapat direkrut sebanyak 63 orang yang dijadikan dua lokal. Sementara tenaga pengajarnya adalah guru-guru honor yang berasal dari SMA Negeri Padang ditambah dengan beberapa orang tenaga lainnya dari instansi pemerintah atau swasta. Pada bulan November 1952 proses pembelajaran sudah dimulai dengan status tempat menumpang di gedung SGKB Negeri Padang dan jam pembelajaran berlangsung mulai jam 13.00 sampai jam 17.00, setelah berakhirnya jam pelajaran SGKP. Impian menjadi sekolah negeri baru terwujud pada tanggal 3 Juli 1952 setelah keluarnya SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 2777/B dengan kepala sekolah langsung dijabat Ali Loeis. Dan pada akhir tahun 1953 mulai dibangun 5 lokal darurat hanya untuk belajar saja, sementara ruangan majelis guru dan ruang kantor dipakai saja ruangan yang agak besar dari ruangan yang ada tersebut (<http://invest.smk2padang.sch.id/html/index.php?id=profil&kode=11&profil=Visi%20dan%20Misi>, 25-09-2014 jam 04. 00 WIB).

Saat ini SMKN 2 memiliki lahan seluas 10.420 M² dan yang terpakai untuk bangunan seluas 6.866 M² dengan bidang studi keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi, Seni, Kerajinan, dan Pariwisata. Sementara program studinya berjumlah 5 buah yaitu Tata Niaga, Keuangan, Administrasi, Teknik Komputer dan

Informasi dan Pariwisata. Jumlah keseluruhan pelajar sebanyak 1182 orang dengan rincian 1156 orang pelajar Muslim, sementara selebihnya 21 orang pada kelas XI dan XII adalah pelajar Kristen serta diperkirakan sekitar 5 orang di kelas X. Jadi keseluruhan berjumlah 26 orang (Rekap jumlah Siswa Keadaan Bulan Juli 2014 SMKN 2 Padang). Juga tidak terdapat pelajar Hindu, Budha dan Konghucu. Diasuh oleh 85 orang guru dengan rincian 74 orang guru PNS dan selebihnya, 11 adalah guru tidak tetap atau honor yang kesemuanya juga beragama Islam (SA, *wawancara*, 15-10-2014).

Berbeda dari SMAN 6, dalam visi terbarunya SMKN 2 ingin “Mewujudkan sekolah model yang berwawasan lingkungan,” kendati SMAN 6 juga memiliki *concern* yang sama terhadap masalah lingkungan hidup. Bahkan seperti yang sudah diuraikan, SMAN 6 sudah mendahului SMKN 2 dengan meraih sejumlah prestasi di bidang ini. Untuk itu maka dirumuskan beberapa misi berikut; (1) menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan iman dan taqwa, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, (2) menyelenggarakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan, (3) memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup dan kompetensi global bagi seluruh peserta didik, (4) mengembangkan profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, (5) menghasilkan lulusan yang memiliki jati diri bangsa dan keunggulan kompetitif di pasar nasional dan global, (6) menerapkan manajemen mutu ISO 9001: 2000 dalam pengelolaan manajemen sekolah, (7) mengembangkan kerjasama dengan industri dalam dan luar negeri, (8) mengembangkan kompetensi lokal menjadi keunggulan kompetitif di tingkat global, (9) menyiapkan sarana dan prasarana belajar dalam rangka menciptakan kelengkapan pembelajaran, (10) menanamkan pada masyarakat sekolah rasa tanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan

dalam lingkungan sekolah, (11) menghasilkan lulusan yang mempunyai keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program keahliannya, (12) meningkatkan tertib administrasi dan tata tertib beraktivitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing (SA, Waka Kesiswaan SMK Negeri 2 Padang, 2014).

Khusus dalam rangka mewujudkan sekolah model berwawasan lingkungan hidup, maka misi di atas dijabarkan lagi dalam sejumlah program di antaranya kegiatan *green school* berbasis lingkungan hidup; (1) sosialisasi tentang kepedulian lingkungan hidup dan bebas dari asap rokok, (2) pembinaan Wiyata Mandala berbasis K7 (penghijauan Lingkungan Hidup), (3) membentuk petugas tim K7, (4) menyediakan peralatan untuk K7, (5) melaksanakan goro (gotong royong) massal, (6) mengadakan lomba K7.



Gambar 8: Sekolah sebagai areal bebas rokok bagi seluruh warga sekolah (sumber: dokumen tim peneliti)



Gambar 9: salah satu lingkungan hijau di antara ruang-ruang sekolah
(sumber: dokumen tim peneliti)



Gambar 10: salah satu pojok lasehan di antara lokal-lokal belajar yang
diselingi tanaman hijau
(sumber: dokumen tim peneliti)

Selain itu, untuk pelajar diintensifkan pula beberapa program pengembangan diri berbasis pendidikan karakter. *Pertama*, karakter religius dan berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab, ulet dan mandiri (ini akan dielaborasi lebih lanjut pada sub bab SMKN 2: sekolah model dan logika mayoritas-minoritas). *Kedua*, karakter disiplin dan patuh pada pimpinan, hukum dan peraturan; (1) menerbitkan kartu/buku pelanggaran tata tertib dengan angka kredit, (2) merekapitulasi pelanggaran disiplin pelajar terlambat, tidak hadir dan pelanggaran lainnya, (3) membuat buku kasus catatan siswa yang melakukan pelanggaran, (4) membuat rekapitulasi pelanggaran tata tertib dan analisisnya dalam rangka pembinaan disiplin. *Ketiga*, karakter sosial, dan kepedulian terhadap sesama; (1) melakukan aksi sosial bagi setiap warga sekolah untuk bantuan bagi masyarakat yang mendapat musibah, (2) pelaksanaan takziah, (3) pembinaan lima (salam, senyum, sapa, salam dan senang). *Keempat*, karakter kebangsaan/nasionalisme/patriotisme (rincian dapat dilihat pada sub bab SMKN 2: sekolah model dan logika mayoritas-minoritas).

Sementara itu, dalam bentuknya yang lebih konkrit visi dan misi SMKN 2 juga diturunkan lagi dalam sejumlah tata tertib pelajar. Namun sama halnya dengan tata tertib pelajar SMAN 6 Padang, yang akan diuraikan juga yang memiliki relasi langsung atau tidak langsung dengan pelajar non-muslim.

Pertama, kewajiban pelajar terhadap sekolah di antaranya; (1) menyediakan, menyiapkan dan memenuhi kebutuhan diri sendiri seperti perlengkapan belajar, perlengkapan ibadah dan sebagainya, (2) mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan Kultum pada setiap hari Jum'at. *Kedua*, berkaitan dengan pakaian dan kelengkapannya, di antaranya adalah (1) hari Senin sampai dengan Rabu dan Sabtu pelajar memakai celana/rok abu-abu dan baju putih (baju kurung bagi puteri sesuai model yang ditetapkan

dengan mudhawarah segi tiga tutup kepala tanpa rendo atau polos) sepatu hitam polos menutup punggung kaki, kaus putih polos, lambang OSIS, lokasi SMKN 2 Padang, plat dasar hitam tulisan putih huruf balok, (2) pada hari Jum'at pelajar (puteri memakai baju kurung muslim dengan mudhawarahnya/segi tiga, rok hitam, dan pelajar putera memakai (baju) koko dan dianjurkan memakai kopiah nasional) bersepatu warna hitam dan kaus kaki putih, celana hitam, (3) pelajar hadir/datang atau berurusan ke sekolah di luar jam belajar hanya boleh dan dilayani yang berpakaian sekolah, (4) pelajar muslim wajib membawa kelengkapan sholat dan Al-Qur'an.⁶

Sama halnya dengan SMAN 6, masih terdapat kebijakan-kebijakan lain yang tidak tercantum dalam aturan-aturan di atas namun telah menjadi semacam kesepakatan antara pelajar dengan pihak sekolah. Misalnya menghadiri peringatan hari-hari besar keislaman termasuk perlakuan terhadap peserta didik non-muslim saat pembelajaran agama Islam yang nanti akan ditelaah lebih lanjut.

3. SMA Don Bosco

Sekolah ini merupakan salah satu sekolah tertua di ranah Minang. Didirikan oleh seorang Belanda, Frater⁷ Servaas pada

6. Lihat Peraturan dan Tata Tertib Siswa SMKN 2 Padang Tahun 2013 yang masih tetap berlaku

7. Secara harfiah kata "Frater" (bahasa Latin Frater ada hubungannya dengan Brother dalam bahasa Inggris, atau Broeder dalam bahasa Belanda) berarti "Saudara". Secara khusus "Frater" adalah suatu bentuk/cara hidup bersama dengan semangat persaudaraan sebagai biarawan (seperti halnya Suster) yang ingin mengabdikan kepada Tuhan dengan cara khusus. Mereka mempersembahkan hidup hanya untuk Tuhan dan bergabung dalam suatu Kongregasi yang bernama Kongregasi Frater yang berlindung kepada Maria Bunda yang Berbelas kasih yang didirikan oleh Mgr. Zwijsen. Nama aslinya : "Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid". Pusatnya di Tilburg (negeri Belanda). Mgr. Zwijsen adalah seorang Uskup yang juga mendirikan Kongregasi Suster-Suster Belas Kasihan, yang pernah bertugas antara lain di Padang yaitu di biara St. Leo Jln. Gereja

1 April 1954. Ia telah memimpin SMA Donbosco selama 20 tahun (1954, sejak berdiri sampai 1974). Servaas lahir di Tilburg, Nederland (Belanda) pada tanggal 5 Juli 1907. Tidak banyak data-data yang berhubungan dengan masa kecil anak dari pasangan Cornelius de Beer dengan Anna Cornelia Peijnenburg ini dapat diungkap. Catatan penting baru muncul pada tahun 1924, ia masuk biara. Dalam usia 17 tahun, Servaas muda ingin menjadi seorang frater dan masuk kongregasi CMM (Congregatio Fratrum Beatae Mariae Virginis Matris Misericordiae), sebuah ordo yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial yang dikhususkan untuk menolong anak-anak dan kaum muda terlantar. Karena tertarik dengan dunia pendidikan maka selama di biara, ia masuk sekolah guru dan mengambil pendidikan kepala sekolah (Alumni DB9, 2009).

Frater Servaas, begitu ia akrab dipanggil, mulai intens di dunia pendidikan ketika terjalin kerjasama sejak tahun 1923 antara CMM dengan ordo Capuchin, sebuah ordo untuk kegiatan misionaris yang bekerja di Padang dan sekitarnya. Saat itu, sudah ada sekolah untuk anak-anak perempuan keturunan Tionghoa dan Eropa yang didirikan oleh para suster/biarawati Kongregasi CMM yang kemudian diberi nama SMP Maria. Maka para frater CMM kemudian mendirikan pula sekolah untuk anak-anak laki-laki keturunan Tionghoa dan Eropa dengan sistem pendidikan Belanda. Di antara sekolah-sekolah tersebut adalah ELS (*Europese Lagere School*) dan HCS

No. 24; jadi sekolah-sekolah Frater dan sekolah Suster adalah bersaudara karena diasuh oleh saudara sekandung yaitu para Frater dan para Suster yang berasal dari “Bapak” yang sama). Sebagaimana biarawan/biarawati lainnya, mereka mengucapkan tiga kaul: kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian (tidak kawin). Mereka tinggal bersama di biara, dan dalam semangat cinta kasih, bersama-sama menyelenggarakan kebutuhan hidup sehari-hari agar bisa saling tolong – menolong, dan bersama-sama menyelenggarakan suatu karya pelayanan sebagai pengabdian kepada Tuhan (<http://driwancybermuseum.wordpress.com/2012/02/20/kenangan-indah-masa-sekolah/> diakses tgl 29 September 2013 jam 06.00)

(*Hollands Chinese School*) serta SMP Frater yang dipimpin oleh frater Servaas. Meski SMP Maria semula diperuntukan untuk anak-anak perempuan sementara SMP Frater bagi anak laki-laki, karena keterbatasan sarana pendidikan kedua sekolah kemudian terbuka untuk kedua jenis siswa ini; tak lagi memisahkan siswa laki-laki dan perempuan. Kedua sekolah juga terbuka bagi keragaman etnik dan agama. Tidak hanya pelajar Kristen yang dapat dijumpai, tetapi juga ada pelajar-pelajar dari agama lain seperti Budha termasuk pelajar Muslim. Meski pelajar terbanyak tetap didominasi oleh pelajar Kristen Katolik dan Protestan. Dalam perkembangannya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sekolah setingkat SD dan SMP tersebut terus berbenah sampai muncul SMA Don Bosco tahun 1954 yang dimulai dengan dua kelas 1 saja. Frater Servaas yang sebelum menjabat sebagai kepala sekolah SMP Frater langsung menjabat sebagai kepala sekolah. Gedung sekolah yang digunakan adalah gedung bekas sekolah dasar sebelum Perang Dunia II yang bernama Don Bosco⁸ pula. Berkat kerja keras Frater Servaas dengan bantuan beberapa Frater yang lain, SMA Don Bosco terus berkembang. Dukungan sarana yang lengkap, sistem pendidikan

-
8. Nama Donbosco sering dikaitkan dengan Yohanes Bosco, anak petani miskin di Becchi, Italia 16 Agustus 1815. Sejak kecil sudah diajari bagaimana berdoa dengan baik. Dari ibunya, Yohanes belajar melihat Tuhan dalam wajah sesama, yaitu mereka yang miskin, mereka yang sengsara, mereka yang datang mengetuk rumah sepanjang musim dingin. Ia belajar menyuguhkan sup hangat serta membagikan makanan dari kemiskinan mereka. Kelak dikemudian hari semuanya ini menjadi pengabdian sepanjang hayatnya, Ia membisikkan pesan terakhir kepada anak-anak yang berkumpul di sekeliling tempat tidurnya, “Kasihilah satu sama lain seperti saudara. Berbuat baiklah kepada semua orang dan janganlah berbuat jahat kepada siapa pun. Katakanlah kepada anak-anak bahwa aku menanti mereka semua di Surga.” Pada tanggal 31 Januari 1888, Yohanes Bosco wafat dalam usia 72 tahun. Pada tanggal 2 Juni 1929 ia dinyatakan sebagai Beato oleh Paus Pius XI dan pada tanggal 8 November 1933 dinyatakan sebagai Santo. Pestanya dirayakan setiap tanggal 31 Januari. (<http://stiebanten.blogspot.com/2011/06/sejarah-don-bosco.html> diakses tgl 29 September 2013 jam 06.00)

yang tepat, guru yang berkualitas dan berdisiplin tinggi, maka SMA Don Bosco termasuk sekolah menengah paling baik (terkreditasi A) dan menjadi salah satu sekolah favorit di kota Padang. Sekolah yang bernaung dalam pengelolaan Yayasan Prayoga⁹ ini menjadi incaran pelajar dari beragam etnik; Tionghoa, Minang, Jawa, Batak, Nias dan lain-lain termasuk juga dari latar belakang agama yang berbeda.

Dalam informasi terbaru, SMA Don Bosco memilih visi untuk menjadi “Komunitas pendidikan yang cerdas, peduli, berintegritas, professional, dan penuh kasih dalam pelayanan” . Sebuah visi yang tampak merupakan pengayaan dari visi sebelumnya, “mewujudkan manusia yang beriman dan cerdas” Visi ini kemudian dikembangkan dalam sejumlah misi; *pertama*, mendampingi peserta didik agar berkembang menjadi pribadi yang cerdas holistik, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual; *kedua*, menciptakan komunitas pendidikan yang peduli pada iman, kaum lemah, budaya, dan lingkungan; *ketiga*, menciptakan komunitas pendidikan yang memiliki integritas antara iman dan kehidupan, iman dan budaya, serta iman dan pengetahuan; *keempat*, melaksanakan kepemimpinan dan manajemen pendidikan yang professional : kredibel, akuntabel, responsible, dan visioner; *kelima*, menerapkan pelayanan pendidikan yang penuh kasih melalui sikap solider, adil, damai, dan memerdekakan.

Kelima misi di atas ditujukan agar terbentuknya; (pertama) 100 % warga sekolah yang memiliki pribadi yang cerdas; (kedua) terbentuknya 100 % warga sekolah yang memiliki sikap peduli,

9. Adalah yaysan Katolik yang bergerak dalam bidang pendidikan yang didirikan oleh Keuskupan Padang. Wilayah kerja Yayasan Prayoga meliputi seluruh provinsi Sumatera Barat. Sekolah-sekolah dari yayasan ini tersebar di provinsi Sumatera Barat. Sejak berlakunya Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001, terjadilah pemisahan antara Yayasan Cabang Bukittingi, Perwakilan Riau, dan Yayasan Prayoga Padang. Masing-masing berdiri sendiri (http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Prayoga diakses tgl 29 September 2013)

(ketiga) terbentuknya 100 % warga sekolah yang memiliki integritas, (keempat) terbentuknya 100 % warga sekolah yang memiliki profesionalitas dan (kelima) terbentuknya 100 % warga sekolah yang memiliki pelayanan penuh kasih.

Khusus untuk pelajar, tujuan di atas ditopang oleh sejumlah aturan atau tata tertib. *Pertama* tata tertib yang berkaitan dengan *kedisiplinan*; terlambat masuk sekolah 10 menit untuk pertama kali mendapat skor -10, terlambat kedua kali dan memberitahu orang tua diberi skor -10 dan terlambat 10 menit kali yang ketiga diberi minus lalu dipulangkan setelah konfirmasi dengan orang tua. Bagi pria tidak diperkenankan berambut panjang, melewati kerah baju, telinga, tidak dicat/di skihead dan tidak memakai aksesoris berlebihan. Sementara bagi wanita tidak boleh rambut dicat/diskihead dan tidak memakai aksesoris berlebihan. Bila hal ini dilanggar, masing-masing akan mendapatkan skor minus 10. Tidak mengindahkan panggilan/undangan guru dan karyawan, keluar pekarangan tanpa izin dari guru piket/waka kesiswaan dan makan di luar area kantin, masing-masing juga mendapat skor minus 10. Minus skor meningkat menjadi 15 ketika menggunakan HP saat belajar. Minus skor bertambah menjadi 20 ketika tidak hadir di sekolah tanpa kabar/bolos, makan di kantin di luar jam istirahat (kecuali sudah pulang sekolah) dan tidak mengikuti kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah di dalam jam pelajaran. Minus menjadi 25 point ketika tidak mengikuti kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah di luar sekolah dan cabut pada jam pelajaran. Puncaknya menjadi minus 50 poin ketika keluar pekarangan sekolah dengan melompat pagar.

Kedua, tata tertib yang berkaitan dengan *kejujuran*; berbohong pada personil sekolah mendapatkan skor -25, menipu atau memeras teman, memalsukan surat-surat/tanda tangan, mencontek saat ujian masing-masing mendapatkan skor minus 50. Pelajar akan langsung mendapatkan skor minus 100 ketika terbukti mencuri

atau merampok dan memalsukan dokumen sekolah. Ini artinya yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari sekolah.

Ketiga, tata tertib yang berkaitan dengan *penghargaan terhadap sesama*; berkelahi di sekolah, berpacaran tidak sehat/ tidak sopan, memfitnah/menjelekkkan teman/personil sekolah mendapatkan skor minus 50 dan melawan personil dengan mengucapkan kata-kata kotor/tidak sopan minus 75. Pelajar akan langsung dikeluarkan dari sekolah bila melawan personil sekolah secara fisik dan terlibat dalam tawuran (minus 100).

Keempat, tata tertib yang berhubungan dengan *kesadaran memelihara lingkungan*; Duduk, makan, berada di warung dekat sekolah skor minus 20, mencoret/mengotori meja, kursi, dinding sekolah (diberi minus dan harus mencatnya kembali), minus 25. Merusak inventaris sekolah (diberi minus dan wajib menggantinya), melempari teman dengan telur/tepung, dll, merusak tanaman yang ada di sepanjang sekolah dan merokok di sekitar sekolah masing-masing minus 50.

Kelima, tata tertib yang berkaitan dengan *perbuatan melanggar hukum pidana/perdata*; membawa, menyimpan, mengedarkan VCD/CD/HP atau benda-benda lain yang mengandung unsur pornografi, membawa/mengonsumsi minuman keras, berjudi saat berpakaian sekolah mendapatkan, masing-masing mendapatkan skor minus 75. Terbukti memakai dan mengedarkan narkoba; terbukti melakukan tindakan asusila; menjadi terpidana; membeli, menjual dan mengedarkan soal ujian; membawa teman untuk melakukan kejahatan; membawa senjata tajam ke sekolah; mencemarkan/merusak nama baik sekolah. Semuanya mendapatkan skor minus 100 dan langsung juga dikeluarkan dari sekolah.

Selain perilaku minus skor yang pada puncaknya seorang pelajar dapat dikeluarkan dari sekolah, juga terdapat perilaku yang mendapat nilai plus (*reward*) sebagai motivasi untuk berprestasi.

Misalnya rapi dalam berpakaian, berprestasi dalam bidang olah raga, seni atau mata pelajaran yang mengharumkan nama sekolah akan mendapat sertifikat dan uang tunai dari yayasan ketika yang bersangkutan menamatkan sekolah (N, *wawancara*, 22-11-2013).

SMA Don Bosco sejatinya adalah sekolah Kristen yang dikelola oleh Yayasan Prayoga di bawah naungan keuskupan Padang. Meski mengambil bentuk sebagai sekolah umum dengan kurikulum, silabus dan sistem pengelolaan yang tunduk pada undang-undang dan sistem pendidikan nasional, namun nuansa Kekristenan tetap tampak pada sekolah tersebut misalnya pada simbol salib¹⁰ yang terpajang di ruang-ruang sekolah dan setiap mulai belajar berdoa secara Kristiani.¹¹ Hanya saja berbeda dengan SMA Kristen lainnya seperti SMA Xaverius dan SMA Kalam Kudus yang diperuntukan untuk siswa Kristen (William; nama samaran, guru, *wawancara*, 17-11-2013), SMA Don Bosco justru terbuka terhadap pelajar dari beragam etnis dan agama.

10. Simbol salib bukan simbol biasa. Dikalangan umat Kristiani, ia memiliki makna yang sangat dalam dan merupakan bahagian dari dogma atau keyakinan. Simbol tersebut terkait dengan keyakinan bahwa Yesus bukan hanya Allah tapi sekaligus manusia. Ia disebut memiliki kodrat Allah sekaligus kodrat sebagai manusia. Ia memiliki tugas untuk mengampuni dosa manusia. Rela menanggung sengsara dan mati di kayu salib karena dengan demikian berarti ia memenuhi kehendak Tuhan (Allah Bapa) untuk menembus dosa manusia. Tanpa itu dosa manusia diyakini tidak akan terampunkan. Tiang salib merupakan tanda atau saksi bahwa Yesus mencintai Bapa dan mencintai manusia. (Djam'annuri, ed, 2000)

11. Sebagai gambaran terlihat dalam ungkapan berikut: "Dalam Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa yang maha baik, terima kasih karena engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah ini dengan semangat baru. Ya Bapa, karena kami akan memulai kegiatan belajar kami, persilahkan apa yang dapat engkau pahami pelajaran yang dapat engkau berikan pada kami hari ini. Demikian juga dengan bapak dan ibu guru kami agar dapat mengajari kami dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Demikian juga dengan teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada hari ini agar dapat kembali hadir untuk belajar bersama kami. Demi Kristus.....Amin.", Direkam dari do'a sebelum belajar SMA Don Bosco, 27-10-2013

Hasil survey menunjukkan bahwa terdapat pelajar dari etnis Minang, Tionghoa, Batak, Jawa dan Nias sebagai etnis yang dominan. Di luar itu masih terdapat sejumlah pelajar dari etnis Flores, Bali, Jambi, Manado, Aceh, campuran Jawa-Cina dan campuran Minang-Jawa. Dari sudut agama mereka juga beragam. Untuk tahun ajaran 2013, dari 258 jumlah pelajar kelas III terdapat 110 orang pelajar Islam (42.63 %), 95 orang pelajar Katolik (36.82 %), 36 orang Protestan (13.95 %) dan 16 orang Budha (6.20 %) dan 1 orang pelajar Hindu (0.38%). (Andri Ashadi dkk, 2013).

Secara rekognitif,¹² mereka mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing, diizinkan untuk merayakan peringatan hari besar keagamaan pada jam sekolah dan tersedia jam istirahat untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu, kendati tidak disediakan rumah ibadah dalam lingkungan sekolah (Natan, guru, wawancara, 19 -10-2013). Secara representatif¹³ mereka juga dapat berkiprah pada berbagai kegiatan dan program sekolah seperti menjadi ketua kelas dan pengurus OSIS termasuk mendapat keringanan SPP bagi yang kurang mampu dan akses untuk mendapatkan beasiswa.¹⁴ Hanya saja berbeda dari sekolah negeri pada umumnya yang berbusana muslim, semua siswa termasuk

-
12. Rekognisi dapat dipahami sebagai pengakuan atau penghargaan terhadap keragaman. Pada tingkat politik formal rekognisi dapat dilihat dari sejauhmana negara di tingkat pusat atau daerah menghormati dan mengakui berbagai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Pengakuan tersebut setidaknya terekspressi pada konstitusi dan kebijakan negara yang menegaskan jaminan konstitusi tersebut. Sementara itu, dalam pergaulan sehari-hari ukuran rekognisi dapat dilihat dari sejauhmana entitas-entitas plural dalam masyarakat bersikap toleran; menghormati dan mengakui berbagai keragaman dalam masyarakat. Lihat Zainal Abidin Bagir dkk, *op.cit.*, h., 42
 13. Setidaknya terdapat tiga bentuk representasi; *pertama* representasi simbolik yang meliputi keterwakilan kultur, kepercayaan dan identifikasi; *kedua* representasi deskriptif adalah tingkap kemiripan antara yang mewakili dengan yang diwakili; dan *ketiga* representasi substantif adalah aktivitas memperjuangkan kepentingan tertentu yang direpresentasikan dalam ranah publik, Zainal Abidin Bagir, *op.cit.*, h. 43
 14. Distribusi beasiswa tahun 2012/2013 misalnya, tersebar untuk 31 orang siswa muslim, 44 orang siswa Katolik, 22 orang Protestan dan 1 orang siswa Budha. <http://donbosco-pdg.sch.id/?p=206#more-206> diakses tgl 28 Oktober 2013 jam

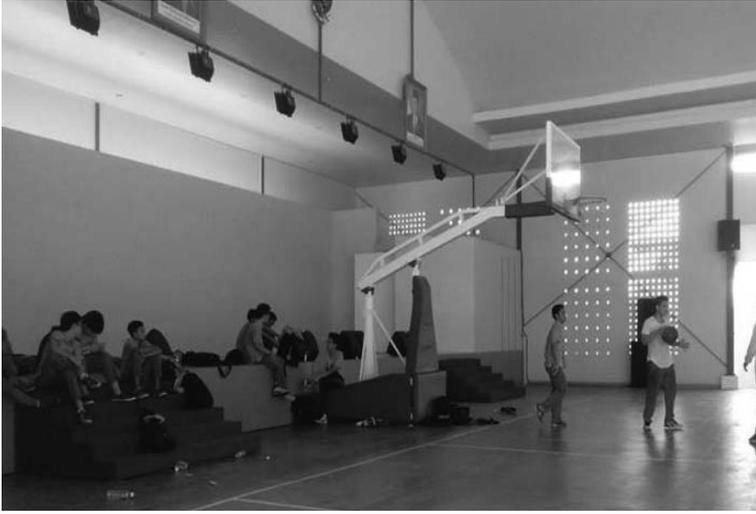
siswa muslim mengenakan pakaian seragam nasional; celana panjang abu-abu untuk yang putra dan rok abu-abu bagi yang putri. Pada hari Sabtu semua memakai seragam pramuka dan dalam rangka menjaga kesopanan, siswi putri harus memakai rok panjang. Untuk hal ini tidak ada teguran dari Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Padang.¹⁵ Mengapa demikian? Pihak sekolah beralasan, “Kalau di sekolah seragam anak berbeda-beda, dengan sendirinya terjadi pengkotak-kotakan berdasarkan identitas seseorang dan itu membahayakan kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk” (Ibid). Selain alasan tersebut juga mempertimbangkan keberatan internal umat Katolik. Yessi, guru SMP Frater yang masih satu yayasan dengan SMA Don Bosco menyebutkan, “Kalau siswi muslim diperbolehkan memakai jilbab di sekolah Katolik, nanti apa kata umat kami, di sekolah kita kok mereka berjilbab” (Yessi, guru, wawancara, 04-11- 2013 Yessi, guru, wawancara, 04-11- 2013).



Gambar 11, pelajar SMA Donbosco sedang belajar di salah satu ruang kelas
Sumber: <http://donboscopdg.files.wordpress.com/2013/05/kelas.jpg> diakses tanggal 28 Oktober 2013 jam 14.00

¹³⁰⁰. Sementara pengkategorian siswa dari sudut agama berdasarkan data-data pribadi Natan, guru SMA Don Bosco Padang.

15. <http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=3615> diakses tanggal 28 Oktober 2013 jam 16.00



Gambar 12, basket ball, salah satu kegiatan Eskul yang cukup digemari pelajar SMA Don Bosco Padang (sumber: dokumen tim peneliti)



Gambar 13, pelajar puteri SMA Don Bosco saat praktek MULOK (Muatan Lokal) memasak (sumber: dokumen peneliti)

Tidak hanya pelajar yang datang dari beragam etnis dan agama, para guru dan karyawannya juga. Untuk tahun ajaran 2013/2014 pelajar SMA Don Bosco Padang diasuh oleh 46 orang tenaga pendidik dengan rincian 19 orang Muslim, 24 orang Katolik dan 3 orang Protestan, Untuk bidang studi umum meliputi *pertama*, agama; Islam, Katolik dan Protestan masing-masing diasuh oleh guru agama yang bersangkutan. Sesuai dengan amanah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), pelajar dari masing-masing agama tersebut sudah mendapatkan pelajaran agama dari guru agama yang bersangkutan, dalam perkembangan terakhir termasuk juga untuk pelajar Budha meski jumlah mereka relatif lebih kecil dari pelajar Muslim maupun Kristen. *Kedua*, Bahasa Indonesia juga diasuh oleh 2 orang guru Muslim dan 1 orang guru Katolik. *Ketiga*, Bahasa Inggris diasuh oleh 5 orang guru termasuk kepala sekolah dengan rincian 3 orang Katolik dan 2 orang Muslim. *Keempat*, Bahasa Jepang diasuh oleh 2 orang guru Muslim. *Kelima*, Bimbingan Konseling diasuh oleh 2 orang guru Katolik. *Keenam*, Kewarganegaraan diasuh oleh 2 orang guru Katolik. *Ketujuh*, Matematika diasuh oleh 1 orang guru Katolik, 1 orang guru Muslim dan 3 orang guru Protestan. *Kedelapan*, Penjasorkes (Olah Raga) diasuh oleh 2 orang guru Muslim. *Kesembilan*, Sejarah diasuh oleh 2 orang guru Katolik. *Kesepuluh*, TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) diasuh oleh 2 orang guru Katolik dan 1 orang guru Muslim. *Kesebelas*, Kesenian (Seni Budaya) diasuh oleh 2 orang guru Muslim. Selanjutnya untuk bidang studi IPA (Ilmu Pengetahuan Alam); Biologi oleh 4 orang guru masing-masing 1 orang guru Katolik dan 3 orang guru Muslim, Kimia oleh 2 orang guru Katolik dan 1 orang guru Muslim, dan Fisika oleh 3 orang guru Katolik dan 1 orang guru Muslim. Sementara untuk bidang IPS; Ekonomi diasuh oleh 2 orang guru Katolik, Geografi diasuh oleh 1 orang guru Muslim dan Sosiologi oleh 2 orang guru Katolik. SMA Don Bosco dilengkapi pula dengan

2 orang petugas perpustakaan; 1 orang Muslim dan 1 orang Katolik, 3 staf administrasi beragama Katolik dan 4 orang satpam beragama Islam (Berdasarkan data-data Natan; nama samaran, guru SMA Don Bosco, 28-10- 2013).

BAB II

MEMPERLAKUKAN MULTIKULTURALISME

A. Mengargumeni Budaya Dominan

Kendati berbeda visi dan tujuan, baik SMAN 6 maupun SMKN 2 memiliki beberapa kesamaan argumen dalam menjalankan kebijakan keislaman yang ditujukan langsung terhadap pelajar Muslim dan pada saat yang sama berimplikasi secara tidak langsung terhadap pelajar non-muslim (Kristen). Jika di SMAN 6 didasarkan pada visi berakhlak mulia, argumen yang sama juga menjadi landasan kebijakan serupa di SMKN 2. Sekolah kejuruan ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi SMKN model yang tidak hanya mempersiapkan tenaga terlatih untuk bekerja pada bidang tertentu, namun juga menguasai beberapa kompetensi lain termasuk pengetahuan dan keterampilan keagamaan. Pengetahuan dan keterampilan keagamaan seperti seni membaca Al-Qur'an, kultum, sholat berjamaah dan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan rohis, juga ditujukan untuk pembinaan akhlak. Argumen yang persis sama –logika mayoritas vs minoritas- adalah ketika kebijakan tersebut dalam batas tertentu diberlakukan sama terhadap pelajar non muslim. Berikut argumen-argumen tersebut.

I. SMAN 6; Visi Berakhlak Mulia, Kurikulum 2013 dan Logika Mayoritas-minoritas

Pada satu sisi, jika merujuk pada penjelasan pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, maka jenjang pendidikan menengah seperti SMA termasuk dalam kategori pendidikan umum. Sementara di sisi lain, di samping sebagai lembaga pendidikan umum milik pemerintah yang terbuka bagi semua keragaman peserta didik, juga tak dapat dipungkiri kalau di sekolah ini terdapat peserta didik non-muslim meski dalam jumlah yang tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang beragama Islam. Dari 829 orang pelajar yang terdaftar pada tahun ajaran 2014/2015, pelajar non-muslim hanya 21 orang (2,53 %), selebihnya menganut agama Islam, 97,47 % (Rekapitulasi Siswa Kelas XII, XI dan X Tahun Pelajaran 2014/2015)

Pendidikan umum baik dasar maupun menengah dalam undang-undang di atas lebih mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengetahuan-pengetahuan yang diperluas dimaksud adalah sejumlah mata pelajaran wajib; Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan serta Prakarya dan Kewirausahaan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah). Di samping itu, masih ditambah dengan sejumlah mata pelajaran peminatan; Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Bahasa dan Budaya (4 mata pelajaran)¹⁶ dan satu mata pelajaran lintas peminatan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.

16. Misalnya dalam peminatan Matematika dan Ilmu Alam terdiri dari Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia.

Jumlah jam yang dialokasikan untuk keseluruhan mata pelajaran tersebut bisa mencapai 44 jam per minggu dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran tatap muka setara dengan 45 menit.

Hanya saja dari keseluruhan mata pelajaran tersebut, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan muatan pendidikan agama (Islam) dan budi pekerti tampak mendapatkan atensi lebih. Dalam prakteknya seperti yang terlihat pada SMA Negeri 6, pelajar tidak hanya sekedar belajar Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti dalam durasi 3 jam per minggu, namun juga mewajibkan untuk berbusana muslim-muslimah, membiasakan berdoa dan mengaji sebelum belajar, sholat berjamaah termasuk sholat Jum'at di mesjid sekolah, kultum (ceramah singkat menjelang sholat berjamaah), muhadharah pada setiap Jumat pagi satu paket dengan kegiatan mengaji, saritilawah dan nyanyian religi. Juga peringatan hari-hari besar keislaman dan kegiatan keagamaan di Rohis. Selain itu, nuansa religius juga ditampilkan lewat slogan-slogan seperti gambar di atas yang tidak hanya ditulis dalam bahasa Indonesia, namun juga dengan bahasa Arab, termasuk foto-foto majelis guru dengan busana muslim-muslimah yang terpampang di pojok-pojok dan ruangan sekolah. Pertanyaannya adalah apa yang mendasari kebijakan tersebut? Dari diskusi dengan kepala sekolah, wakil kesiswaan dan guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 6 terungkap kalau berbagai kebijakan di atas berakar kuat pada visi sekolah.

SMAN 6 Padang seperti yang terlihat telah mengartikan bahwa “berakhlak mulia, berprestasi, kompetitif dan berbudaya lingkungan” adalah visi sekolah. Visi religius “berakhlak mulia” tampak telah menjadi salah satu bidikan sekolah yang bersambut dengan misi pertamanya membentuk peserta didik yang berakhlak mulia.¹⁷ Visi ini memang sengaja dipertajam agar sesuai dengan prinsip

17. Jika memasuki halaman SMA Negeri 6, kita dengan mudah menjumpai visi dan misi yang sudah terpampang dengan jelas tersebut.

program pemerintah Kota Padang yaitu terwujudnya warga kota yang berbudaya tinggi dengan adat dan kebudayaan Minangkabau sebagai nilai dasar utama dengan keimanan dan ketaqwaan yang berkualitas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Untuk itu salah satu misi yang dicanangkan Pemerintah Kota Padang adalah meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, seni dan budaya (http://www.padang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=54 diakses tanggal 5 Oktober 2014 jam 20.00 WIB). Ini pun seperti yang disebutkan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Padang merupakan turunan juga dari visi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (S, *wawancara*, 29-10-2014). Salah satu jabaran dari visi pembangunan daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2006-2010, “Mewujudkan Sumatera Barat yang Tangguh, Bersih dalam Semangat Kebersamaan” adalah terwujudnya masyarakat religius dan berbudaya (<http://203.130.196.151/admin19/detail.php?id=75> diakses tanggal 1 Nopember 2014 jam 04.00).

Hanya saja kepala sekolah SMAN 6 keberatan kalau dikatakan bahwa visi tersebut semata hanya karena menyesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang. Jauh sebelumnya visi berakhlak mulia tersebut sudah dirumuskan, persisnya sejak 12 tahun yang lalu (R, Kepala sekolah SMAN 6, *wawancara*, 13-09-2014). Namun jika dikaitkan dengan pemerintahan yang berkuasa saat itu, Walikota Fauzi Bahar, tampaknya visi dimaksud tetap saja sejalan dengan untuk tidak menyebut menyesuaikan dengan visi rezim yang berkuasa. Bahkan di masa Fauzi Bahar berbagai kebijakan religius itu digulirkan seperti instruksi pakaian muslim-muslimah, sertifikat lulus membaca al-Qur’an sebagai persyaratan untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, pesantren Ramadhan, wirid remaja dan perlombaan membaca dan menghafal asmaul husna antar sekolah yang disediakan langsung hadiahnya oleh pemerintah

kota Padang saat itu. Saking banyaknya kebijakan yang bernuansa keagamaan, ada pengamat yang menyebut Kota Padang telah berubah menjadi kota hijau alias kota santri (Andri Ashadi, 2013).

Uniknya visi religius-berakhlak mulia di atas, menurutnya, tidak mesti harus dari nilai-nilai Islam, bisa saja muncul dari agama-agama lain. Namun karena SMAN 6 berada di Kota Padang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kalau disebut akhlak mulia setelah dilakukan kajian menurut rujukan yang sah tidak boleh aturannya selain dari Al-Qur'an dan Hadis. Itulah menurut kepala sekolah kerangka dasar yang harus ditanamkan kepada seluruh pelajar yang menuntut ilmu pengetahuan di SMAN 6. Hal ini dibenarkan juga oleh wakil kepala Sekolah bidang kesiswaan. Menurutnya, "Sebagai sekolah yang berada di daerah yang kuat dengan nilai-nilai adat dan agama, maka SMAN 6 tentu harus memperkuat nilai-nilai tersebut" (V, Wakil Kesiswaan SMAN 6, *wawancara*, 13-10-2014). Dari kerangka dasar ini diturunkan sejumlah kebijakan di atas dan pada tingkat yang lebih operasional menjelma menjadi tata tertib pelajar.

Selain itu, juga karena tuntutan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang relatif baru dalam sejarah perkembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Kurikulum ini dihadirkan sebagai reaksi terhadap kurikulum sebelumnya, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). KTSP disebut-sebut terlalu memberikan perhatian pada domain kognitif (pengetahuan) sementara sisi afektif dan psikomotorik terabaikan. Ini disinyalir dan dikait-kaitkan dengan munculnya berbagai persoalan terkini dalam dunia pendidikan seperti tawuran pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian dan gejala sosial kendati belum sepenuhnya didukung oleh hasil-hasil riset yang memadai (Suhodi Cholil dkk, 2013). Di samping dianggap terlalu membebani siswa, kurikulum KTSP

juga kurang memuat unsur karakter karena belum menjabarkan sejumlah elemen penting kompetensi sesuai dengan perkembangan kebutuhan seperti pendidikan karakter, metode pembelajaran aktif, keseimbangan antara *soft skills* dan *hard skills*. Pada sisi terakhir ini, kurikulum 2013 memperkenalkan Kompetensi Inti-1 (KI-1) yaitu kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti-3 (KI-3) kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti-4 (KI-4) kompetensi inti keterampilan. Kompetensi Inti-1 (KI-1) yaitu sikap spiritual dan kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk sikap sosial menjadi kompetensi inti seluruh mata pelajaran dan diharapkan mampu berkontribusi pada sikap dan karakter peserta didik. Untuk kelas X, XI dan XII kompetensi inti sikap spritualnya adalah “menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.” Untuk yang beragama Islam, sikap spiritual ini menurut salah seorang guru Agama Islam SMA Negeri 6, diambilkan dari nilai ibadah; dari sholat Zuhur dan sholat Jumat. Sebelum sholat berjamaah diadakan kultum atau ceramah singkat (A, Guru Agama Islam SMAN 6, *wawancara*, 18-09-2014), sementara pada setiap Jum’at pagi diadakan muhadharah satu paket dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, saritilawah dan nyanyian religi. Kalau yang dua ini tidak dilaksanakan, lanjut guru tersebut maka KI-1nya dianggap tidak tuntas (A, Guru Agama Islam SMAN 6, *wawancara*, 18-09-2014).

Hanya saja persoalannya apakah misalnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam lebih menyangkut sikap spiritual saja, bukankah dalam kurikulum 2013 untuk kompetensi sikap tidak hanya sikap spiritual, tapi juga sikap sosial yaitu “menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia” (Salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah). Jika sikap spiritual dianggap tidak terpisah dari sikap sosial, maka sikap seperti toleran dan damai tentu harus menjadi perhatian seluruh warga sekolah karena bahagian yang tak terpisah dari “menghayati dan mengamalkan” ajaran agama. Misalnya tampak dalam sikap sekolah yang tidak mengharuskan siswa non muslim untuk berjilbab asal tetap dalam kategori menutup aurat dan sopan. Juga akses mereka untuk belajar dan memperingati hari besar keagamaan di ruang publik sekolah. Namun sayang seperti yang akan diuraikan nanti, dari dialog dengan pihak sekolah dan dari berbagai peraturan dan kegiatan yang dibiasakan di ruang sekolah, tak tampak kegiatan yang bernuasa keragaman tersebut, kecuali terbatas pada kegiatan yang bersifat umum misalnya kalau ada yang sakit atau meninggal di antara warga sekolah termasuk pelajar yang beragama Kristen, maka teman-teman dan guru wali kelas/ pembimbing yang beragama Islam akan datang melayat (ALL, Pelajar Kristen, wawancara, 2-11-2014).

Lalu bagaimana dengan kegiatan keagamaan peserta didik non-muslim? Sejauh pengamatan peneliti, hampir dapat dikatakan tidak ada satupun kegiatan atau wadah di ruang publik sekolah atas nama atau yang ditujukan untuk menampung aspirasi keagamaan peserta didik non muslim, malah mereka harus melibatkan diri dalam beberapa kegiatan keagamaan yang sudah disebutkan. Pertanyaannya adalah apa saja yang mendasari kebijakan tersebut? Mengapa mereka mesti dilibatkan kendati ruang publik sekolah telah berubah menjadi ruang publik muslim?

Kebijakan-kebijakan di atas menurut kepala sekolah sudah didiskusikan dengan seluruh pelajar Kristen. Kedua puluh satu

orang pelajar non muslim yang bersekolah di SMA Negeri 6 sudah dikumpulkan dan diminta memberikan respon. Pada umumnya mereka memandang positif kebijakan-kebijakan tersebut dan secara umum tidak ada yang keberatan. Justru kata kepala sekolah mereka sangat nyaman. Mereka bersedia menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada.¹⁸ Bahkan bersedia pula mengingatkan teman-teman muslimnya misalnya yang tidak melaksanakan sholat Jum'at. Pelajar Kristen SMAN 6 memang mengakui hal tersebut. Hanya saja seperti yang dikatakan ALL “tentu kami tidak mungkin menyampaikan keberatan tersebut pak. Lagian waktu pertemuan itu bapak kepala sekolah sudah bilang bahwa karena pelajar non muslim jumlahnya sedikit maka anda semua menyesuaikan saja dengan aturan-aturan sekolah. Masak kami mau bilang keberatan, kan segan pak” (ALL, Pelajar Kristen SMAN 6, *wawancara*, 2-11-2014). Bagi kepala sekolah SMAN 6, “penyesuaian diri” merupakan pilahan yang disediakan untuk pelajar non-muslim pada SMAN yang dipimpinnya. Ini sama juga lanjut R, dengan pelajar muslim yang masuk SMA Don Bosco yang juga harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sekolah tersebut (R, Kepala sekolah SMAN 6, *wawancara*, 13-09-2014); tidak berbusana muslim-muslimah pada saat belajar kecuali waktu peringatan hari-hari besar Islam. juga tidak disediakan tempat khusus untuk sholat misalnya di areal sekolah kendati ada ruang atau tempat yang dapat digunakan untuk melaksanakan sholat (Andri Ashadi, 2013). Kendati SMA Don Bosco belum sepenuhnya multikultural karena pelajar Muslim tidak diperkenankan memakai busana muslim-muslimah sebagai pakaian seragam sekolah, akan tetapi membandingkannya untuk perlakuan serupa mungkin kurang tepat karena SMA Don Bosco adalah SMA

18. Secara umum mereka sudah terbiasa dengan berbagai kebijakan keagamaan (keislaman) mengingat sebelum masuk SMAN 6 mereka pada umumnya juga sudah bersekolah di sekolah-sekolah negeri yang menerapkan kebijakan tersebut, bahkan banyak pula yang mengakui sejak kelas 3 SD. FGD dengan 17 Pelajar Kristen SMA Negeri 6, 8-10-2014

swasta Katolik yang berada di bawah Keuskupan Padang, sementara SMA Negeri 6 adalah sekolah umum milik pemerintah yang berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945 kendati berada di kota Padang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Menariknya lagi menurut kepala sekolah karena di gereja mereka hebat menyanyi, maka terkait dengan bacaan asmaul husna misalnya lebih mudah mereka hafal dan pahami, mengalahkan hafalan sebagian pelajar Muslim. Lalu bagaimana dengan kegiatan keagamaan mereka sendiri? Seluruh kegiatan keagamaan mereka dilaksanakan di luar sekolah. Untuk pelajaran agama mereka dapatkan dari gereja pada hari Minggu. “Sudah kita katakan bahwa pada hari Minggu juga ada yang di hari Jum’at, lanjut kepala sekolah, mereka harus melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan agama mereka. Dalam persyaratannya, apa saja nyanyi yang harus dihafalkan, ibadah yang dilakukan harus diikuti dengan baik yang dibuktikan dengan absensi serta nilai dari gereja masing-masing” (R, Kepala sekolah SMAN 6, *wawancara*, 13-09-2014 dan A, Guru Agama Islam SMAN 6, *wawancara*, 18-09-2014). Apakah di sekolah mereka boleh merayakan perayaan keagamaan semisal natal? Sambil berfikir kepala sekolah menjawab “Sejauh ini dan menurut informasi guru-guru senior di sini, mereka tidak pernah melakukannya. Mereka sadar pula sebagai minoritas karena mereka minoritas hal itu tidak menonjol ke permukaan” (R, Kepala sekolah SMAN 6, *wawancara*, 13-09-2014). Sebenarnya menurut pelajar Kristen SMA Negeri 6, kami juga ingin merayakannya di sekolah. tapi “itu mustahil” kata SM, pelajar Kristen SMAN 6 karena kami di sini minoritas dan bertepatan pula dengan kalender libur nasional, lalu siapa yang mau hadir ungap ALL (SM dan ALL, Pelajar Kristen SMAN 6, *wawancara*, 2-11-2014). Tetapi apakah karena minoritas lantas rekognisi dan representasi religiusitas mereka tidak bisa diterima? Pertanyaan yang tak tersedia jawabannya oleh pihak sekolah ini

dijawab oleh Kepala Seksi pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Padang. Ini menurutnya terkait dengan cara pandang masyarakat Sumatera Barat pada umumnya yang menganut prinsip hidup ABS-SBK (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah).¹⁹ Kalau didatangkan guru Agama Kristen ke sekolah nanti mereka heboh pula, juga terkait dengan anggaran bagaimana mendatangkan guru agama untuk 1, 2 atau beberapa orang pelajar saja (S dan YR, Dinas Pendidikan Kota Padang, *wawancara*, 30-10-2014).

Memang dari segi kuantitas, jumlah pelajar Kristen relatif sedikit dari jumlah pelajar muslim. Dari 829 orang pelajar yang terdaftar pada tahun ajaran 2014/2015, pelajar non muslim hanya 21 orang. Seluruhnya dari kalangan Kristiani; 12 orang penganut Protestan dan 9 orang penganut Katolik. Mereka tersebar di berbagai kelas; di kelas X terdapat 6 orang pelajar Protestan dan 2 orang pelajar Katolik. Jika dirinci lagi pada kelas XI ada 4 orang Pelajar Protestan dan 1 orang pelajar Katolik dan pada kelas XII juga ada 2 orang pelajar Protestan dan 6 orang pelajar Katolik (Rekapitulasi Siswa Kelas XII, XI dan X Tahun Pelajaran 2014/2015, 11 Agustus 2014).

2. SMKN 2: Sekolah Model, Logika Mayoritas-Minoritas dan pembinaan Akhlak

Berbeda dari SMAN 6, SMKN 2 jelas merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Oleh sebab itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK, maka di samping terdapat 9 mata pelajaran

19. Konstruks ABS-SBK sering dipakai untuk mengidentikkan antara keminangan dengan keislaman baik sebagai identitas kultural yang melekat pada identitas orang Minang sekaligus ketika otonomi daerah digulirkan ia dijelmakan pula sebagai identitas ruang publik di ranah Minang. Oleh sebab itu, ruang publik seperti sekolah umum milik pemerintah sekalipun asal berada dalam teritori wilayah keminangan mengalami pengidentikkan dengan nilai-nilai Islam.

wajib (Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan serta Prakarya dan Kewirausahaan) dengan beban belajar 24 jam per minggu, mereka juga harus mendapatkan mata pelajar pilihan akademik dan vokasional. Untuk mata pelajaran pilihan akademik dan vokasional Program Studi Pariwisata misalnya terdiri dari Dasar Bidang Keahlian; IPA Terpadu dan Pengantar Pariwisata, Dasar Program Keahlian dan Paket Keahlian yang keseluruhannya memakan waktu yang sama dengan mata pelajaran wajib, 24 jam per minggu. Sehingga dalam satu minggu total jam pelajaran sebanyak 48, melebihi jam pelajaran yang diterima oleh pelajar SMA (Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah).

Uniknya, meski tidak mencanangkan visi religius-berakhlak mulia seperti SMA negeri 6 di atas dan dalam ritme kegiatan pembelajaran sepadat itu, kegiatan-kegiatan lain termasuk kegiatan keagamaan juga sarat direncanakan. Selain yang sudah lazim dilaksanakan seperti belajar agama Islam, berdoa dan mengaji sebelum belajar, sholat berjamaah, kultum, pelaksanaan hari-hari besar keagamaan, untuk tahun 2014/2015 juga direncanakan pelaksanaan lomba baca Al-Qur'an tingkat SD/SLTP/SLTA se-Kota Padang, mengikuti lomba-lomba kegiatan keagamaan, mengikuti undangan kegiatan keagamaan dan seminar tentang kehidupan remaja Islam madani.²⁰ Di samping itu mereka juga harus memilih salah satu dari jenis kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu misalnya agama/kerohanian dalam bentuk kegiatan TPQ/TPSQ. Nasyid/Qasyidah dan Forum Annisa'. Ini

20. Lihat Matrix Kegiatan dan Usulan Anggaran Tahun Pelajaran 2014/2015 oleh SA, Waka Kesiswaan SMK Negeri 2 Padang

dimaksudkan, seperti yang ditulis oleh Wakil Kesiswaan SMK Negeri 2 adalah untuk mencapai cita-cita menjadi sekolah model yang merupakan revisi dari sekolah yang sebelumnya berstandar internasional kategori SBI (Sekolah Berstandar Internasional) Invest tahun 2013 (Matrix Kegiatan dan Usulan Anggaran Tahun Pelajaran 2014/2015 oleh SA, Waka Kesiswaan SMK Negeri 2 Padang).

Sekolah model adalah SMK yang dikembangkan dari SMK yang mengembangkan fungsi tunggal yaitu menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja pada bidang tertentu misalnya pariwisata atau otomotif menjadi SMK yang mengembangkan multi-fungsi (fungsi majemuk) selaras dengan kebutuhan peserta didik dan kemajemukan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja dalam berbagai sektor, dan sub-sub sektornya, baik primer, sekunder, tersier maupun kuartier. Oleh sebab itu, SMK model dituntut untuk menjadi sekolah cerdas (kreatif, inovatif, inisiatif, cepat, tepat dan cekat) dalam mengembangkan program-programnya, dan memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan SMK-SMK lain dalam inputnya (kurikulum, guru, fasilitas dan sebagainya), prosesnya (pembelajaran, manajemen, kepemimpinan, dan sebagainya), dan outputnya; mutu lulusan dan mutu produk-produk lain yang dihasilkan (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=102529&val=445>, Slamet PH, Pengembangan SMK Model untuk Masa depan, FT Universitas Negeri Yogyakarta, diakses tgl 15 Oktober 2014 jam 05.00).

Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah pengembangan program dan keunggulan-keunggulan di atas harus berangkat dari kondisi dan kepentingan nasional dalam rangka mempertebal nasionalisme berdasarkan Pancasila dan pilar-pilar persatuan dan kesatuan Indonesia yaitu UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika (Ibdi). Artinya pengayaan dan pengembangan program untuk menjadi sekolah model yang multi fungsi harus berlandaskan

konstitusi misalnya dalam semangat persatuan dan menghargai keragaman seluruh komponen bangsa dan negara. Namun dari berbagai program dan keunggulan-keunggulan yang sudah dan direncanakan untuk tahun 2014 pada SMKN 2, tidak satupun yang ditujukan untuk memperkuat pilar persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Ini setidaknya terlihat dari Program Kebangsaan/Nasionalisme/Patriotisme yang disediakan untuk pelajar: (1) pelaksanaan upacara bendera, (2) pelaksanaan upacara bendera OSIS, (3) patroli keamanan sekolah, (4) Palang Merah Remaja (PMR) dan UKS, (5) pembinaan kelompok Sispala, (6) pembinaan karakter kewiraan dan cinta tanah air, (7) pelaksanaan lomba PBB dan gerak jalan antar kelas/sekolah, (8) persiapan menyambut hari besar nasional, (9) pembinaan kepramukaan, (10) pembinaan latihan PBB, (11) pembinaan tertib di jalan raya (lalu lintas), dan 12 pembinaan anti narkoba (Matrix kegiatan-kegiatan "Karakter Kebangsaan/nasionalisme/Patriotisme", Waka Kesiswaan SMKN 2 2014/2015).

Lalu mengapa absen kegiatan yang bernuansa kebinnekaan? Apakah kegiatan tersebut tidak diperlukan untuk penguatan karakter kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme? Baik Wakil Kurikulum maupun Wakil Kesiswaan SMKN 2 menghubungkan jawaban untuk pertanyaan tersebut dengan jumlah pelajar non muslim di sekolah mereka yang tidak seberapa; "anak-anak itu tidak banyak. Keseluruhannya tidak cukup 10 orang. Artinya tidak sama dengan SMA Don Bosco. Di Don Bosco mungkin banyak (maksudnya pelajar muslim), mereka juga harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut" "...jumlahnya tidak banyak, mungkin dari 1200 orang hanya sekitar 20 orang" (S, Wakil Kurikulum SMKN 2, *Wawancara*, 11-09-2014)

Kendati antara wakil kurikulum dengan wakil kesiswaan terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah pelajar non muslim,

namun keduanya mendasarkan argumen absennya kebijakan keragaman pada posisi minoritas pelajar non muslim tersebut. Dan sama seperti argumen kepala sekolah SMAN 6, perbandingan perlakuan juga didasarkan apa yang menurut pemahaman mereka terjadi pada SMA Don Bosco. Oleh sebab itu baik untuk kegiatan baca Al-Qur'an termasuk membaca asmaul husna, sholat berjamaah dan kultum, pelajar non muslim yang keseluruhannya beragama Kristen dilibatkan; masuk ruangan dan ada absensinya (S, Wakil Kurikulum SMKN 2, *Wawancara*, 11-09-2014). Meskipun dalam pelaksanaan sholat berjamaah misalnya ketika teman-teman muslim sholat mereka yang mengabsensinya dan saat kultum sebagian ada yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan misalnya menjadi protokol, sebagian lagi hanya mendengar saja. Hanya saja dalam proses pembelajaran Agama Islam walau tetap diabsen, mereka diperbolehkan juga untuk keluar ruangan. Tapi pada umumnya pelajar Kristen tetap bertahan dalam ruangan (ITW, Pelajar Kristen SMKN 2, *wawancara*, 21-09-2014). Pun dalam soal pakaian, mereka harus menyesuaikan sebagaimana bentuk dan model yang dipakai oleh saudara-saudara mereka yang beragama Islam; baju kurung bagi yang perempuan dengan mudhawarah segi tiga tutup kepala tanpa renda atau polos khusus hari Jumat memakai baju kurung muslim dengan mudhawarahnya bagi yang perempuan dan memakai baju koko dan dianjurkan memakai kopiah nasional bagi yang laki-laki (Lihat kembali catatan kaki no. 30) Ketika muncul protes di kalangan orang tua pelajar non muslim, wakil kesiswaan berargumen, "jangan ini dilihat sebagai pakaian muslimnya. Ini bukan pakaian muslimnya yang utama tapi ini pakaian sekolah. Kalau bapak keberatan laporkan ke dinas (maksudnya Dinas Pendidikan Kota Padang)" (SA, Wakil Kesiswaan, *wawancara*, 11-09-2014).

Mengapa tidak disebut saja busana muslim muslimah sebagaimana yang tertera dalam instruksi wali kota Padang nomor

451.422/Binsos-iii/2005? Wakil kesiswaan beralasan “kalau dikatakan pakaian muslim nanti jadi masalah. Tidak muslim kok pakai pakaian muslim” (SA, Wakil Kesiswaan, *wawancara*, 11-09-2014) Terhadap masalah ini wakil kesiswaan merasa tidak pernah menerima keluhan langsung dari orang tua non muslim. “Kalau yang sifatnya diam-diam kan tidak masalah dengan kita. Tentu kita tidak tahu. Yang diklaim tidak ada, misalnya dalam rapat wali murid. Jumlahnya kan tidak seberapa, kalau sampai 50 orang misalnya oklah” (S,Wakil Kurikulum SMKN 2 *wawancara*, 11-09-2014) Ia menambahkan, pakai baju kurung dan jilbab itu sudah menjadi pakaian umum di Kota Padang. Jadi sudah ketentuan. Kemudian mungkin menurutnya dari sudut pelajar non muslim sendiri tidak bermasalah. Sementara bagi yang muslim itu sudah bagus; menurut aurat (S,Wakil Kurikulum SMKN 2 *wawancara*, 11-09-2014). Hanya saja, Kasi Pendidikan Menengah SMA/SMK Dinas Pendidikan Kota Padang, memberikan pandangan umum dalam hal ini. Menurutnya untuk pelajar non-muslim diberikan kebebasan; kalau mereka mau memakai busana muslim silakan, tapi tidak boleh dipaksa. Untuk mereka cukup misalnya memakai pakaian yang sopan dan pantas termasuk juga masuk ke lingkungan tempat ibadah (mesjid) kan memiliki persyaratan tersendiri. Padahal secara jujur mereka juga berhak mendapat layanan serupa tandasnya. “Ini kan sekolah negeri, mereka berhak pula mendapatkan layanan yang sama, tapi kita nasionalisme, Ini bukan negara Islam”, ungkapinya dengan nada meninggi (S dan YR, Dinas Pendidikan Kota Padang, *wawancara*, 30-10-2014).

Argumen lain yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka peningkatan akhlak dan kesadaran beragama pelajar. Argumen ini cukup beralasan terlebih pada tahun yang sama terungkap semakin meningkatnya kenakalan pelajar dan penyakit masyarakat (pekat) di Kota Padang. Jika di tahun sebelumnya (2013) terdapat 1.420 kasus,

maka pada tahun 2014 naik menjadi 2.116 kasus. Dari 2.116 kasus, 615 kasus di antaranya adalah kasus kenakalan pelajar, disusul 613 kasus pekat, 498 kasus penertiban PKL (pedagang kaki lima) dan 114 kasus pengamen jalanan. Menurut Amrizal, Kasi Trantib pol PP Padang, kasus kenakalan pelajar di kota ini memang tidak pernah sepi. Hampir setiap hari ada pelajar yang ditangkap, mulai dari bolos sekolah, judi, miras hingga tawuran. (<http://www.koran.padek.co/read/detail/14973> diakses tanggal 21 maret 2015 jam 13.29 WIB). Pengamat sosial budaya Unand, Emiraldi Catra mensinyalir kalau masalah kenakalan remaja lebih disebabkan oleh karena frustrasi dan ideologis. Frustrasi terjadi ketika pelajar-remaja mengalami masalah dalam keluarga. Sedangkan karena ideologis berbentuk perlawanan dari remaja itu sendiri. (Ibid).

Hal tersebut juga dirasakan pihak sekolah SMKN 2 Padang. Anak-anak ini ungap Wakil Kesiswaan, dalam usia remaja, dalam masa pencarian jati diri. Jadi perlu pembinaan-pembinaan. Dan ini tidak mudah dilakukan, mula-mula yang melakukan sholat berjamaah misalnya tidak sebanyak ini, tapi dengan selalu diajak, dimotivasi dan disosialisasikan akhirnya bertambah banyak juga (SA, Wakil Kesiswaan SMKN 2 *wawancara*, 11-09-2014) dan kegiatan-kegiatan keagamaan di atas diorientasikan untuk itu. Hanya saja Wakil Kurikulum SMKN 2 tetap saja mengeluhkan perilaku pelajarnya yang berbeda sekali antara di sekolah dan di luar sekolah. Apakah agama ini sudah membosankan mereka tanya wakil kesiswaan ini? Pertanyaan yang kemudian ia jawab sendiri bahwa orang menjadi baik itu didukung oleh tiga hal; lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Ia memberikan contoh dalam soal berpakaian. Ketika pergi jalan-jalan mereka tetap mengenakan busana muslim-muslimah namun misalnya celananya ketat dan pakai baju kaus. Ini juga tampak saat peneliti menawarkan untuk mewawancarai para orang tua pelajar puteri, umumnya mereka

keberatan yang menyiratkan terdapat masalah antara pembinaan keagamaan di sekolah dengan perilaku sehari-hari mereka di rumah atau di luar sekolah. Pernah juga menurut pengakuan Y, salah seorang guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah tersebut, ada orang tua yang protes ke sekolah. Ia keberatan kalau anaknya diberi nilai untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 80, seharusnya tidak usah diluluskan karena terlalu jauh jarak antara nilai agama yang ia dapatkan di sekolah dengan perilaku beragamanya (Y, Guru Pendidikan Agama Islam SMKN 2, *wawancara*, 17-09-2014). Juga dalam hal menegakan kebersihan padahal Islam sudah mengajarkan untuk hidup bersih dan indah. Guru-guru pun sudah berulang kali mengingatkan hal itu, tetap saja walau sudah dibantu oleh tenaga kebersihan terdapat sampah-sampah bekas botol minuman gelas misalnya yang berserakan (S, Wakil kurikulum SMKN 2, *wawancara*, 11-09-2014).

B. Menata Keragaman di Atas Keseragaman

Di atas sudah dijelaskan, kendati di SMA Negeri 6 maupun di SMKN 2 pelajar Muslim memang mayoritas; di SMAN 6 sebanyak 97,47 % (829 orang) pelajar Muslim sedangkan di SMKN 2 sejumlah 97,08 % (1156 orang) pelajar Muslim. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di kedua sekolah tersebut juga pelajar non-muslim kendati jumlah mereka sangat kecil, minoritas; di SMAN 6, hanya 2,53 % (21 orang) sementara di SMKN cuma 2,02 % (26 orang). Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kedua sekolah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di atas yang sebetulnya hanya ditujukan untuk pelajar Muslim namun pada saat yang sama berdampak langsung atau tidak langsung terhadap keberadaan pelajar non muslim.

Baik di SMA Negeri 6 maupun di SMK Negeri 2, secara umum, kebijakan-kebijakan di atas menjadi bahagian dari aturan tertulis.

SMA Negeri 6 menyebutnya sebagai “Tata Tertib Siswa/Siswi SMA Negeri 6 Padang” sementara di SMK Negeri 2 dalam tema yang kurang lebih sama disebut sebagai, “Peraturan dan Tata Tertib Siswa SMKN 2 Padang.” Sedangkan mekanisme pelaksanaannya lebih merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis terutama dalam relasinya dengan pelajar non muslim. Mengingat alasan terakhir ini, maka implementasi kebijakan-kebijakan multikulturalisme yang akan disorot pada kedua sekolah terbatas pada kebijakan tentang pakaian seragam sekolah, mengaji (membaca Al-Qur’an) sebelum belajar, kultum atau muhadharah dan sholat berjamaah, pembelajaran Agama Islam (Pendidikan Agama dan Budi Pekerti) dan peringatan hari-hari besar Islam. Ini dikarenakan pihak sekolah tampak ambivalen; pada satu sisi mengakui keragaman agama pelajar, Muslim dan Kristen. Namun pada sisi lain tampak “hanya” menerima representasi keberagaman pelajar muslim saja.

Pertama, aturan berpakaian. Seperti yang tergambar pada halaman 19 dari sub bab SMAN 6: Sejarah, Visi, Misi dan Tata Tertib Pelajar, paling tidak terdapat dua entitas keragaman terkait dengan pakaian seragam sekolah, *pertama* jenis pakaian dalam konteks perbedaan ideologi/agama karena meski tidak disebut tentang model pakaian muslim yang dimaksud, dalam prakteknya pada hari Jum’at pelajar putera memakai baju koko untuk membedakannya dengan pakaian yang dipakai pada hari-hari lain. Dan sebenarnya sejak hari Senin sampai hari Sabtu seluruh pelajar sudah mengenakan busana muslim muslimah karena sudah menutup aurat terutama bagi pelajar puteri. Untuk busana muslimnya sendiri disesuaikan dengan *uniform* sekolah masing-masing; SMAN 6 memakai baju koko berwarna hijau telur asin dengan setelan celana abu-abu. Sementara pelajar puteri tetap seperti pakaian dengan model biasa hanya saja yang tampak berbeda adalah jilbab berwarna putih, baju

kurung hijau telur asin juga dan rok panjang mengikuti warna kain panjang (Hasil *observasi* pelaksanaan kulture, 24-10-2014).

Tentu persoalannya adalah ketika disebutkan memakai busana muslim, logikanya, mengandaikan ada pula pakaian yang disebut bukan pakaian muslim. Kalau begitu adakah pakaian seragam sekolah yang bukan muslim itu setidaknya adakah pakaian seragam untuk pelajar non muslim pada hari Jum'at sebagaimana pakaian seragam muslim untuk pelajar muslim pada hari tersebut? Baik dari tata tertib maupun dari hasil wawancara dengan pihak sekolah jawabannya jelas tidak ada. Menurut pihak sekolah, pelajar non muslim sudah "tahu" dalam pengertian tidak ada pakaian seragam sekolah yang khusus untuk mereka dan harus berpakaian seragam seperti yang dipakai oleh teman teman mereka yang beragama Islam (Lihat kembali kutipan no. 23 halaman 20) Menurut salah seorang Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 6 yang dimaksud "menyesuaikan" dalam konteks berpakaian adalah mengenakan busana muslim-muslimah persis seperti yang dikenakan oleh pelajar muslim (A, Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 6 Padang, *wawancara*, 18-09-2014). Komite sekolah yang mengaku sebagai "orang dekat" walikota Padang yang mengeluarkan instruksi tentang pakaian seragam sekolah juga membenarkan hal tersebut. Kendati disebutkan secara tertulis bahwa untuk pelajar non muslim menyesuaikan dengan memakai celana panjang bagi yang putera dan baju kurung untuk yang puteri, tetapi baju kurung yang dimaksud sesungguhnya adalah busana muslimah karena harus pakai penutup kepala semisal jilbab atau mudhawarah. Ia bahkan ketika menjadi kepala sekolah salah satu SMP di kota ini mewajibkan juga kepada keluarga semua pelajar termasuk non muslim bila berurusan dengan sekolah juga mengenakan pakaian muslim-muslimah. Ia sendiri menyangkan kalau di SMAN 6 hal tersebut belum diberlakukan; baru terbatas pada pelajar saja (Y, Komite Sekolah SMAN 6 Padang,

wawancara, 24-10-2014) Hanya saja yang disosialisasikan dan tidak tertulis adalah bahwa selain hari Jumat memakai pakaian seragam sekolah yang tidak cukup alasan untuk tidak menyebutnya sebagai busana muslim karena yang berbeda dari apa yang disebut sebagai pakaian biasa hanyalah warnanya saja, sementara dari modelnya tetap sama dengan busana muslim-muslimah yang dipakai pelajar pada hari Jum'at. Ketentuan tersebut tampak telah menjadi semacam acuan yang sudah dipahami terutama oleh pelajar non muslim.

Sementara yang *kedua* tentang keragaman model pakaian dalam konteks relasi gender sama juga halnya dengan jenis pakaian di atas, untuk pelajar muslim tentu juga tidak menjadi persoalan karena itulah ketentuan yang secara *common sense* dipahami kaum muslim menyangkut ketentuan dalam berbusana. Namun untuk pelajar non muslim terutama pelajar puteri tetap saja menimbulkan persoalan tersendiri karena di samping tidak sesuai dengan ketentuan resmi walikota yang sudah disebutkan sebelumnya, juga keberatan dari pelajar non muslim terutama pelajar puteri. Memang mereka secara umum tidak keberatan memakai busana muslimah seperti yang diinginkan pihak sekolah, tetapi mereka tetap keberatan untuk memakai penutup kepala apakah dengan model mudhawarah segituga atau pakai jilbab karena ketika memakai baju kurung plus penutup kepala dengan model tersebut sudah dimaknai sebagai pakaian muslim.²¹

Bagaimana dengan ketentuan pakaian sejenis bagi pelajar SMKN 2? Dalam Peraturan dan Tata Tertib Siswa SMKN 2 juga termaktub ketentuan yang sama. Namun terdapat sedikit perbedaan dalam soal model pakaian. Jika di SMAN 6 tidak terdapat ketentuan

21. Hasil FGD dengan sejumlah pelajar Kristen SMAN 6 maupun dengan sejumlah pelajar Kristen SMKN 2 menunjukkan meski mereka sudah terbiasa mengenakan busana muslim muslimah sejak dari SD, namun mereka tetap berat hati untuk memakai tutup kepala apakah dalam bentuk jilbab atau mudhawarah. Penutup kepala pada satu sisi mereka anggap merepotkan, di sisi lain sudah dimaknai sebagai pakaian muslimah.

tertulis tentang model pemakaian busana muslim termasuk untuk hari Jum'at, di SMKN 2 dituliskan ketentuan tersebut. Khusus hari Senin sampai hari Rabu dan Sabtu “siswa memakai celana/rok abu-abu dan baju putih (baju kurung bagi yang puteri sesuai dengan model yang ditetapkan dengan mudhawarah segi tiga tutup kepala tanpa rendo atau polos.”⁸ Kendati yang tertulis “baju kurung bagi yang puteri” namun tetap memakai penutup kepala; mudhawarah. Inilah yang disebut pihak sekolah sebagai pakaian seragam sekolah (S, Wakil Kurikulum dan SA Wakil Kesiswaan SMKN 2 Padang, *wawancara*, 11-09-2014). Sementara yang dimaksud sebagai pakaian muslim khusus pada hari Jum'at adalah “siswa puteri memakai baju kurung muslim dengan mudhawarahnya/segi tiga, rok hitam, dan siswa putera memakai baju koko yang sering disebut juga “baju taqwa” dan dianjurkan memakai kopiah nasional”(Ibid). Tidak hanya sampai di situ, “siswa hadir/datang atau berurusan ke sekolah di luar jam belajar pun hanya boleh dan dilayani yang berpakaian seragam sekolah (Ibid). Pakaian sekolah yang dimaksud untuk pelajar puteri bisa busana muslim yang dipakai pada hari Jumat atau baju kurung yang dipakai pada hari Senin sampai hari Rabu. Hanya saja dalam prakteknya tidak juga sekaku apa yang tertulis misalnya ketika les dengan guru tertentu terdapat juga pelajar yang tidak mengenakan tutup kepala. Bagaimana dengan pelajar non muslim? Seperti yang disebutkan sebelum, mereka harus menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut dalam pengertian memakai pakaian seragam sekolah atau busana muslim persis seperti yang dipakai oleh pelajar muslim. Hanya saja sama seperti di SMAN 6 yang disosialisasikan kepada seluruh pelajar termasuk pelajar non-muslim adalah selain hari Jum'at memakai seragam sekolah dalam pengertian hanya pada hari Jum'at saja pelajar non-muslim yang disebut-sebutkan menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai oleh teman-teman mereka yang beragama Islam.

Kedua, berdoa dan membaca Al-Qur'an sebelum belajar. Baik di SMAN 6 maupun di SMKN 2, kegiatan ini sudah menjadi rutinitas menjelang jam pelajaran dimulai. Diawali oleh pembacaan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing pelajar. Di sinilah setidaknya representasi kekristenan pelajar Kristen secara simbolik dapat diakui di ruang sekolah walau hanya sekedar berdo'a dalam hati. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an secara bersama-sama sekitar 3 atau 4 ayat. Mengapa tidak dibaca sendiri secara bergiliran? "Kalau dibaca oleh masing-masing pelajar menurut salah seorang Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 6, di samping waktunya tidak cukup, juga di saat yang satu sedang membaca yang lain akan meribut apalagi bagi pelajar yang belum fasih bacanya (N, Guru Agama Islam SMAN 6 Padang, *wawancara*, 19-10-2014). Untuk kedua kegiatan ini, pelajar non muslim tetap di dalam ruangan karena jarak waktunya tidak lama menjelang jam pertama dimulai.

Hanya saja baik di SMAN 6 maupun di SMKN 2, mekanisme ini tidak termuat dalam tata tertib siswa, meski menyangkut pakaian dan kelengkapannya di SMKN 2 pada poin g disebutkan "Siswa muslim wajib membawa kelengkapan sholat dan Al-Qur'an setiap hari" Kendati dalam klausul aturan disebutkan "siswa muslim" dan secara tidak langsung sudah terdapat polarisasi antara pelajar muslim dengan non muslim dalam konteks aturan tersebut, namun sama dengan aturan soal pakaian tetap juga tidak meruangkan representasi kekristenan misalnya menyuruh untuk membawa perlengkapan sejenis agar saat yang muslim membaca Al-Qur'an misalnya, yang Kristen membaca atau mempelajari Alkitab. Bagi pelajar Kristen seperti yang diakui NZ, pelajar kelas XI SMKN 2 juga belum terfikirkan hal tersebut. Alih-alih untuk sekedar mengisi kekosongan waktu sebagian mereka ada yang berdo'a dalam hati, diam saja dan sebagian bahkan ada yang main *game* (NZ, *wawancara*, 29-10-2014).

Ketiga, kultum yang terkadang disebut juga ceramah singkat dilaksanakan dalam dua bentuk; menjelang sholat berjamaah dan dalam kegiatan kultum sendiri pada setiap Jum'at pagi. Di SMAN 6 ceramah singkat pada waktu Jum'at pagi terkadang disebut juga muhadharah satu paket dengan kegiatan pembacaan Al-Qur'an, saritilawah, bacaan asmaul husna yang dibaca secara bersama-sama, ceramah singkat itu sendiri dan nyanyian religi serta diakhiri dengan tausiah/pencerahan yang sebelum mendatangkan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Biasanya memakan waktu kurang lebih satu jam. Namun pada waktu pelaksanaan kultum hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2014 di mana peneliti berkesempatan mengamati prosesi pelaksanaan kultum tersebut berlangsung agak lama, hampir mendekati tiga jam. karena sekaligus diisi oleh ceramah peringatan 1 Muharram, tahun baru Islam, 1436 H. Sedangkan ceramah singkat yang dilaksanakan menjelang sholat berjamaah disebut kultum.

Paket kegiatan muhadharah disediakan oleh pelajar per kelas. Pelajar per kelas menyiapkan acara antara lain minimal ada pembawa acara dengan dua bahasa atau tiga bahasa, membaca Al-Qur'an dan terjemahannya, ceramah singkat 5 sampai 7 menit diakhiri dengan penampilan seni bernuansa religi (R, *wawancara*, 13-09-2014). Sementara untuk tema kultum terkait dengan ayat yang dibaca. Jika ayat yang dibaca mengajarkan untuk patuh dan tidak boleh durhaka pada orang tua, maka pada ceramah singkat mereka sudah bisa ditebak akan bercerita tentang tidak boleh durhaka dan dampaknya di dunia dan akhirat. Nyanyian religinya juga bertemakan seputar ibu. Hanya saja menurut pihak sekolah, mereka masih kesulitan dalam menentukan keserasian antara ayat yang dibaca dengan tema kultumnya, belum diurut. Kalau diurut mereka masih terkendala (R, *wawancara*, 13-09-2014) Kegiatan kultum sendiri tertera dalam tata tertib pelajar pada pasal 8 tentang sholat berjamaah pada poin 2; "Setiap siswa/siswi wajib menjalankan piket kultum yang sudah

ditentukan.” Cuma kegiatan muhadharah dengan berbagai paketnya tidak dicantumkan dalam tata tertib pelajar. Semua rangkaian kegiatan di atas diadakan di halaman sekolah yang dihadiri oleh semua komponen warga sekolah yang pada umumnya staf dan guru-guru perempuan (Hasil observasi, 24-10-2014).



Gambar 1: suasana dan persiapan menjelang dimulainya kultum. Tampak seorang guru Agama Islam sedang berjalan mengatur barisan pelajarinya (sumber gambar dokumen tim peneliti)



Gambar 2: Suasana saat kultum, sekelompok pelajar yang berdiri di tengah di depan beranda sekolah adalah pelaksana kultum (sumber; gambar dokumen tim peneliti)

Sementara agak berbeda dengan SMAN 6, di SMKN 2 baik yang dilaksanakan menjelang sholat berjamaah atau yang dilaksanakan pada Jum'at pagi disebut kultum, kendati kegiatan kultum tersebut satu paket juga dengan kegiatan protokol dalam dua atau tiga bahasa dan saat peneliti melakukan observasi tanggal 21 Oktober 2014 dilangsungkan dalam dua bahasa; bahasa Inggris dan bahasa Jepang, termasuk juga kultumnya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'an dan saritilawah, pembacaan asmaul husna, selawat Nabi (badar) dan ditutup dengan nyanyian religi. Tidak ada lagi ceramah atau tausiah dari guru atau yang didatangkan dari luar. Di antara mekanismenya adalah, pertama, persiapan kelas pelaksana paling lambat 3 hari sebelum hari H; kedua, koordinator pelaksana melaporkan secara tertulis rincian kegiatan dan pembagian tugas; ketiga, seluruh siswa telah hadir paling lambat 15 menit sebelum kultum dimulai; keempat, pengurus OSIS mengatur semua kelas/tingkat bersama ketua-ketua kelas dengan mengambil absensi sebelum kultum dimulai; kelima, kultum sendiri dimulai pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh seluruh warga sekolah kecuali piket. Dan yang terpenting adalah pengurus OSIS mengatur semua kelas/tingkat bersama dengan ketua-ketua kelas dengan mengambil absensi sebelum kultum dimulai. Untuk pelajar non muslim menurut DZ tidak diabsensi juga tidak diwajibkan tetapi karena kegiatan ini diadakan sebelum jam pertaman dimulai maka mau tidak mau mereka harus menghadiri kegiatan tersebut karena kalau terlambat akan "dibariskan" (dihukum) bersama pelajar lain yang terlambat (DZ, pelajar Kristen SMKN 2, *wawancara* 29-10-2014)



Gambar 3: saat acara kultum baru saja dimulai,tampak 2 pembawa acara dua orang secara bergantian dalam 2 bahasa (sumber gambar dokumen tim peneliti)



Gambar 4: penampilan bacaan asmaul husna oleh kelas pelaksana yang kemudian diikuti oleh seluruh warga sekolah. (sumber gambar dokumen tim peneliti)

Keempat, sholat berjamaah. Di SMAN 6 tertulis secara tegas dalam tata tertib pelajar pasal 8 tentang sholat berjamaah, “Setiap siswa/siswi yang muslim wajib sholat berjamaah di mushola pada saat Zuhur dan Ashar.”⁸ Sementara di SMKN 2 ketentuan sholat berjamaah secara eksplisit saja disebutkan bersama ketentuan membaca Al-Qur’an, “Siswa muslim wajib membawa kelengkapan sholat dan Al-Qur’an setiap hari”.⁹ Sebelum sholat berjamaah juga diawali dulu oleh ceramah singkat sekitar 7 menit kemudian baru dilaksanakan sholat berjamaah yang diimami oleh salah seorang majelis guru. Dan jika tidak ada, baru diimani oleh pelajar. Namun mengingat jumlah pelajar melebihi kapasitas tempat ibadah, maka baik di SMAN 6 maupun di SMKN 2 sholat berjamaah dilaksanakan secara bergantian.



Gambar 5: saat pelaksanaan sholat berjamaah di aula SMKN 2 yang biasa dijadikan sebagai tempat kultum dan sholat berjamaah (sumber dokumen tim peneliti).

Kelima, pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dilakukan saat pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Prosesnya seperti

yang tergambar dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Pendidikan Agama Islam SMAN 6 semester I kelas XII tahun 2014/2015 dimulai dari perencanaan pembelajaran dengan menyiapkan silabus yang memuat Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator Kompetensi, Tujuan Pembelajaran, Materi Ajar yang meliputi fakta, konsep, prinsip dan prosedur, Alokasi Waktu dan Metode Pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran yang terbagi dalam tiga tahap. Pertama kegiatan pendahuluan yang diawali dengan berdo'a, mengecek kehadiran pelajar, menyampaikan tujuan pembelajaran dan melakukan apresiasi. Kedua, kegiatan inti yang meliputi eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Ketiga kegiatan penutup; pelajar dibantu oleh guru mempertegas kembali kesimpulan materi; guru menyebutkan materi yang akan dipelajari minggu depan dan meminta pelajar untuk mempelajari materi tersebut; guru menutup pelajaran dengan do'a. Seluruh rangkaian kegiatan ini hanya ditujukan oleh pelajar muslim. Sementara bagi pelajar Kristen misalnya boleh keluar atau di dalam ruangan belajar. Namun kebanyakan mereka berada di dalam karena pelajar Kristen yang tersebar di beberap lokal jumlahnya sangat kecil paling banyak hanya 3 orang dalam satu lokal. Terkadang juga ada yang cuma 1 orang saja.

C. Menjadi Seragam Bukan Beragam

Selesai wawancara, ketika peneliti keluar dari ruangan kepala sekolah berpapasan dengan para pelajarnya yang kebanyakan adalah puteri, lalu terjadi dialog singkat antara kepala sekolah SMAN 6 dengan pelajar tersebut: “Anda non-muslim”? “Muslim pak!” Jawab 2 orang pelajar puteri yang melintas di depannya. “Bukan, muslim pak”, jawab yang lain ketika kepala sekolah menggulang pertanyaan yang sama. “Itu!” Sambil menunjuk belasan siswa yang berdiri beberapa langkah di depannya. Serentak mereka menjawab,

“muslim semua pak!”²⁸ Di kali lain, wakil kesiswaan SMKN 2 juga mengaku kadang-kadang sering salah ketika memanggil pelajarnya untuk menunaikan sholat berjamaah, “, Sholat, sholat!”, “kenapa kamu tidak sholat”? “Saya non Pak” (maksudnya non muslim), kiranya tidak Islam.”(Hasil *observasi* di SMAN 6, 13-09-2014).

Kepala sekolah SMAN 6 tentu tidak sedang bercanda dengan pelajarnya. Masak mau bercanda tentang isu sensitif, menyangkut masalah agama. Ia serius karena ketika mengakhiri wawancara peneliti sudah menanyakan kapan saat yang tepat untuk mewawancarai pelajarnya. Ia pun sudah menjawab habis sholat berjamaah ketika Zuhur. Saat keluar dari ruangnya dan berpapasan dengan pelajar-pelajar yang umumnya perempuan, reflek saja kepala sekolah bertanya pada pelajarnya seperti dialog di atas.

Andai di SMAN 6 diruangkan sedikit keragaman dalam konteks pakaian seragam sekolah katakanlah untuk yang non muslim memakai baju kurung saja tanpa jilbab seperti apa yang tertulis dalam instruksi walikota Padang No. 451.422/Binsos-iii/2005 tentu kepala sekolah SMAN 6 tidak perlu mengulang-ulang pertanyaan anda non-muslim sampai tiga kali hanya untuk sekedar menentukan pelajarnya muslim atau bukan. Ia sudah bisa memastikan kalau yang non-muslim tidak memakai jilbab karena tidak memakai jilbab sudah dianggap semacam identitas yang membedakan dan kekhasan yang melekat pada entitas pelajar non-muslim (A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2000: 18). Apalagi seperti yang diinginkan pelajar non muslim; “pakaian sopan, baju tidak tembus pandang, rok di bawah lutut dan yang putra pakai kemeja dan celana panjang” (FGD bersama sejumlah pelajar Kristen SMAN 6, 08-09-2014) Ini belum mempertimbangkan dampak psikis pelajar non muslim dalam jumlah yang tidak seberapa lalu harus menerima panggilan, “hei kamu non-muslim, ke sini, sini, mana lagi temanmu?”²⁹ Mungkin untuk yang sudah sering mendengar dan menerima panggilan seperti itu,

menganggapnya sudah biasa. Tapi bagaimana dengan yang memiliki sensitivitas tinggi seperti KH yang tidak nyaman dan risih dengan panggilan seperti itu (Terungkap saat FGD bersama sejumlah pelajar Kristen SMAN 6, 08-09-2014). Juga kemungkinan dampak yang lain misalnya pelajar ini kedatangan/tertangkap basah berbuat mesum, setelah ditelusuri ternyata bukan pelajar Muslim melainkan pelajar non-muslim. Apa yang bakal terjadi; pelaku yang berbuat mesum bukan muslim dan di saat yang sama ia berpakaian seperti orang Islam. Ini jelas akan menimbulkan persoalan tersendiri di kalangan umat beragama tutur F, Guru Agama Katolik SMA DEK (F, Guru Agama Katolik SMA DEK Padang, *wawancara*, 15-09-2014).

Begitu pula dengan SA, tidak akan mungkin salah suruh andai identitas dalam bentuk apapun yang membedakan antara pelajar muslim dengan non muslim tersebut dilazimkan. Apalagi sampai salah suruh untuk melakukan kegiatan yang tergolong penting dalam Islam (sholat). Sholat sendiri dalam Islam menempati urutan kedua bersama ibadah lain sebagai pilar penyangga agama Islam, bahkan dikatakan sebagai pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir (Sayyid Sabiq, terj. Mahyuddin Abas, 1973). Sholat mungkin dapat disetarakan pentingnya dengan kebaktian atau misa di gereja untuk pelajar Kristennya. Bayangkan kalau hal yang sama misalnya dialami pelajar Muslim yang salah suruh oleh guru Kristen untuk melakukan misa ke gereja. Persoalan mungkin akan jadi lain; bisa-bisa dipahami sebagai ajakan pindah atau pemaksaan pindah agama karena jangankan untuk masuk gereja, mengucapkan selamat natal saja sudah menimbulkan kontroversi; ada yang tidak membolehkan bahkan mengharamkan dan walaupun ada yang membolehkan terkadang tidak dalam bentuk yang jelas, mudah dilaksanakan.☒

Pertanyaan yang menarik untuk ditelusuri adalah mengapa sekolah umum yang diperuntukan untuk semua komponen bangsa tanpa melihat perbedaan ras, etnis, budaya dan agama

ini terperangkat dalam wajah keseragaman? Bukankah sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan negara dalam dua dasawarsa terakhir setidaknya meruangkan keragaman untuk tidak mengatakan memperkuat keragaman di ruang publik sekolah? Jawabannya pada satu sisi tidak bisa dilepaskan dari bawaan sistem pemerintahan Orde Baru yang represif dan otoriter turut mempengaruhi dan masih melekat pada batang tubuh pendidikan, sementara di sisi lain desentralisasi lewat otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan telah mempertemukan kekuatan represif tersebut dengan kekuatan-kekuatan (termasuk kekuatan Islam) yang selama ini mengalami represi pemerintah Orde Baru untuk bangkit dan menjelma ke ruang publik bersama kebebasan yang disediakan demokrasi. Orde Baru telah mentransformasikan konsep “bangsa yang satu” yang dipopulerkan Soekarno menjadi politik “asas tunggal” yang menghomogenitas masyarakat. Prinsip asas tunggal selain memperlihatkan proses penundukan berbagai kekuatan masyarakat termasuk kekuatan ideologis kepada satu prinsip sosial politik, juga memperlihatkan konsepsi hubungan negara dan rakyat. Rakyat dalam hal ini dilihat sebagai kekuatan yang perlu ditundukan demi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan-perbedaan sebagai basis kekuatan sosial, bukan saja dihilangkan tetapi diperangi sebagai sebuah kesalahan dan keragaman budaya dalam bentuk suku, agama ras dan golongan-golongan diramu menjadi politik SARA yang tak tersentuh (Irwan Abdullah, 2010). Dalam dunia pendidikan, kebijakan ini menjelma dalam penyeragaman dan pemisahan. Penyeragaman terlihat dalam bentuk pakaian seragam, lambang-lambang terutama kurikulum, silabus dan bahan ajar. Sementara pemisahan terlihat pula pada pola-pola dan proses pembelajaran Agama di sekolah-sekolah yang mensegregasi pelajar berdasarkan agama; guru-para siswa-rombongan belajar berdasarkan agama masing-masing. Ini disadari atau tidak telah mensegregasi dan mengisolasi pelajar untuk tidak kenal satu sama lain, termasuk

juga guru agama yang mengajari pelajar pada masing-masing agama tersebut. Saling tidak kenal setidaknya akan berimplikasi pada saling tidak memahami dan saling tidak menghormati serta saling tidak menghargai yang berujung pada sikap intoleransi. Maka tidak heran kalau dalam beberapa riset sikap intoleran tak selalu identik dengan sikap siswa, namun juga tipikal guru agamanya (Ismatu Ropi, 2011).

Pada sisi lain, otonomi daerah juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah termasuk kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal (Fukosindo Mandiri, *op.cit*) Ini dalam konteks masyarakat Sumatera Barat bersahutan dengan isu “membangkitkan batang tarandam” dalam pengertian mengembalikan kejayaan lama yang direpresi oleh pemerintahan Orde Baru dengan spirit “babaliak ka nagari babalik ka surau.” Babaliak ka nagari atau kembali ke nagari artinya dalam konteks budaya kembali ke nilai-nilai adat atau tradisi Minang sedangkan babaliak ka surau atau kembali ke surau dimaknai kembali ke nilai-nilai Islam. Dalam konteks dunia pendidikan di Kota Padang, semangat ini segera menjelma dalam bentuk instruksi walikota Padang No. 451.422/Binsos-iii/2005 tentang pelaksanaan wirid remaja, didikan subuh, dan anti togel/narkoba serta berpakaian muslim dan muslimah bagi murid/siswa SD/MI?SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MA di kota Padang. Selain itu juga dalam bentuk perda misalnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelegaraan Pendidikan. Pada Bab V menyangkut Kewajiban Peserta Didik pada Pasal 14 di antaranya diingatkan untuk (c) Melaksanakan kewajiban atau perintah agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lainnya; (g) Mengikuti dan ikut menyelenggarakan hari-hari besar keagamaan masing-masing; (h) Mengikuti aktivitas olah raga seperti berenang, beladiri serta cabang olah raga prioritas lainnya yang teknis pelaksanaannya diatur dengan peraturan Walikota dengan wajib memperhatikan norma agama dan

budaya; (i) Mengikuti pendidikan Bahasa Arab bagi peserta didik yang beragama Islam dan Bahasa Inggris dalam rangka meningkatkan daya saing internasional; (j) Mengikuti kegiatan pesantren ramadhan dan didikan subuh dan memakai seragam muslim-muslimah, pandai baca tulis Al-Qur'an, menghafal Juz 'Amma dan Asmaul Husna bagi yang beragama Islam dan mengikuti kegiatan sejenisnya bagi peserta didik selain yang beragama Islam.

D. Menjadi Kami Bukan Kita

Islam sering digambarkan sebagai agama penebar perdamaian; rahmat dan kasih sayang Perdamaian yang menjadi dambaan umat manusia juga menjadi dambaan Islam. Perdamaian diyakini bermula dari kedamaian jiwa, ketenangan batin setiap individu yang kemudian meningkat pada kedamaian keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Lewat keagungan pribadi Nabi Muhammad SAW, rahmat Islam bukan hanya dirasakan oleh pengikut-pengikutnya, namun juga oleh orang-orang di luar Islam seperti komunitas Yahudi dan Nasrani. Kepada komunitas Kristen Arab dari Najran dalam piagam Madinah, Nabi katakan, “Suku Najran dan sekitarnya mendapat perlindungan Allah dan tanggungan Nabi Muhammad Rasulullah, atas diri mereka, agama, tanah, harta, yang hadir dan tidak hadir, rumah-rumah peribadatan dan sholat-sholat (kebaktian) mereka. Apabila di antara mereka ada yang menuntut suatu hak, maka di antara mereka berlaku keadilan tidak ada yang menzalimi ataupun dizhalimi. Tidak seorangpun di antara mereka dapat dituntut atas kesalahan pihak lain” (dalam Anis Malik Thoha, 2005). Rahmat Islam bahkan seperti dikatakan Quraish Shihab menyentuh benda-benda yang tak bernyawa, ia sampai-sampai memberi nama barang-barang miliknya dengan nama-nama yang indah dan penuh arti seakan-akan benda-benda yang tak bernyawa tersebut mempunyai kepribadian yang juga membutuhkan uluran

tangan, pemeliharaan, persahabatan, rahmat dan kasih sayang. Perisai ia namakan *Dzat al-Fudlul*, pedang dinamainya *zulfikar*, pelana dinamai *Al-Daj*, tikar dinamai *Al-Kuz*, cermin dinamai *Al-Midallah*, gelas dinamai *Al-Shadir*, dan tongkatnya dinamai *Al-Mamsyuk* (Quraish Shihab, 2008).

Ini berarti ketika Islam keluar dari ruang-ruang privat dan masuk ke ranah publik, maka ia tak lagi sekedar ajaran tauhid, akidah dan iman yang personal, subjektif, terbatas dan membatasi perilaku individu-individu muslim, namun dapat juga berarti muamalah dan akhlak yang terbuka dan untuk semua dalam lingkup kedamaian dan kasih sayang. Islam tak lagi eksklusif namun inklusif, Islam tak terbatas pada keyakinan dan kesalehan personal para pemeluknya, namun juga berarti keluwesan dan kesalehan sosial lintas terutama etnik dan agama.

Jika perspektif di atas diturunkan pada lokasi penelitian ini, juga dapat dimaknai bahwa kebijakan dan program keislaman yang dijalankan pihak sekolah seyogyanya di samping ditujukan untuk pelajar Muslim, juga dirasakan bermanfaat atau setidaknya tidak mengusik kenyamanan dan ketenangan pelajar non muslim. Pada satu sisi ia bisa saja berfungsi untuk memperkuat identitas-nilai-nilai keislaman peserta didik Muslim yang memang mayoritas di SMAN 6 dan SMKN 2. Namun pada saat yang sama penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai dan identitas pelajar non muslim jangan sampai terabaikan kendati jumlah mereka sangat kecil, minoritas. Penguatan atau persisnya internalisasi nilai-nilai keislaman terhadap pelajar muslim memang sudah menjadi program sekolah. Ini dimungkinkan karena di samping merupakan tuntutan kurikulum 2013 yang menekankan aspek spiritual sebagai salah satu kompetensi, juga tuntutan lokalitas Adat basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Dalam perkembangannya konstruks ABS-SBK pun telah bermetamorfosis dari politik identitas

ke politik teritorialisasi. ABS-SBK sebagai politik identitas dalam pengertian sebagai arah dan lokus perjuangan dari, oleh dan hanya untuk masyarakat Minang. Sementara dalam konteks politik teritorialisasi yang tampak menjadi gejala sosial di berbagai daerah di tanah air, ia merupakan strategi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi dan mengontrol suatu wilayah dan selanjutnya memberi tanda atau karakter terhadap satu wilayah sebagai wilayah kekuasaannya (AAGN Ari Dwipayana (ed), 2012). Sehingga Islam atau nuansa keislaman tak hanya identik dengan masyarakat Minang namun juga sekaligus identik dengan masyarakat Sumatera Barat. Konsekuensinya, ruang publik seperti SMAN 6 dan SMKN 2 menjadi kawasan yang harus mengidentikkan diri dengan nilai-nilai keislaman, termasuk pelajar non muslim. Jika “dima bumi dipijak di situ langit dijunjung” (di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung) menjadi spirit agar masyarakat Sumatera Barat dari etnis dan agama lain menjaga dan menghormati nilai-nilai Islam, toh sudah mereka lakukan. Misalnya mereka sudah memakai baju kurung dan rok sampai mata kaki ketika peraturan sekolah mewajibkan hal tersebut kepada seluruh pelajarnya. Hanya saja mereka keberatan jika diwajibkan pula untuk memakai jilbab karena hal tersebut sudah dimaknai sebagai busana muslim. Jika mereka memakai busana muslim seperti layaknya yang dipakai oleh pelajar muslim, maka pertanyaannya adalah apakah penyesuaian diri sampai menghilangkan batas atau mengaburkan identitas kekristenan yang inheren pada diri mereka kendati berposisi sebagai minoritas?

Kategorisasi dan logika mayoritas-minoritas mungkin menguntungkan secara politik khususnya di parlemen terkait dengan perolehan suara atau kursi dari partai atau kelompok partai tertentu. Perolehan kursi atau suara terbanyak, membuat suatu partai atau koalisinya dijuluki kelompok mayoritas di parlemen. Status mayoritas ini membuat mereka menjadi pihak yang berkuasa dan

menentukan kebijakan atau keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh parlemen. Di pihak lain, partai dengan kursi yang sedikit atau minoritas mengikuti dan menerima saja (<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menyoal-istilah-mayoritas-minoritas-dalam-agama> diakses tgl 18 oktober 2014 jam 15.00). Bahwa ini mendiskriminasi dan pengabaian terhadap hak-hak minoritas tak selamanya menjadi perhatian dunia politik, kepentingan dunia politik lebih berkisar pada perolehan kekuasaan. Lalu bagaimana dengan kehidupan beragama, akankah logika yang sama juga menguntungkan kehidupan beragama para pemeluk suatu agama? Apakah karena berposisi sebagai minoritas lantas hak-hak beragama dapat direduksi dan diperlakukan minoritas pula sebagaimana minoritasnya jumlah penganut suatu agama? Bukankah pesan perdamaian yang dibawa Islam dan dicontohkan nabi seperti uraian di atas jauh dari aura seperti itu?

Di samping tidak berdasarkan secara normatif dan dari akar historisitas Islam, perlakuan dan kebijakan yang didasarkan atas logika mayoritas-minoritas juga bermasalah secara empirik. Jika siswa muslim mayoritas dan bersekolah di daerah yang mayoritas muslim seperti di kota Padang dan menerima hak-haknya sesuai dengan kemayoritasannya, tentu saja menguntungkan secara politis dan tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana jika pada saat yang sama mereka bersekolah di sekolah-sekolah negeri di Bali atau Papua. Sangat boleh jadi mereka berposisi sebagai minoritas dan juga akan menerima hak-hak dan perlakuan sesuai dengan keminoritasan mereka yang sudah barang tentu tidak akan mereka terima seperti kasus yang menimpa Anita pelajar Muslim di SMAN 2 Denpasar Bali. Ia disuruh pindah sekolah gara-gara mengenakan busana muslimah. (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/07/mz0rp8-ippnu-berjilbab-adalah-hak-warga-negara> diakses tgl 21 maret 2015 jam 17.00). Begitu juga sebaliknya, pelajar

Kristen di SMAN 6 dan SMKN 2 karena minoritas, maka harus menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan keislaman sekolah yang mereka sendiri tidak setuju dengan hal tersebut, pada saat yang sama kalau saja mereka bersekolah di Papua, juga akan diperlakukan sebagai mayoritas dengan hak-hak mayoritasnya.

Tampaknya inilah salah satu problem agama (Islam) ketika memasuki ranah publik khususnya Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum seperti di SMAN 6 dan SMKN 2. Sehingga dari data-data di atas dan hasil riset sebelumnya (Farha Ciciek dkk 2009, LaKIP 2011 dan Hairus Salim dkk 2011) menunjukkan bahwa konsep-konsep Islam seperti rahmat Al-Alamin dan tasamuh belum benar-benar teruji di lapangan. Jika kemudian Islam berhasil masuk ke ruang-ruang publik sekolah dan seakan-akan telah menjadi penanda lain dari ciri sekolah umum, namun Islam tak cukup kuat menahan dan menutup wajah intoleransi dan diskriminasi terhadap sebagian pelajar non-muslim.

BAB III

MENJADI YANG LAIN DIPARUHI WAKTU

Telaah berikut akan menghadirkan respon pelajar muslim dan orang tua mereka serta respon pelajar Kristen dan juga orang tua mereka terhadap berbagai kebijakan keislaman yang telah diprogramkan dan dijalankan sekolah. Kebijakan keislaman tersebut tergolong unik karena dalam konteks masyarakat Sumatera Barat khususnya kota Padang yang berfilosofikan Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah merupakan kegiatan yang sudah biasa dan lazim di tengah-tengah masyarakat. Artinya kegiatan keislaman yang diprogramkan sekolah dalam batas tertentu hanya sekedar mengulang-ulang kalau tidak akan dikatakan sama dengan yang sudah dibiasakan masyarakat Minang. Di sisi lain, ia menjadi unik juga karena terjadi pada sekolah umum negeri yang kurang lazim dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, terlebih ketika kewajiban tersebut berimplikasi pula terhadap eksistensi pelajar non-muslim.

A. Memilih Menjadi Baik

“Pucuk dicinto ulam tibo, sumua dikali aia dapek”; begitulah pituah orang Minang ketika apa yang mereka impikan bertemu dalam kenyataan. Maka para orang tua pelajar muslim menyambut positif dan antusias berbagai kegiatan keagamaan yang diwajibkan sekolah pada anak-anak mereka termasuk kegiatan keagamaan yang

mesti juga diikuti sang anak di luar sekolah seperti wirid remaja atau pesantren Ramadhan. R, orang tua AFA sangat mendukung semua kegiatan keagamaan tersebut. Sebab kegiatan tersebut menurutnya dapat mengendalikan perilaku peserta didik. Sebagai orang tua, R memang mencemaskan perilaku sebagian remaja yang menyimpang dari nilai-nilai Islam seperti pergaulan anak-anak pada usia remaja yang mengarah pada pergaulan bebas dan mengunduh situs-situs porno. Ia merasa tidak memiliki cukup waktu untuk mengawasi dan mengendalikannya terlebih hal tersebut sering terjadi di luar rumah dan diluar pengawasan orang tua. Yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut hanya membentengi anak-anak dengan nilai-nilai agama. Untuk itu, selain yang sudah diprogramkan sekolah, ia bahkan masih mengikuti AFA untuk les tahfizh Al-Qur'an 3 sekali seminggu di dekat rumahnya. Di rumah ia juga sering mengingatkan AFA untuk mengulang-ulang bacaan ayat-suci Al-Qur'an sehabis sholat Magrib. Ini merupakan sebuah kebanggan baginya: "Kalau kita cuma bisa hafal 3 atau 5 ayat saja, anak sudah hafal 1 atau 2 juz". Lagi pula "kalau hafal Al-Qur'an menurutnya kan bisa pula jadi guru mengaji, bisa pula mengajari orang paling tidak dipanggil orang ke rumah (maksudnya menjadi guru privat mengaji). Juga penting untuk mencegah sang anak dari perilaku maksiat karena kalau itu dilakukan menurut keyakinannya hafalan ayat-ayatnya akan hilang. Meski mengaku kasihan melihat begitu terforsirnya energi dan waktu sang anak karena padatnya jadwal di sekolah dan kegiatan lainnya, ia terus mendorong AFA untuk menjalani semua kegiatan itu (R, Orang Tua pelajar Muslim SMAN 6 Padang, *wawancara*, 30-10-2014). "Dulu waktu saya sekolah belajar agama cuma dua jam seminggu, selain itu tidak ada lagi, pakai rok pendek sholat berjamaah terserah kita saja dan tidak ada hafalan ayat-ayat," ungkapnya memperkuat semangat AFA (R, Orang Tua Pelajar Muslim SMAN 6 Padang, *wawancara*, 30-10-2014)

Dukungan serupa juga datang dari orang tua AR, YS. Dengan berbagai kebijakan tersebut menurutnya 60 % tugas keagamaan orang tua setidaknya telah terbantu oleh sekolah. “itu istilahnya bagi kami orang tua, kalau *dak tamuék jo tapak tangan, jo niru dirantangkan.*” (YS, Orang Tua Pelajar Muslim SMAN 6 Padang, *wawancara*, 30-10-2014). Artinya sebagai orang tua, ia benar-benar terbantu dengan kegiatan tersebut, apalagi di tengah kesibukan sebagai orang tua yang semakin sulit membagi waktu antara tugasnya sebagai pendidik dengan pencari nafkah. Pengalamannya sebagai orang tua yang menurutnya juga akan dialami orang tua yang lain menunjukkan bahwa semakin sedikit waktu bagi orang tua yang tersedia untuk mendidik anaknya terlepas apakah semakin susah atau semakin sukses. Sudah barang tentu untuk itu menurutnya akan ada pengorbanan-pengorbanan baik dari pihak anak atau orang tua minimal dalam menyediakan dana. Meski sebelumnya AR sudah terbiasa juga dengan berbagai kegiatan keagamaan karena bersekolah di SD Muhammadiyah di Tanjung Karimun Riau. Di situ menurutnya, masyarakatnya sangat mencintai Islam dan perhatian mereka sangat besar pada agama. Peraturan di sekolah juga sangat keras masuk jam 07.30 pulang jam 15.00 sore dengan sejumlah kegiatan keagamaan. Jadi anaknya sudah terbiasa dengan aturan tersebut misalnya pakaian muslim (YS, Orang Tua Pelajar Muslim SMAN 6 Padang, *wawancara*, 30-10-2014). AR sendiri, di samping aktif dalam kegiatan rohis di sekolahnya, juga menurut YS aktif dalam kegiatan wirid remaja di tempat tinggalnya.

Sama seperti dukungan dari para orang tua sebelumnya, F, orang tua N pelajar Muslim SMKN 2 juga begitu. Ia juga menilai sangat baik karena akan menambah wawasan dan ilmu-ilmu agama bagi pelajar putera maupun puteri. Ia memberikan dukungan penuh pada pihak sekolah yang sudah berusaha memprogramkan dan melaksanakan berbagai kegiatan keislaman. Ini menurutnya

karena selama ini akses untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan keagamaan di sekolah umum negeri memang terbatas. Juga karena sekolah umum seperti SMKN tidak ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi ahli ilmu agama. Sehingga dengan demikian mereka harus dibekali dengan pengetahuan keagamaan yang dalam dan luas. Hanya saja sama seperti orang tua AFA dan orang tua AR, F juga tak menampik kalau berbagai kegiatan di sekolah termasuk kegiatan keagamaan melelahkan, memorsir tenaga dan waktu. Namun hal itu harus dilakukan meski harus ada yang dikorbankan karena anak-anak ini masih pada usia remaja, pada taraf belajar. Kapan lagi waktunya kalau bukan saat usia masih muda, jangan sampai ketinggal kereta, ungkapnya dengan tegas (F, Orang Tua Pelajar Muslim SMKN 2 Padang, *wawancara*, 27-10-2014).

Bagaimana dengan kebijakan sekolah yang melibatkan bahkan mewajibkan juga pelajar non muslim terhadap berbagai kegiatan keagamaan di sekolah termasuk memakai jilbab? Orang tua AFA, R tidak banyak berkomentar tentang masalah ini, ia menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut pada pihak sekolah. Tanpa merinci dalam bentuk apa, ia sepakat kalau yang non muslim juga harus menyesuaikan diri dengan kegiatan sekolah mereka (R, Orang Tua Pelajar Muslim SMAN 6 Padang, *wawancara*, 30-10-2014). Namun berbeda dengan R, YS punya pemikiran tersendiri tentang masalah ini. Menurutnya, hal itu tidak masalah, apalagi dari sisi pihak sekolah tentu tidak mungkin pula untuk membedakan-bedakan pelajarnya. Lebih jauh di satu sisi menurutnya negara ini secara tidak langsung sudah mengakui Islam sebagai agama negara karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada sisi lain kalau kita kembali pada tujuan berpakaian di samping menutup aurat juga untuk menahan pandangan negatif lawan jenisnya, maka dari sudut ini menurut YS yang sempat kuliah di Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang, dakwah Islam sudah sampai, kendati mereka

tidak tertarik untuk masuk Islam (YS, Orang Tua Pelajar Muslim SMAN 6 Padang, *wawancara*, 30-10-2014) Sementara itu, F melihat masih ada celah untuk menegosiasikan antara pihak sekolah dengan pelajar non muslim tersebut. Hanya ia mengarisbawahi jangan sampai keberatan mereka terhadap kebijakan keagamaan tersebut sampai menghambat jalannya kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah diprogramkan sekolah. Kalau itu yang terjadi, “Silahkan saja keluar, kan mereka masih memiliki yayasan seperti SMA Don Bosco yang boleh dikatakan nol persen kegiatan keagamaannya” ungkapnya mengalas keberatan tersebut (F, Orang Tua Pelajar Muslim SMKN 2 Padang, *wawancara*, 27-10-2014). Klaim tersebut tidak sepenuhnya benar karena di SMA Don Bosco, seluruh pelajar termasuk pelajar muslim masih mendapatkan pelajaran agama dari guru agama yang bersangkutan sekali seminggu. Juga masih memperoleh siraman rohani ketika peringatan hari-hari besar keagamaan. Hanya saja memang tidak terdapat lembaga seperti Rohis untuk memperdalam wawasan keagamaan pelajar atau pilihan-pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa keagamaan. (Andri Ashadi dkk, 2013).

B. Beda Waktu Berlainan Gaya

Kendati disuguhi berbagai program dan kegiatan keislaman yang cukup padat di lingkungan sekolah dan bagi yang concern dengan kegiatan keislaman masih mencari dan menambah lagi di luar sekolah, itu pun di luar kegiatan mingguan berupa wirid remaja dan kegiatan tahunan Pesantren Ramadhan yang juga diwajibkan, baik pelajar muslim SMAN 6 maupun pelajar muslim SMKN 2 memandang positif berbagai kebijakan keagamaan tersebut.



Gambar 1: FGD dengan sejumlah pelajar Muslim SMAN 6
(sumber: dokumen tim peneliti)

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan penelitian ini dinilai banyak memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban berbusana muslim-muslimah misalnya bagi AFA pelajar SMA Negeri 6 tidak hanya sekedar identitas dalam pengertian sebagai penanda dan pembeda dirinya dari yang lain, namun juga berfungsi sebagai proteksi diri. Dengan berbusana muslimah, ungkapnya, orang akan mengenal kita sebagai muslim dan lebih memandang kita sebagai orang baik-baik karena menutup aurat serta terlindungi dari perbuatan maksiat (FGD dengan sejumlah pelajar muslim SMAN 6, 24-10-2014) Ini berarti busana muslimah bagi AFA berfungsi ganda pada satu sisi sebagai identitas, di sisi lain telah menjelma sebagai proteksi diri. Panggilan akrab KI rekan satu sekolah dengan AFA menambahkan bahwa pakai jilbab juga bisa kelihatan lebih cantik, bahkan lebih PD (percaya diri) ketika tampil mengenakan hijab modern, (maksudnya seperti *hijabers community*). Jadi dapat juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman

(FGD dengan sejumlah pelajar muslim SMAN 6, 24-10-2014). Cara pandang KI tampak telah memberikan nuansa baru terhadap busana muslimah dengan menambah satu fungsi lagi yaitu sebagai *syle/ gaya hidup* yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan dinamika zaman. Dengan demikian, busana muslimah tidak selalu mengkonotasikan citra diri rendah, kuno, dan using. Hanya saja AR, aktivis Rohis yang sudah sejak kelas 1 SD (Muhammadiyah) mengenakan busana muslimah merasa terusik dan tidak setuju kalau jilbab dijadikan sebagai *trend* atau gaya-gayaan. “Model boleh beda, namun jilbabnya segi tiga.” Maksudnya memakai tutup kepala dengan mudhawarah yang profil wajahnya tampak segitiga, bukan seperti jilbab yang tampak lebih modis dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam tata tertib pelajar memang tidak termuat ketentuan ini sehingga tentu tidak mengherankan pula bila di antara pelajar puterinya terdapat ketidakseragaman dalam pemakaian tutup kepala; ada yang memakai mudhawarah dan ada pula yang mengenakan jilbab. Di antara ketentuan dalam berpakaian hanya diingatkan, “Rapi, pantas, tidak terlalu ketat dan memakai kaos dalam/singlet” dan khusus pelajar puteri: “Memakai rok panjang sampai mata kaki, pakaian dalam tidak kontras, dan model rok sesuai ketentuan pada gambar pakaian yang telah ditentukan; tidak memakai rok di bawah pinggul.”⁸⁵

Hampir sama dengan pelajar muslimah SMAN 6, N, OS, N dan Sf, pelajar muslimah SMKN 2 juga mengakui banyaknya manfaat berbusana muslimah. Selain karena merupakan anjuran agama, mereka menyadari kalau pakaian muslimah adalah salah satu cara untuk menghindar dari perbuatan maksiat. Sama dengan pendapat siswa muslim SMAN 6, ini juga menandakan kalau jilbab atau busana muslimah telah berfungsi sebagai proteksi diri. Dari sisi sipemakainya sendiri, ia menjadi rem/perisai agar bersikap hati-hati ketika mau atau bersentuhan dengan perilaku yang bertentangan

dengan ajaran agama, sementara di sisi luar dianggap dapat menahan niat buruk seseorang untuk melakukan kejahatan kepadanya (FGD dengan sejumlah pelajar muslim SMKN 2, 27-09-2014) Selain itu, sama dengan pelajar muslimah SMAN 6, berbusana muslimah tak selalu identik dengan pelajar pondok pesantren atau MAN. Busana tersebut sudah umum, *trend* dan sudah banyak dipakai orang (FGD dengan sejumlah pelajar Muslim SMKN 2 Padang, 17-09-2014). Tampak dalam konteks busana muslim-muslimah tak lagi mereka pahami secara dikhotomis antara pelajar sekolah keagamaan dengan sekolah umum. Hanya saja untuk ketentuan model penutup kepala termasuk model baju memang tertulis langsung dalam tata tertib sekolah (SMKN 2), "...Baju kurung bagi yang perempuan sesuai model yang ditetapkan dengan mudhawarah segi tiga tutup kepala tanpa rendo atau polos."

Bagaimana dengan pelajar muslim putera? Meski setuju dengan busana muslim, baik pelajar Muslim SMAN 6 maupun pelajar Muslim SMKN 2 tak banyak berkomentar tentang masalah ini. Dalam tata tertib sekolah pun aturan untuk mereka tidak seketat ketentuan pakaian pelajar puteri. Dalam ketentuan berpakaian hanya disebutkan, "Celana panjang, tidak ketat atau mengecil ke bawah (minimal 20 CM)" dan khusus hari Jumat memakai baju koko dan dianjurkan memakai kopiah nasional". H dan AP pelajar Muslim SMKN 2 tidak terlalu membeda-bedakan antara apa yang disebut pakaian muslim dengan pakaian biasa. Ke mesjid menurut mereka tidak mesti pakai baju koko, yang penting sopan. Terkadang ke mesjid mereka hanya memakai baju kaus dan celana levis (AP dan HQ, pelajar muslim SMKN 2, *wawancara*, 27-10-2014) H menambahkan bahwa ukuran sholeh atau baiknya seseorang bukan terletak pada pakaiannya, namun pada akhlak dan budi pekerti. Juga menurut AP, kita nanti bekerja belum tentu pada perusahaan atau tempat yang leluasa untuk menggunakan simbol-

simbol keislaman (AP, pelajar Muslim SMKN 2, *wawancara*, 27-10-2014) Ini menunjukkan rasionalitas siswa muslim putra dalam memaknai busana muslim. Mereka tidak terjebak pada polarisasi yang bersifat simbolis antara apa yang dimaknai sebagai pakaian muslim dengan pakaian yang bukan muslim. Mereka justru menempatkan kemusliman dalam konteks berpakaian pada akhlak dan keluhuran budi pekerti sehingga untuk ke mesjid sekalipun tidak mesti mengenakan baju koko; yang penting pakaian tersebut merepresentasikan nilai-nilai kesopanan kendati mengenakan baju kaus dan celana levis. Rasionalitas dalam memahami busana muslim juga mereka hubungkan dengan lingkungan atau perusahaan tempat mereka bekerja nanti yang belum tentu ramah dengan nilai-nilai atau simbol Islam. Jika busana muslim dipahami dan dimaknai secara kaku yang pada gilirannya dipakai secara kaku pula sebagaimana kakunya pemahaman dan pemaknaannya tentu akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi yang bersangkutan dalam relasinya dengan perusahaan yang tidak *care* dengan hal tersebut. Sekurang-kurangnya tidak memberikan kenyamanan pada diri yang bersangkutan, juga bagi perusahaan itu sendiri.

Membaca Al-Qur'an sebelum jam pelajaran dimulai bagi mereka juga penting karena dianggap dapat membukakan hati; hati tenang pikiran tenang. Membaca Al-Qur'an secara normatif memang anjuran ajaran Islam dan berpahala. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tiap -tiap orang yang membaca Al-Qur'an dalam sholat, akan mendapatkan pahala 50 kebaikan untuk tiap-tiap huruf yang dibacanya. Diluar waktu sholat dengan berwudhuk, mendapatkan 25 pahala kebaikan dan diluar waktu sholat dan tidak sedang berwudhuk masih memperoleh pahala 10 kebaikan untuk tiap-tiap huruf yang dibaca. (T.M. hasbi Ashshiddiqi dkk, 1989). Untuk itu, mereka dibiasakan membaca Al-Qur'an menjelang jam pelajar dimulai yang diawali sebelumnya dengan berdoa bersama.

Mereka juga berlatih membaca kitab suci tersebut saat kegiatan ekstra kurikuler pada hari Sabtu yang dibimbing oleh seorang mentor. Di SMKN 2 pelajar tersebut dikelompokkan dalam dua kategori; satu kelompok yang bacaan tajwidnya masih dianggap kurang masuk ke dalam kelompok TPA, sementara yang sudah bagus masuk ke tingkat selanjutnya, TPSA. Untuk kelompok TPA kebanyakan dilatih oleh senior, kakak kelas atau guru-guru agama Islam, sementara untuk TPSA didatangkan dari luar (Y, Guru Pendidikan Agama Islam SMKN 2 Padang, *wawancara*, 17-09-2014). Walau dalam kenyataannya tidak banyak juga yang membiasakan membaca Al-Qur'an di rumah atau selain di sekolah, kecuali beberapa orang yang aktif dalam kegiatan rohis. Amanda misalnya mengaku selain membiasakan mengaji habis sholat Magrib, juga masih mengikuti kursus tahfizh Al-Qur'an 3 sekali seminggu dekat rumahnya meski belakangan karena kesibukan sekolah, ia mulai jarang mengikuti (AFA, Pelajar Islam SMAN 6, *wawancara*, 09-10-2014).

Selain itu, meski terkendala oleh keterbatasan tempat di mana antara jumlah pelajar dengan ketersediaan ruang ibadah tidak sebanding, baik pelajar muslim SMAN 6 maupun pelajar muslim SMKN2 telah membiasakan sholat berjamaah rutin setiap hari pada mushala atau mesjid sekolah. Di SMAN 6, secara eksplisit dijelaskan bahwa sholat berjamaah diwajibkan pada saat Zuhur dan Ashar. Sementara di SMKN 2 kendati kewajiban berlaku sama namun ketentuannya tidak tertulis dalam tata tertib siswa. Sebelum sholat berjamaah dimulai, terlebih dahulu diawali oleh kultum sekitar 5-7 menit. Kedua kegiatan ini bagi AP (pelajar muslim SMKN 2) menjadi penting. Sholat berjamaah dirasakan dapat menambah kedekatan diri dengan Allah. Juga sekaligus untuk menjaga keseimbangan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan keagamaan dan keseimbangan antara pengetahuan keagamaan yang bersifat teoritis dengan yang praktis. Kalau sebelumnya (sebelum

diwajibkan sholat berjamaah dan kultum) belajar agama hanya lebih banyak di lokal, sekarang dengan adanya berbagai praktek keagamaan di atas, nilai-nilai agama menjadi lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari (AP, pelajar Muslim SMKN 2, *wawancara*, 27-10-2014). Sama dengan AP, H rekan satu lokal menambahkan selain untuk meningkatkan ketaqwaan, juga dapat menjaga diri dari pengaruh negatif dunia global yang tidak terkendali (HQ, pelajar Muslim SMKN 2, *wawancara*, 27-10-2014)

Lalu bagaimana dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam? lebih spesifik lagi apakah materi-materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam selain membahas materi-materi keislaman secara umum, juga membicarakan isu toleransi? Sebagian merasa tidak pernah mendapatkan materi tersebut, sebagian lagi menyebut diajarkan secara terbatas dan bersifat umum misalnya toleransi hanya berlaku dalam bidang muamalah dan hal yang sama tidak boleh terjadi jika menyangkut persoalan akidah. Dalam RPP kelas XII SMAN 6 misalnya memuat tema toleransi. Hanya saja penekanannya lebih pada penguasaan ayat-ayat toleransi (Surat Al-Kafirun, Surat Yunus ayat 40-41 dan Surat Al-Kahfi ayat 29). Dalam standar kompetensi disebutkan “memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang anjuran bertoleransi” namun dari 6 indikator kompetensi yang dimunculkan, hanya satu yang menyebutkan “mampu mempraktekan perilaku bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan QS Al-Kafirun, Yunus ayat 40-41 dan Al-Kahfi ayat 29.” Selebihnya memuat indikator “mampu membaca...”, “mampu mengidentifikasi tajwid...”, “mampu menyebutkan arti kata...”, “mampu menyimpulkan isi kandungan...”²⁸ Padahal jika terdapat keseimbangan antara sikap spiritual dengan sikap sosial seperti anjuran kurikulum 2013 yang sudah diberlakukan tersebut, tentu akan terdapat pula keseimbangan sikap spiritual dengan sikap sosial dalam konteks materi toleransi. Misalnya untuk sikap spiritual

seperti yang sudah disebutkan di atas. Sementara untuk sikap sosial yang menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia dengan memperbanyak contoh-contoh nyata perilaku hidup bertoleransi apakah dari khazanah Islam atau khazanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ini juga terlihat misalnya pada kegiatan inti dalam kegiatan pembelajaran. Dari 7 sesi kegiatan eksplorasi yang disiapkan hanya 1 yang menyebutkan siswa berdiskusi tentang perilaku yang bisa dikembangkan pada Q.S. Al-Kafirun. Begitu juga dengan kegiatan elaborasi. Dari 6 item yang disiapkan hanya 1 pula yang menyebutkan siswa merumuskan perilaku yang bisa dikembangkan dalam QS Al-Kafirun. Padahal toleransi tentu tidak sekedar konsep, ia lebih merupakan sikap dalam relasinya dengan orang atau kelompok yang berbeda terutama berbeda agama. Jika konsep tersebut dipahami sebagaimana ia berasal, dari kata *tolerantia* (bahasa latin) yang memiliki arti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran (Erna Tigayanti, *Republika*, 23 November 2011), mungkin AR aktivis Rohis SMAN 6 tidak akan begitu lantang dan tegas menyebut haram mengucapkan selamat natal karena menurutnya kalau kita mengucapkan berarti kita mengakui kebenaran peristiwa natal tersebut.”(AR, pelajar muslim SMAN 6, *wawancara*, 24-10-2014). Masalahnya di samping teman-teman Kristennya merayakan hari besar agama mereka seperti natal tidak di ruang sekolah karena pada saat lain, Idul Fitri dan Idul Adha, pelajar Kristen pernah mengucapkan selamat atau salam lebaran pula, bahkan datang bertamu ke rumah mereka. Yang diajarkan seingat mereka cuma masalah-masalah keislaman umum saja. Misalnya iman pada kitab suci; yang menjelaskan fungsi kitab suci, muatannya, dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, rukun Islam, rukun iman

dan lain-lain. (Hasil FGD dengan sejumlah pelajar muslim SMAN 6, 20-10-2014 dan sejumlah pelajar muslim SMKN 2, 27-10-2014).

Uraian tentang respon positif pelajar muslim terhadap berbagai program keislaman sekolah di atas, tampak tidak menutup ruang terhadap munculnya pertanyaan berikut: apakah mereka konsisten dan serius menjalankan program keislaman baik di sekolah maupun di luar jam dan waktu sekolah? Apakah sesuatu yang dipandang positif, menjadi positif pula dalam aplikasi dan penerapannya? Pertanyaan ini penting, karena pada satu sisi program keislaman yang diwajibkan sekolah tentu saja sesuatu yang baru bagi siswa sekolah umum negeri kendati dalam kedudukannya sebagai bahagian dari masyarakat Minang-muslim menjadi sesuatu yang biasa saja. Di sisi lain, ketika peneliti menanyakan misalnya apakah selain ke sekolah mereka masih konsisten mengenakan busana muslimah? Sebagian pelajar ini tampak “pasang kuda-kuda dan berfikir untuk menjawab” terutama pelajar muslimah SMKN 2. Entah karena alasan ini mereka tampak enggan ketika peneliti meminta kesediaan untuk mewawancarai orang tua mereka. ORS misalnya mengaku belum bisa konsisten mengenakan busana muslimah selain untuk ke sekolah karena merasa masih labil, belum matang untuk itu. “Ya bagaimana mau kerasan, kalau mulut, mata dan telinga belum Islami.” (FGD dengan sejumlah pelajar Muslim SMKN 2 Padang, 17-09-2014) Lalu kapan bisa konsisten? Pelajar kelas XII ini memperkirakan ketika sudah kuliah nanti. NS juga begitu. Pencinta folly ball putri ini merasa tidak nyaman kalau mengenakan busana muslimah dalam bermain folly. Juga menurutnya tidak lazim dalam olah raga seperti itu orang memakai busana muslimah (FGD dengan sejumlah pelajar Muslim SMKN 2 Padang, 17-09-2014). Dengan malu-malu Nadyia mengakui ketika ke luar rumah atau ke pasar tidak mengenakan jilbab, meski tetap berpakaian sopan (FGD dengan sejumlah pelajar Muslim SMKN 2 Padang, 17-09-2014). Bahkan

AR (pelajar SMAN 6) yang tampak bersemangat dan strick (kaku) dalam menentukan bentuk dan model jilbab atau mudhawarah, di luar rumah juga tak selalu dapat menjaga konsistensi tersebut. Ketika peneliti menanyakan kepada orang tuanya apakah selain ke sekolah AR tetap konsisten memakai busana muslimah, justru orang tuanya menjawab dengan setengah bertanya, “Anak IAIN saja keluar rumah banyak yang tidak berjilbab.” (YS, Orang Tua Pelajar Muslim SMAN 6 Padang, *wawancara*, 30-10-2014) Jawaban ini seakan membenarkan bahwa anaknya tak selalu konsisten memakai busana tersebut. Orang tua Amanda (pelajar SMAN 6) juga mengakui kadang-kadang anaknya juga tidak mengenakan jilbab keluar rumah (R, Orang Tua Pelajar Muslim SMAN 6 Padang, *wawancara*, 30-10-2014).

Terhadap kondisi di atas, A, Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 6 menyebutkan “selaku guru agama saya katakan kalian minimal sudah selamat dari dosa selama 7 jam dengan berbusana muslim-muslimah di sekolah. Tapi setelah itu jika kalian buka kembali aurat maka kalian berdosa lagi. Bahkan untuk pergi jalan-jalan pun ungkap A selalu ia ingatkan untuk berpakaian muslimah. Masalah pengamalan agama seperti dikatakannya tergantung pada pemahaman yang bersangkutan dan juga didukung oleh lingkungan keluarga terutama. Mungkin sebagian ada yang menganggapnya hanya sekedar rutinitas atau sebatas budaya/tradisi saja; ingin mendapatkan nilai KI-I saja (kompetensi spiritual). Meski sebagian yang sudah komitmen dan konsisten sudah memberikan pengaruh yang cukup bagus. Mereka yang biasanya brutal sudah mulai agak tenang (A, Guru Agama Islam SMAN 6, *wawancara*, 18-09-2014).

Begitu juga dengan kegiatan tadarus Al-Qur’an selama 5-10 menjelang jam pelajaran dimulai. Mereka juga kurang dapat menjaga ketenangan saat membaca ayat-ayat suci tersebut. Alih-alih membaca secara bergiliran, mereka membaca secara bersama-sama saja tiga

sampai 4 ayat. “Kalau secara bergantian menurut N, salah seorang Guru Agama Islam SMAN 6, maka di saat yang satu membaca yang lain akan meribut” (N, Guru Pendidikan Agama Islam senior SMAN 6 Padang, *wawancara*, 21-10-2014). Dalam kegiatan kultum dan sholat berjamaah pun tampak sebagian sudah menjadi semacam kegiatan rutin saja bagi anak-anak ini. Waktu pelaksanaan kultum Jum’at pagi tanggal 20 Oktober 2014 berulang-ulang guru mengumumkan untuk segera berbaris dan merapikan barisan di halaman sekolah, sebagian anak-anak tampak santai-santai saja. Saat pelaksanaan acara juga terlihat sebagian masih ada yang bergelut dan berkelakar termasuk ketidakseriusan pelaksana kultum sehingga harus diulang oleh kelas yang bersangkutan pada minggu selanjutnya. Demikian juga dalam pelaksanaan sholat berjamaah tampak sebagian pelajar belum dapat menjaga ketenangan kendati sudah berada dalam mesjid atau ruangan sekolah yang sudah dijadikan mesjid. Mereka tampak belum terlalu membedakan antara suasana di luar ketika berada di kelas dengan di mesjid; masih bercanda, berkelakar dan meribut menjelang sholat dilakukan. N, Guru pendidikan Agama Islam SMAN 6 memang sudah mengeluhkan masalah ini, “Mungkin di rumah orang tua tidak membiasakan sholat berjamaah. Ketika di sekolah menjadi kewajiban, banyak yang tidak kerasan dan meribut. disuruh azan saja banyak yang tidak mau, termasuk juga untuk pelaksana kultum menjelang sholat berjamaah.” (N, Guru SMAN 6, *wawancara*, 20-10-2014).

Ternyata sesuatu yang dipandang baik dan dinilai positif tak serta merta menjadi perilaku keseharian. Ada jarak antara apa yang dipersepsi dan disikapi dengan apa yang dilakukan. Pertanyaannya tentu mengapa terjadi gap seperti itu? Bukankah tanpa ragu-ragu semua mereka mengatakan dengan berbagai alasan bahwa memakai busana muslim memiliki banyak manfaat, lalu mengapa ketika hendak memakai mereka menjadi setengah hati? Bukankah pula

sholat berjamaah dan kultum juga mereka nilai banyak manfaatnya, namun mengapa sebagian tampak tidak begitu serius mengikuti ketika kegiatan tersebut dilaksanakan? Bagaimana kita dapat memahami keterkaitan antara sikap dan perilaku dalam konteks sikap dan perilaku pelajar muslim di atas?

Dari berbagai riset setidaknya dihasilkan tiga postulat menyangkut hubungan antara sikap dan perilaku. *Pertama* apa yang disebut sebagai postulat konsistensi yang mengasumsikan adanya hubungan langsung antara sikap dan perilaku. Postulat ini mendasarkan diri pada pola perilaku individu yang bersikap ekstrim cenderung berperilaku yang didominasi oleh keekstriman sikapnya itu. Sementara mereka yang sikapnya lebih moderat akan berperilaku yang didominasi oleh faktor-faktor lain (Alex Sobur, 2010). Jika sikap ekstrim misalnya terlihat dari pada cara pandang yang kaku dan ekstrim, tampak menjadi tidak relevan untuk kasus AR. Kendati untuk model dan bentuk jilbab saja harus segi tiga katanya, namun di luar jam sekolah ia terkadang juga tidak memakai jilbab. Hanya tampak relevan untuk memotret hubungan antara sikap dan perilaku sebagian besar pelajar putri SMKN 2 yang menjadi informan penelitian ini. Mereka memang menganggap berbusana muslim banyak manfaatnya, namun terdapat situasi tertentu yang tidak memungkinkan mereka untuk tidak mengenakan busana tersebut secara leluasa. Misalnya N yang memiliki hobby bermain folly ball atau O yang belum merasa matang untuk memakainya. Ini semakin relevan jika dikaitkan dengan postulat *kedua* yaitu postulat variasi independen. Postulat ini mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa antara sikap dan perilaku berhubungan secara konsisten. Sikap dan perilaku merupakan dua dimensi dalam diri individu yang berdiri sendiri, terpisah dan berbeda. Mengetahui sikap tidak berarti dapat memprediksi perilaku. Perilaku menurut postulat ini ditentukan oleh banyak faktor selain sikap, dan faktor-

faktor lain itu mempengaruhi konsistensi sikap-perilaku. Salah satu faktor yang jelas itu adalah tingkat kendala dalam situasi seperti dalam kasus N penggemar fally ball puteri. Ia memang mengakui busana muslimah dengan jilbabnya banyak memberikan manfaat bagi kaum hawa. Namun memakai busana itu dalam berolah raga voli, di samping tidak nyaman dan leluasa, juga tidak lazim dalam olah raga seperti itu. Juga O yang belum dapat mengkonsistenkan antara gambaran Islami antara pakaian yang dipakainya dengan tutur kata dan penglihatannya. Oleh sebab itu menurut postulat ini seringkali orang harus bertindak dalam cara yang tidak konsisten dengan apa yang dirasakan dan diyakininya (ibid).

Akhirnya postulat yang agak dapat diterima adalah postulat konsistensi tergantung (*ketiga*). Postulat ini menyatakan bahwa hubungan sikap dan perilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional tertentu. Faktor dimaksud misalnya norma-norma, peranan, keanggotaan kelompok, kebudayaan dan sebagainya merupakan kondisi ketergantungan yang dapat mengubah hubungan sikap dan perilaku. Sikap ekstrim AR dalam soal bentuk dan model jilbab tak serta merta tampak dalam perilakunya yang ekstrim dan konsisten juga dalam berbusana muslim. Sebaliknya memang ketidakkonsistenan N dan O dalam berbusana muslim dikarenakan ada faktor-faktor yang tidak memungkinkannya untuk konsisten dengan pakaian tersebut. Ini bukan berarti bagi mereka memakai busana muslim itu tidak perlu atau kurang bermanfaat kendati dalam persepsi dan sikap terhadap model dan bentuk jilbab tidak seekstrim AR; boleh berjilbab atau memakai mudhawarah segitiga. Padahal di sekolah mereka tertera aturan harus memakai mudhawarah segi tiga tanpa renda dan polos. Oleh sebab itu sejauhmana prediksi perilaku dapat disandarkan pada sikap, akan berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu situasi ke situasi yang lain (ibid).

Pertanyaan berikut yang perlu dijawab dalam konteks sub bab di atas adalah mengapa ketidakkonsistenan dan ketidakseriusan pelajar muslim SMAN 6 dan SMKN 2 dalam melaksanakan berbagai program keislaman di atas, masih melahirkan pandangan-pandangan yang positif terhadap kegiatan tersebut? Atau sebaliknya mengapa perilaku tidak konsisten dan tidak serius tidak berawal dari pandangan-pandangan negatif-kritis? Bukankah ketidakkonsistenan dan ketidakseriusan simetris dengan pandangan-pandangan negatif-kritis? Namun mengapa pandangan-pandangan negatif tersebut tidak muncul kendati indikasinya seperti contoh-contoh di atas cukup tersedia? Juga dari kalangan orang tua mereka? Kendati sudah terungkap kalau penambahan kegiatan keislaman tersebut terasa melelahkan sang anak dan menambah biaya, namun tidak ada di antara mereka yang sampai mengkritisi maksud dan tujuan program tersebut. Apalagi untuk sekolah umum negeri yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum juga, termasuk dalam konteks masyarakat muslim Minang yang sudah biasa dan seharusnya, tanpa di sekolah sekalipun, menjalankan kegiatan tersebut.

Mungkin kerangka teoritis framing ala Gerry van Klinken cukup membantu dalam memahami masalah di atas. Framing dipakai Gerry untuk menganalisis kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia khususnya antar etnis Dayak dan etnis Madura di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Analisis framing berkaitan dengan bagaimana para organisator gerakan berusaha memberikan arti pada kejadian-kejadian kontemporer dengan jalan membangun seperangkat kepercayaan umum inti. Mereka memfigurasi masalah kontemporer sedemikian rupa sehingga masalah tersebut bergaung bagi pendengarnya; melukiskan situasinya sebagai masalah dan menyodorkan sebuah solusi. Kepercayaan tersebut bersifat mengakar yang ia sebut sejenis kenang-kenangan rakyat; produk sejarah yang

dapat merasuk ke dalam kesadaran orang-orang biasa sekalipun. Hanya saja di tangan para organisator ia diberi muatan politis meski hanya segelintir orang yang menyadari hal itu. Kepercayaan umum-inti ini yang disebutnya juga sebagai “ideology inherent” dalam konteks masyarakat Dayak meliputi gagasan bahwa mereka adalah kelompok yang homogen, memiliki hak-hak teritorial yang terbelunggu akibat pendatang-pendatang baru yang dialamatkan terutama pada etnis Madura. (Gerry van Klinken, 2007) Ini diperkuat oleh stigma yang menyatakan, “Orang-orang Dayak patuh pada adat, orang Melayu cenderung mematuhi hukum, sementara orang-orang Madura yang selalu menjadi biang/sumber kebanyakan huru hara.”(ibid). Pendengar akan merespon framing ini, jika apa yang dikatakan dan diulang-ulang tersebut menyentuh apa yang mereka yakini di titik-titik sentralnya. Alih-alih mengkritik atau menyalahkan diri karena kesulitan yang dihadapi sekarang mereka mendadak sadar bahwa masalahnya adalah tidak adanya ketidakadilan di luar sana dan mereka bisa melakukan sesuatu untuk membenahi itu; mengusir dan membunuh orang-orang Madura yang dianggap sebagai biangnya. Kerusuhan ini menurut Gerry menjadi keuntungan-keuntungan politis besar bagi elit Dayak ketika pada tahun 1998 mereka menggiring DPRD dua kabupaten agar memilih bupati-bupati Dayak atau menghadapi konsekwensi kekerasan yang lebih besar. Akhirnya elitlah yang menjadi pemenang dan rakyat menjadi pecundang. Karena beberapa bupati etnis ini kemudian ternyata korup dan tidak efisien. Terbukti kemudian orang-orang Dayak biasa juga tidak meneruskan dukungan terhadap bupati-bupati itu setelah mereka merasa betul-betul tertipu dalam pilkada 2005.

Kendati berbeda kasus, sesuatu yang menyerupai framing ini juga terjadi dalam konteks kebijakan keislaman oleh pemerintah Kota Padang yang diinstruksikan pada berbagai satuan pendidikan

termasuk SMAN 6 dan SMKN 2. Pada umumnya kebijakan tersebut dimulai dengan agitasi tentang maraknya kemaksiatan dalam masyarakat seperti togel, narkoba dan dalam berpakaian tidak lagi mencerminkan filosofi ABS-SBK, namun lebih vulgar dari penyanyi dangdut Inul Daratista. Inul Daratista sendiri menjadi fenomenal pada tahun 2004 dengan cara berpakaian yang menunjukkan lekuk-lekuk tubuh dan goyangan ngebornya (Yudhi Andoni, 2009; setahun menjelang digulirkannya Instruksi Walikota Padang Nomor 451.465/Binsos-III/2005. Dalam pengantar surat edaran tersebut juga dinyatakan:

“Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan mendapat petunjuk” (QS. At Taubah: 18). Dan “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar” (QS. Al Ankabut: 45).

Iniilah cara walikota melakukan pembingkaian dengan membenturkan perilaku-perilaku menyimpang masyarakat dengan filosofi dan jati diri mereka sebagai masyarakat Minang, ABS-SBK. Bukankah sebagai masyarakat yang mengidentikkan antara keminangan dengan keislaman , mereka harus menjauhi togel, narkoba, memakai pakaian muslimah, memakmurkan mesjid dan menunaikan zakat? Dan bukankah pula dukungan dan kebijakan yang selama ini diharapkan dari umara’ (Pemda) sudah datang? Tak pelak lagi, pembingkaian yang oleh Gerry disebut-sebut dapat merasuk pada kesadaran orang yang paling biasa sekalipun ini telah menumpulkan daya kritis untuk mencermati apa sesungguhnya maksud program ini. Bahkan seperti yang dicermati Yudhi Andoni, justru mendapatkan dukungan sepenuhnya dari semua lapisan masyarakat Minang termasuk kalangan terdidik di perguruan tinggi. Mereka nyaris tidak merasakan kalau Pemda sudah bergeser dari perannya sebagai penjamin kesejahteraan rakyat, termasuk

ketidakpedulian terhadap keberatan yang diajukan non muslim kota Padang yang terdampak secara tidak langsung dari program tersebut. Mereka juga tampak tidak peduli kalau Pemda sudah terlalu jauh berlari meninggalkan dan mengambil alih peran yang seharusnya dilokomotifi ulama (Yudhi Andoni, 2009).

Pembingkaiian yang sama juga dilakukan pihak sekolah agar instruksi walikota tersebut dapat berjalan di lingkungan sekolah mereka:

“Mohon perhatian pada siswa semua! Sebelum pembacaan ayat suci Al-Qur’an tidak ada yang bersuara. Yang akan dibacakan adalah ayat suci Al-Qur’an. Yang membacakan dan yang mendengarkan sama pahalanya.” (Peringatan salah seorang guru SMAN 6 saat acara kultum baru saja dimulai, *observasi*, 24-10-2014).

“...Labor keagamaan kita tidak hanya di mesjid, di musholla. Di lapangan pun setiap Jum’at pagi kita lakukan pembinaan. Persiapkan diri sebaik mungkin. Kalau dak bagus lagi besok ulang lagi. Yang lain, lokal lain juga siap-siap, jadi kita tidak main-main. ...kalau sudah tiba waktunya, sholat itu jangan dipanggil-panggil lagi. Untuk kelas XII, kalau anda gundah gulana hal yang terbaik itu untuk diri anda adalah sholat. Alangkah janggalnya, anda seorang muslim lalu lari ke narkoba...” (R, Pengarahan dalam acara kultum SMAN 6, *observasi*, 24-10-2014).

Kutipan di atas berasal dari observasi penulis saat pelaksanaan kegiatan kultum di SMAN 6, salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh pelajar. Penggalan kutipan pertama menggambarkan pernyataan “kesal” salah seorang guru ketika acara kultum sudah dimulai namun sebagian pelajarinya masih saja meribut sehingga acara terhenti beberapa saat. Guru tersebut kemudian mengambil alih kendali acara ketika ayat suci Al-Qur’an akan dibacakan, suara-suara ribut pelajar masih saja kedengaran, kendati sejak dari pengaturan baris sebagiannya sudah meribut juga. Tidak hanya itu, kutipan tersebut juga memperlihatkan bagaimana salah seorang guru yang disebut Gerry sebagai organisator gerakan memimpin masalah suara gaduh pelajar menjelang pembacaan ayat suci Al-Qur’an

dimulai, “sebelum pembacaan ayat suci Al-Qur’an tidak ada yang bersuara.” Kemudian ia mengucinya dengan memberikan solusi, “yang membacakan dan yang mendengarkan sama pahalanya.” Pernyataan ini tentu saja belum sepenuhnya benar karena yang membacakan tidak sama dengan yang mendengarkan. Benar bahwa keduanya sama-sama akan beroleh pahala namun menjadi tidak benar ketika dikatakan sama pahalanya karena anjuran yang paling banyak adalah membacanya. Hanya saja dalam konteks pelajar muslim SMAN, ia sudah menyentuh apa dikatakan Gerry sebagai kepercayaan umum inti yang akan merasuk ke dalam kesadaran remaja sekalipun. Bukankah Al-Qur’an bagi kaum muslim adalah pedoman dan tuntunan kehidupan? Ia merupakan bahan bacaan paling sempurna dan paling mulia sehingga mendengarkan pun dianggap bahagian dari tindakan kemuliaan tersebut.

Sementara kutipan kedua, tak kalah dari yang pertama, juga berisi kejangkelan dalam bentuk pembingkaian oleh kepala sekolah saat diminta memberikan pengarahan pada penghujung acara kultum. Kepala sekolah jengkel karena di samping masih banyak di antara pelajarnya yang terlambat dan tidak mengenakan seragam busana muslim-muslimah pada hari Jum’at di mana acara kultum diadakan, juga karena pelaksana acara dianggap tidak serius melaksanakan tugasnya. Peringatan yang sama ia berikan juga pada lokal-lokal lain yang bakal menjadi pelaksana berikutnya. Kejangkelanya semakin bertambah ketika disinyalir sebagian siswa kelas XII yang akan menamatkan studi termasuk yang masih “dipanggil-panggil juga” untuk melaksanakan sholat berjamaah di mesjid sekolah. Padahal di saat-saat akan menghadapi UAN dan penentuan nasib untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka membutuhkan ketenangan dan sholat adalah salah satu cara untuk mencapai ketenangan. Oleh sebab itu, seharusnya mereka sudah melakukan sholat dengan kesadaran sendiri, tak perlu dipanggil-panggil dan diawasi guru.

Pembingkiaan dengan menyebut bahwa “labor keagamaan tidak hanya di mesjid dan musholla” menunjukkan bahwa sekalipun kegiatan keagamaan dilaksanakan di halaman sekolah, ia harus diperlakukan seperti di mesjid atau mushalla. Jika di mesjid atau mushala, kegiatan seperti kultum atau muhadarah dapat berjalan mulus dan sempurna, maka hal yang sama juga harus dilakukan ketika di lapangan. Kegiatan keislaman semakin mendapat tempat ketika dikaitkan dengan pelajar kelas XII yang berada di ujung studi; mereka berada diambang ketidakpastian antara lulus dan tidak lulus UAN dan jika lulus belum tentu pula dapat diterima pada perguruan tinggi idaman. Dalam situasi seperti itu, kata-kata “kalau anda gundah gulana hal yang terbaik itu untuk diri anda adalah sholat” telah merasuk ke jantung kesadaran mereka yang paling dalam. Sehingga mereka hanya bisa terdiam kendati acara kultum berlangsung di bawah cahaya matahari pagi, sambil berdiri dan berlangsung dalam waktu cukup lama; capek berdiri kemudian kepala sekolah mempersilahkan mereka duduk sambil mendengar nasehat dan arahnya (hasil *observasi*, 24-10-2014).

C. Memilih Yang Bukan Pilihan

Mendapati pelajar Kristen bersekolah di sekolah-sekolah Kristen tentu saja sudah biasa. Juga biasa bila mereka bersekolah di sekolah-sekolah umum negeri karena dibiaya oleh negara dan disediakan untuk seluruh warga negara tanpa pertimbangan ikatan primordial berbasis etnik maupun agama. Akan tetapi seakan tidak biasa lagi ketika pelajar Kristen bersekolah di sekolah negeri apalagi di kota Padang saat program dan kebijakan keislaman yang dijalankan sekolah diwajibkan untuk seluruh pelajar termasuk untuk pelajar Kristen. Lalu bagaimana para orang tua mereka meresponnya?

Pada dasarnya orang tua pelajar Kristen baik di SMAN 6 maupun SMKN 2 Padang keberatan dengan berbagai kebijakan

sekolah yang mengintensifkan berbagai kegiatan keislaman yang berdampak pula terhadap putera-puteri mereka. Kendati ungkapan keberatan tersebut berbeda-beda sesuai dengan intensitas dan perbedaan pengalaman masing-masing. Y, orang tua FHP pelajar Kristen SMAN 6 menyebutkan “sebenarnya kalau menurut hati nurani ya sangat keberatan, tapi karena ini peraturan sekolah ya mau tak mau harus diikuti” (Y, orang tua pelajar Kristen SMAN 6 Padang, *wawancara*, 27-10-2014). Yang paling memberatkannya adalah ketika anaknya diwajibkan pula mengenakan pakaian muslimah (jilbab atau mudhawarah) karena ini adalah pakaian khas orang Islam dan tidak biasa untuk seorang Kristen. Dalam konteks ini seperti dikatakan WS, wakil Katolik dalam kepengurusan FKUB Sumatera Barat, pakaian seragam sekolah menjadi keresahan di kalangan umat Kristiani Kota Padang karena pendekatannya yang bersifat ideologis-keagamaan; instruksi atau peraturan sekolah tentang pakaian seragam khusus hari Jum’at menyebutkan secara jelas harus memakai “busana muslim-muslimah.” Ia membandingkan untuk kasus yang sama dengan pemerintah daerah Riau yang juga mengharuskan semua pelajar di sekolah negeri untuk berbusana serupa pada hari Jum’at namun tidak disebut sebagai busana muslim-muslimah melainkan pakaian melayu sehingga tidak menimbulkan keresahan atau gejala. Di samping itu, menurutnya dalam agama Kristen memang tidak terdapat ketentuan teknis dalam soal bentuk dan model pakaian, namun menjadi tidak tepat atau pantas jika busana yang sudah dimaknai sebagai pakaian muslim-muslimah tersebut dipakai pula oleh umat Kristiani (WS, Tokoh Katolik pada FKUB Sumatera Barat, *wawancara*, 18-10-2014). Tampak dalam kasus di atas pendekatan kultural lebih dapat diterima dari pada pendekatan yang berbau ideologis sekalipun substansinya bersifat ideologis-keagamaan.

Bagaimana dengan kegiatan lain seperti harus mendengarkan kultum atau mendengar bacaan ayat-ayat Al-Qur’an? Ini tidak

menjadi persoalan baginya karena ia sendiri juga pernah bersekolah di sekolah negeri. Ia mengaku pernah mendengar orang membaca Al-Qur'an dan sedikit banyaknya tahu tentang ayat-ayat yang dibaca tersebut. Ia juga tidak khawatir dengan berbagai kegiatan keislaman di sekolah akan mempengaruhi anaknya termasuk kultum atau bacaan ayat-ayat Al-Qur'an karena agama menurutnya adalah persoalan iman (Y, orang tua pelajar Kristen SMAN 6 Padang, *wawancara*, 27-10-2014) dan di rumah ia juga menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anaknya. Meski berada di lingkungan mayoritas Kristen, namun anaknya juga memiliki banyak teman-teman dari pelajar muslim. Yang menjadi persoalan baginya adalah kelelahan yang dialami sang anak karena harus menjalani berbagai kegiatan di sekolah. Di luar itu, karena anaknya tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolah, ia juga harus menyiapkan waktu tambahan untuk belajar agama di gereja. Namun lagi-lagi menurutnya karena sudah merupakan peraturan sekolah maka mau tidak mau harus dilalui (Y, orang tua pelajar Kristen SMAN 6 Padang, *wawancara*, 27-10-2014).

Agak berbeda dengan Y, A orang tua Ike pelajar SMKN 2 tidak terlalu mempersoalkan kebijakan-kebijakan keagamaan di atas asal menurutnya hanya terbatas di lingkungan dan pada jam belajar di sekolah. Untuk memakai baju kurung, pakaian muslim muslimah sambil menunjuk foto pernikahannya yang menggunakan pakaian adat Minang, tidak menjadi persoalan. Sudah biasa bahkan menurutnya Bunda Maria juga memakai jilbab. Di gereja pun sebetulnya untuk pakaian sudah diingatkan untuk memakai pakaian yang sopan dan pantas termasuk juga anak-anak tidak boleh meribut, walaupun himbauan itu terkadang diabaikan oleh sebagian jemaat. Sama dengan ITW, ia dulu pernah juga bersekolah di sekolah negeri, lulusan MIN. "Saya bisa bahasa Arab dan menulis nama dalam bahasa Arab. Saya banyak tahu tentang ajaran Islam; Al-Qur'an, Hadis, tarekh Islam, akidah akhlak saya tahu semua." (A, orang tua pelajar Kristen SMKN

2, *wawancara*, 25-09-2014). Suaminya yang “ustad” (pengkubah) di gereja menurutnya juga tidak mempersoalkan berbagai kebijakan di atas. Di samping itu meski berasal dari suku nias, ia sudah lama tinggal di kota Padang, sudah generasi yang kelima. Keluarganya juga beragam; ada yang sudah menikah dengan orang Minang, muslim dan sudah naik haji, termasuk lingkungan tempat tinggal yang beragam; Nias, Minang, dan Cina.

Sama seperti Y dan A, TB, orang tua SLB juga tidak terlalu mempersoalkan kebijakan di atas. “Karena instruksi Pemko kita menghargai juga, menghargai keputusan yang sudah ditetapkan tersebut. Kan kita tidak dipaksa.” (TB, orang tua pelajar Kristen SMKN, *wawancara*, 2, 25-09-2014). TB yang sehari-hari bekerja pada sebuah bengkel sepeda motor di kota ini memang memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri karena biayanya ringan dan jarak tempuh yang dekat dari rumah ke sekolah. Ia juga tidak mempersoalkan kalau anaknya harus memakai jilbab ke sekolah karena ia tidak ingin kalau S panggilan akrab sang anak berbeda dari teman-temannya yang mayoritas muslim. Bahkan anaknya sering dibelikan jilbab oleh Ibu haji tetangga sebelah rumahnya dan membantu memasang jilbab tersebut. Anak-anak juga senang menurutnya. Hanya saja, SLB memang tidak seberuntung IW dan FHP. TB masih ingat ketika di SD, SLB dipaksa menghafal asmaul husna kemudian buku agamanya disobek-sobek gara-gara tidak bisa menuliskan pelajaran agama yang berbahasa Arab. Ketika bersekolah di SMKN 2 pengalaman serupa menurutnya terulang kembali. “Di SMK ada 2 orang guru agamanya, mengerikan, kalau gurunya menghina-hina dan menyinggung masalah agama, saya memang tidak senang dan demi anak saya diaman saja.” (TB, orang tua pelajar Kristen SMKN 2, *wawancara* 25-09-2014). Yang saya tidak habis pikir menurutnya kok guru agama bisa seperti itu. “Sudahlah anak mau pakai jilbab dan terlibat dalam berbagai kegiatan

keagamaan, dihina-hina lagi, tukasnya dengan nada meninggi. Untung SLB katanya masih memiliki banyak teman muslim yang menghiburkan dan mengingatkannya untuk bersabar. “Harusnya guru ini kan merangkul dan menyatukan semua anak, ungapnya”

TB juga tidak menyalahkan Walikota, Fauzi Bahar, yang menjadi sumber berbagai kebijakan yang muncul di sekolah-sekolah negeri karena menurutnya sang wali kota sudah baik dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Di saat pelajar muslim melakukan pesantren Ramadhan pada saat libur puasa misalnya, pelajar Kristen juga mendapatkan pastoral sekolah di gereja. Walikota di samping menyediakan anggaran untuk itu, menurutnya juga sering hadir dalam pembukaan atau saat menutup acara. Hanya saja ia menyayangkan kalau dalam pelaksanaan di lapangan dapat menimbulkan diskriminasi (TB, orang tua pelajar Kristen SMKN 2, *wawancara*, 25-09-2014)



Gambar 2: Peneliti bersama orang tua salah seorang pelajar Kristen SMKN 2 (sumber dokumen tim peneliti)

Menanggapi masalah ini S, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Padang menyayangkan hal itu. Untuk kasus jilbab ia tegaskan bahwa yang non muslim tidak harus mengenakan jilbab. Yang penting mereka berpakaian sopan dan pantas misalnya pakai baju kurung, rok di bawah lutut dan tidak mesti pakai jilbab. Ini kan sekolah negeri yang terbuka untuk semua orang dan masalah agama tidak perlu dipertajam; diatur secara kaku nanti bisa menimbulkan masalah SARA (S, Kasi Dikmen Dinas Pendidikan Kota Padang, wawancara, 30-10-2014).

D. Seidentitas Tak Seiman

Terkadang jam 04.30 WIB, N, panggilan akrab DZ sudah terbangun dari pembaringan. Ia terbangun oleh suara bacaan ayat-ayat Al-Qur'an menjelang azan dikumandangkan dari corong mesjid yang berjarak beberapa meter dari rumahnya. Apalagi saat Bulan Ramadhan hampir tiap hari ia terbangun ketika "garin-penjaga mesjid" membangunkan jamaah untuk makan sahur. Sebagai penganut Kristen tentu N tidak hendak menunaikan sholat tahajjud, bersiap-siap menunggu datangnya waktu sholat sunat fajar atau mempersiapkan segala sesuatu untuk makan sahur. Baginya ini sebagai pertanda bahwa fajar akan segera berganti pagi. N tidak tidur lagi dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah agar tidak terlambat. Dari rumah ia sudah *stand by* dengan pakaian seragam sekolah; baju kurung dengan setelan rok sampai mata kaki dan memakai mudhawarah segi tiga, persis seperti pakaian pelajar muslim di kota Padang. Selain keluarga dan tetangga di kiri kanan rumahnya, tak banyak yang menyangka kalau ia seorang pelajar puteri beragama Kristen yang terlahir dari ayah dan ibu penganut Kristen Protestan. Namun pada saat yang sama harus mengenakan pakaian seragam muslimah yang lazimnya dipakai oleh pelajar muslim lantaran bersekolah di sekolah negeri. Ia sudah biasa

memakainya, sejak SD, saat kewajiban berbusana muslim muslimah diterapkan pada semua pelajar di Kota ini. Hampir separoh hari dan waktunya dihabiskan dengan mengenakan jilbab, termasuk juga kegiatan-kegiatan keislaman lain seperti kultum setiap Jumat pagi yang juga dianjurkan sekolah kepada pelajar Kristen. Meski tidak diabsen, ia harus datang lebih cepat karena kalau terlambat ia akan dibariskan bersama teman-teman lain yang terlambat. Ia tidak tahu lagi apakah itu sebuah keterpaksaan atau kebiasaan. Yang jelas menurutnya sudah biasa saja; tidak merasa aneh juga tidak merasa terpaksa (NZ, pelajar Kristen SMKN 2, wawancara, 28-10-2014).

N tidak sendirian, bersamanya juga ada ITW, teman satu sekolahnya di SMKN 2 dan juga satu tempat tinggal dengannya di Seberang Padang Selatan. Sama-sama keturunan Nias, hanya saja ITW terlahir di Kota Padang, sudah generasi yang ke lima tutur Ibunya, A. Ia lebih beruntung dari N karena di kelas ia masih dipercaya teman-temannya yang mayoritas muslim untuk menjadi ketua kelas. bahkan sejak kelas I. Ia sering merapikan pakaian seragam sekolah yang dipakai oleh teman-teman muslimnya dan teman-temannya senang, “merekapun senang ketika dibantu merapikan mudhawarah atau jilbab mereka yang terlihat kurang rapi.” Ia juga sering dijadikan contoh oleh guru-guru di sekolahnya tentang rapinya pelajar non-muslim dalam mengenakan seragam sekolah sekalipun itu busana muslimah. Bahkan ITW turut mengingatkan teman-teman muslimnya untuk sholat dan membantu mengambilkan absensinya. Sama dengan Nia, ia juga tidak keberatan mengenakan jilbab, sudah sejak SD ia mengenakan pakaian tersebut (ITW, Pelajar Kristen SMKN 2, wawancara, 27-10-2014).

Berbeda dari N dan ITW, SM pelajar kelas XI SMAN 6 dengan gampang saja berucap “astagfirullah” ketika kaget atau terkejut terhadap sesuatu. Terkadang ungkapan seperti itu mengalir saja termasuk saat berhadapan dengan guru-gurunya. Bertemu teman-

teman muslim, ia tampak akrab, juga dengan mudah saja berujar “hai, hallo kawan, assalamu’alaikum.” Suatu kali ia bercerita, ketika teman-teman muslimnya hendak melakukan sholat berjamaah dan sedang berwudhuk, lalu gurunya bertanya.”kok kamu belum berudhuk juga SM”? Lalu teman-temannya ketawa semua, sambil mengatakan,”ia non muslim pak.” Guru tersebut tutur SM sampai heran dan kaget, tak menyangka kalau ia masih Kristen; padahal menurut perkiraan guru yang bersangkutan ia sudah muallaf. Ketika belajar Agama Islam di kelas ia serius dan mendalami walau terkadang *bleng*; bingung termasuk mendengarkan secara seksama bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Ia merasa merinding ketika mendengar bacaan-bacaan tersebut disebabkan auranya yang lain dari bacaan-bacaan lain. Hanya saja ketika ditanya perbandingannya dengan ketika mendengar ayat-ayat Injil dibacakan pendeta, dengan sederhana ia simpulkan, “kalau Injil dapat dimengerti sementara Al-Qur’an tidak” (SM, pelajar Kristen SMAN 6, wawancara, 10-11-2014).

N, ITW dan SM setidaknya merupakan potret umum pelajar Kristen yang bersekolah di SMAN 6 dan SMKN 2. Di tengah ketiadaan pilihan dan untuk dapat bersekolah pada sekolah idaman, mereka harus bernegosiasi dengan keadaan dengan cara meniru untuk seperti saudara-saudara mereka yang beragama Islam. Ibaratkan bunglon atau kupu-kupu mereka memiliki kemampuan untuk mengubah warna diri menjadi seperti warna daun atau bahagian tanaman lain pada suatu tumbuhan, sehingga sulit membedakan mereka dari lingkungannya (Nanang Martono, 2011).

Dengan demikian, meniru adalah satu-satunya cara untuk dapat dengan nyaman diterima dan menjadi bagian dari lingkungan dan struktur kemusliman ruang publik sekolah. Hanya saja “meniru” dalam pemahaman mereka bukanlah “menjadi” melainkan hanya “seperti”; serupa tapi tak sama. Di satu sisi, mereka tidak mungkin

untuk menjati-dirikan identitas kemusliman sebagaimana layaknya pelajar muslim lantaran bukan identitas agama mereka, di samping agama sendiri adalah persoalan keyakinan yang tidak menyediakan ruang bagi keragu-raguan. Namun pada saat yang sama tentu mereka tidak mungkin pula mengekspresikan pengalaman keberagaman mereka secara elegan di ruang publik yang sudah terkoptasi oleh nilai-nilai Islam sehingga untuk tetap bersekolah dan *survive* di antara teman-teman dan guru-gurunya yang mayoritas beragama Islam, jalan satu-satunya hanyalah meniru. Pada bagian lain, seorang pelajar Kristen yang berstatus sebagai siswa sekolah umum negeri di lingkungan Pemerintah Kota Padang hampir tidak mungkin keluar dari berbagai program dan kegiatan keislaman lantaran hal tersebut merupakan instruksi wali kota Padang sendiri dan di sekolah-sekolah umum negeri (termasuk SMKN 2) dijumpai dalam berbagai aturan dan tata tertib sekolah. Terlebih untuk seorang ITW yang dipercaya berturut-turut selama 2 tahun menjadi ketua kelas untuk teman-temannya yang mayoritas muslim. Keterlibatannya yang cukup jauh dalam merapikan jilbab teman-teman muslimnya, menjadi contoh untuk kerapian dalam memakai busana muslimah bahkan terlibat dalam mengambilkan absensi sholat pelajar muslim, tentu harus dibaca dalam konteks negosiasi di atas. Sebaliknya, di saat lain beberapa kali ITW tidak kunjung menyahut telepon peneliti lantaran sedang khusuk melaksanakan kebaktian agamanya. Walaupun ia tampak rapi dalam memakai jilbab dan tidak jarang menjadi contoh untuk teman-temannya yang beragama Islam, tidak berarti ia senang dan bangga dengan pakaian tersebut. Baginya, busana muslimah yang ia pakai hanyalah sekedar pakaian sekolah, toh seperti argumen ibunya, “Maria saja berjilbab.” Tindakan SM yang “nyaris” menyamai apa yang dibiasakan di kalangan muslim seperti mengucapkan “assalamu’alaikum, astagfirullah” dan tampak seriusnya dalam mempelajari materi pendidikan Agama Islam, juga harus dibaca dalam konteks konsep peniruan di atas. Dengan cara

seperti itu, sebagaimana yang diungkapkannya, ia merasa lebih dihargai sebagai minoritas Kristen di tengah saudara-saudaranya yang mayoritas beragama Islam. Ketika belajar materi pendidikan Agama Islam, ia tidak pernah di sindir-sindir atau disudutkan agamanya seperti yang dialami oleh teman-temannya yang lain. Bahkan ketika jam pelajaran Agama Islam dilaksanakan menjelang istirahat atau jam terakhir, kalau tidak ingin belajar ia sudah bisa pulang lebih awal.

Konsep mimikri Homi K Bhabha dapat memberikan bukti bahwa yang tertekan tidak selalu diam karena mereka memiliki kuasa untuk melawan. Konsep mimikri digunakan untuk menggambarkan proses peniruan atau peminjaman berbagai elemen kebudayaan. Ia tidaklah menunjukkan ketergantungan sang tertekan kepada yang menekan tetapi peniru menikmati dan bermain dengan ambivalensi yang terjadi dalam proses imitasi tersebut. Ini terjadi karena mimikri selalu mengindikasikan makna yang tidak tepat dan salah tempat; imitasi sekaligus subversi. Seperti penyamaran ia bersifat ambivalen, melanggengkan tetapi sekaligus menegaskan dominasinya (Nanang Martono, 2011).

Gayatri Chakrovorty Spivak menggunakan istilah *subaltern* untuk menunjuk pihak-pihak atau kelompok yang mengalami penindasan dari kelompok lain yang lebih berkuasa. Istilah *subaltern* sendiri pada mulanya digunakan oleh Antonio Gramsci untuk menunjuk kelompok inferior yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa. Hanya saja, Spivak kemudian memperdalam dan menjelaskan siapa kelas *subaltern* tersebut. Lewat artikel *Can the subaltern Speak*, ia menyebut bahwa petani, buruh, perempuan, kelas miskin dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan hegemonik dapat disebut sebagai kelas *subaltern* (Nanang Martono, 2011). Mereka inilah yang acapkali mengalami tekanan berlapis atas nama ras, agama, gender, etnisitas dan sebagainya.

Pelajar Kristen menjalankan syariat Islam dapat diduga menjadi sasaran dari sistem sosial yang serba menekan ini. Mereka berada di daerah yang memproduksi nilai budaya “dima bumi dipijak di situ langik dijunjung” (dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung), pada saat bersamaan sedang intensif menjalankan syariat Islam; memiliki latar belakang etnis yang berbeda dengan pada umumnya orang Minang; dan berada pada struktur sosial politik yang timpang dan tidak mendapatkan tempat untuk mengartikulasikan diri.

Sebenarnya, memakai busana muslim-muslimah terutama, mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, terlibat dalam kegiatan kultum dan masuk ke areal sholat berjamaah, termasuk juga ikut dalam pembelajaran agama Islam adalah “masalah-masalah” yang dialami oleh pelajar non-muslim yang bersekolah di SMAN 6 dan SMKN 2 Padang. Disebut masalah karena pada satu sisi kegiatan-kegiatan keislaman di atas tergolong pada apa yang disebut sebagai kegiatan ibadah atau setidaknya bernilai ibadah apalagi kegiatan sholat yang sudah tertentu cara, bentuk, isi dan tempat pelaksanaannya. Dalam konteks ini jika dirujukan dengan Surat Edaran Menteri Agama RI No. MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan, maka kegiatan-kegiatan di atas seharusnya hanya untuk pelajar muslim. Jangankan untuk kegiatan yang bernilai ibadah, untuk kegiatan seremonial keagamaan yang di dalamnya termuat unsur ibadah, maka menurut surat edaran tersebut “hanya pemeluk agama yang bersangkutan yang dapat menghadirinya” (Abdul Rahman Mas’ud dan A. Salim Ruhana, 2012).

Di sisi lain, seorang pelajar Kristen yang berstatus sebagai pelajar sekolah umum negeri di lingkungan Pemerintah Kota Padang hampir tidak mungkin keluar dari berbagai program dan kegiatan keislaman di atas lantaran hal tersebut merupakan instruksi wali kota Padang sendiri dan di sekolah-sekolah umum negeri dijumpai dalam berbagai aturan dan tata tertib sekolah. Unik aturan dan tata

tertib sekolah seperti yang sudah tergambar dalam uraian sebelumnya tidak secara jelas dan tegas mengatur posisi dan eksistensi pelajar non-muslim dalam konteks berbagai program dan kegiatan di atas misalnya yang sangat kentara dalam soal pakaian seragam sekolah.

Namun karena sudah terbiasa dan memiliki banyak pengalaman bersekolah di sekolah-sekolah negeri, akhirnya tak terlalu dipersoalkan pelajar Kristen baik di SMAN 6 maupun di SMKN 2. Terhadap kewajiban berpakaian muslimah (jilbab) misalnya hampir semua pelajar puteri Kristen menganggap biasa saja dan mereka pun hanya menganggap pakaian seragam sekolah yang tak lain adalah pakaian muslim tersebut sebatas pakaian seragam sekolah dan di sekolah itulah yang disosialisasikan dan tercantum dalam tata tertib. Jika pada hari Jum'at harus mengenakan apa yang disebut sebagai busana muslim-muslimah, lebih mereka pahami sebagai bentuk partisipasi; karena umumnya di sini (maksudnya Kota Padang) mengenakan busana itu untkan SLB, pelajar Kristen SMKN 2 Padang.

Dengan cara seperti ini mereka tampak sudah keluar dari apa yang disebut oleh Komaruddin Hidayat sebagai kebingungan teologis; keyakinan dan doktrin-doktrin yang bertahun-tahun dianggap valid oleh pengikutnya dan dirasa memberikan kenyamanan psikologis, tiba-tiba terusik dan mengalami gugatan serius (Komaruddin Hidayat, 1995). Mereka menemukan penyelesaian dengan polarisasi antara apa yang disebut sebagai “pakaian seragam sekolah” dan “pakaian di luar sekolah”. Pakaian seragam sekolah yang oleh pihak sekolah dan pelajar muslim sudah jamak dipahami sebagai “pakaian seragam muslim” atau setidaknya “pakaian seragam sekolah bernuansa Islam” dipakai saat ke sekolah. Sementara di luar jam sekolah mereka kembali memakai pakaian seperti yang mereka yakini yang sekedar untuk membedakannya dengan pakaian seragam sekolah disebut saja misalnya “pakaian di luar sekolah”.

Sebetulnya keberatan pelajar Kristen terhadap pakaian seragam muslim-muslimah lebih pada jilbabnya. “Kami mau saja memakainya, tapi beratnya di jilbab itu” kata LSS yang berasal dari SMP Kalam Kudus. Ia menganggap, jika seseorang mengenakan baju kurung dan rok sampai mata kaki plus memakai tutup kepala apakah jilbab atau mudhawarah sudah merupakan pakaian muslim (SLB dan LSS Pelajar Kristen SMKN 2, *wawancara*, 27-10-2014). Kendati jika diberi kesempatan untuk berpakaian biasa seperti rok pendek dan baju lengan pendek, ia juga tidak berkenan memakainya karena tidak ingin kelihatan aneh/beda di antara teman-teman mereka yang mayoritas beragama Islam. Memang semula orang tua protes menurut LSS karena seorang Kristen tidak boleh meniru-niru pakaian agama lain (tak terkecuali pakaian muslim-muslimah), namun karena merupakan aturan sekolah maka mau tidak mau harus diikuti. Lagi pula menurutnya, meniru ungkapan bapaknya, ini kan negara Pancasila yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Sila pertama Pancasila tersebut menurut LSS merupakan penegasan tentang kebebasan seseorang untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing (SLB, Pelajar Kristen SMKN 2, *wawancara*, 27-10-2014). ALL, pelajar Kristen SMAN 6 mengaku ketika pertama kali mengenakan jilbab merasa gerah, panas dan banyak ketombe. Memasangkannya juga harus dibantu teman dan tetangga yang beragama Islam. Ia juga masih mengingat-ingat (trauma) bagaimana rambutnya sering dijambak dan ditarik-tarik guru-gurunya kala di SD karena rambutnya sering tampak keluar melebihi jilbab sorongnya dan disuruh mengikat agar tidak tampak keluar (LL, Pelajar Kristen SMAN 6, *wawancara*, 24-10-2014). Kendati begitu, tidak semua pelajar puteri Kristen merasa keberatan memakai busana muslimah, sebut saja ITW misalnya. Ia menganggap biasa saja pakaian busana muslimah yang dikenakannya setiap hari ke sekolah termasuk harus mengenakan jilbab atau mudhawarah. Ia tampak selalu rapi dalam mengenakan

busana tersebut, bahkan terlibat dalam merapikan busana muslimah yang belum rapi dipakai oleh teman-teman muslimahnya. Bahkan pelajar yang menjadi ketua kelas di lokal mayoritas muslim ini tidak jarang dijadikan contoh oleh guru-guru di sekolah tentang rapinya seorang non-muslim dalam memakai pakaian muslimah (ITW, Pelajar Kristen SMKN 2, wawancara, 27-10-2014).

Mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibaca sebagian mengaku biasa saja. Intan misalnya sering mendengar mamanya membaca Al-Qur'an di rumah kendati ia sendiri mengikuti agama sang ayah, Katolik (IDF D.J. Pelajar Kristen SMAN 6, wawancara, 24-10-2014). Sebagian lagi mengaku gelisah dan merinding karena auranya yang berbeda dengan Alkitab. Hanya saja misalnya SM tidak bisa mengambar perbedaan aura itu, "ya pokoknya auranya beda pak" (SM, Pelajar Kristen SMAN 6, wawancara, 24-10-2014). Ketika ditanya apa beda antara Alkitab yang dibacakan pastor atau pendeta dengan Al-Qur'an yang dibaca bersama guru-guru di sekolah, dengan enteng SM menjawab, "kalau bacaan Alkitab bisa dipahami sementara Al-Qur'an tidak" (SM, Pelajar Kristen SMAN 6, wawancara, 24-10-2014). Lalu apa yang dilakukan saat yang pelajar muslim membaca Al-Qur'an? Sebagian mengatakan diam-diam saja, yang lain mengatakan main *game* meski ada juga yang berdoa di dalam hati.

Di samping tidak ada anjuran dari para guru, juga belum terpikir unguap NZ untuk membawa Alkitab sehingga di saat pelajar muslim membaca Al-Qur'an, pada saat bersamaan yang bersangkutan membaca pula kitab suci yang dimaninya tersebut (NZ, pelajar Kristen SMKN 2, wawancara, 28-10-2014). Namun umumnya mereka tidak merasa terganggu dengan bacaan Al-Qur'an kendati harus mendengar dan mengikuti setiap jam pelajaran hendak dimulai.

Begitu juga dengan mendengar kultum atau ceramah pada saat peringatan hari-hari besar Islam. Memang bagi pelajar non muslim tidak diabsensi, namun mau tidak mau harus hadir lebih awal karena jika terlambat akan “dibariskan” bersama teman-teman mereka yang terlambat atau dicari ke dalam lokal termasuk harus terlibat dalam pelaksanaan acara dimaksud saat lokal mereka ditunjuk sebagai pelaksana kendati hanya sekedar tampil di depan teman-teman mereka yang beragama Islam. Karena tidak punya pilihan, sama dengan kegiatan sebelumnya mereka hadir sekedar mendengar, atau main-main termasuk main game. Ketika ditanya apakah hal ini sebuah keterpaksaan? NZ pelajar Kristen SMKN 2 tidak lagi dapat membedakan apakah kehadirannya dalam setiap acara kultum tersebut sebagai sebuah keterpaksaan atau karena sudah terbiasa. Yang jelas menurutnya hal tersebut sudah ia jalani sejak menjadi murid sekolah dasar negeri di Kota Padang. Kendati menurut SM keterlibatan pelajar Kristen dalam acara tersebut lebih merupakan partisipasi dan merupakan bentuk toleransi karena mayoritas di sekolah mereka adalah pelajar muslim (SM, Pelajar Kristen SMAN 6, *wawancara*, 24-10-2014).

Semuanya memang tidak bisa dilepaskan dari latar belakang pendidikan mereka yang pada umumnya berasal dari sekolah-sekolah negeri. Dari 16 pelajar Kristen SMAN 6 yang mengikuti FGD, separohnya bersekolah sejak SD sampai SMP pada berbagai sekolah negeri di Kota Padang termasuk SMAN 6. Sejak kelas tiga mereka sudah terlibat dalam berbagai kegiatan keislaman di sekolah mereka karena saat itu, di masa kepemimpinan Fauzi Bahar Kota Padang mengalami intensifikasi kegiatan keislaman yang merambah juga ke lembaga-lembaga pendidikan. Tiga di antaranya saat memasuki SMP dan 1 orang meski berasal dari SMP Murni (Protestan) namun terlahir dari keluarga berbeda agama; ibu penganut agama Islam sementara ayah penganut agama Katolik dan tinggal di lingkungan

muslim. Tiga orang berasal dari SMP Kristen seperti SMP Santa Maria, Tarutung Sumatera Utara, SMP Murni dan SMP Frater Padang, namun ketiganya sekolah yang juga terbuka bagi pelajar dari berbagai agama dan etnik. Hanya satu orang yang berasal dari SMP Kalam Kudus yang kebanyakan pelajarnya beragama Kristen. Umumnya juga mengaku tinggal di lingkungan yang berbeda agama bahkan di lingkungan mayoritas muslim; 9 orang tinggal di lingkungan berbeda agama, 3 orang bahkan tinggal di lingkungan mayoritas muslim dan hanya 4 orang yang mengaku tinggal di lingkungan mayoritas Kristen. Begitu juga dengan pelajar Kristen SMKN 2 yang diwawancarai. 5 orang pelajar Kristen SMKN 2 yang menjadi informan penelitian mengakui berasal dari sekolah negeri di Kota Padang dan tinggal dalam lingkungan yang berbeda agama. Data ini paralel dengan pelajar muslim yang memilih untuk bersekolah di SMA Donbosco, umumnya berasal dari sekolah-sekolah negeri dan kalau tidak tinggal di lingkungan yang berbeda agama setidaknya mereka sering berteman dengan orang yang berbeda agama atau etnik (Andri Ashadi, 2014).

Yang tampak agak menjadi persoalan bagi pelajar Kristen adalah dalam pembelajaran Agama Islam. Dalam aturan mereka boleh keluar atau bertahan di dalam, akan tetapi pada umumnya mereka memilih bertahan di dalam terlebih jika jam pelajaran Agama Islam berlangsung pada awal atau pertengahan sebelum jam pulang. Jika keluar menurut ALL, nanti guru piket menyuruh kembali untuk masuk ke ruang belajar karena di saat jam belajar peserta didik tidak boleh berkeliaran di luar (ALL, pelajar Kristen SMAN 6, *wawancara*, 24-10-2014). Kecuali seperti SM yang jam pelajaran Agama Islam pada masanya dilaksanakan menjelang jam pulang. Ia sudah bisa keluar atau pulang lebih dahulu untuk istirahat atau untuk sekedar makan siang (SM, pelajar Kristen SMAN 6, *wawancara*, 24-10-2014). Persoalannya tentu mereka mau

tidak mau belajar atau setidaknya ikut mendengar materi-materi pembelajaran Agama Islam yang tidak jarang terkait juga dengan agama mereka, Kristen. Misalnya ketika materi pelajaran sebagian juga menyinggung persoalan yang terkait masalah kenabian atau kita suci yang dibicarakan tentunya dari sudut pandang Islam. ALL, pelajar Kristen kelas XII SMAN 6 menyebutkan bahwa dalam pembelajaran tersebut ia pernah mendengar bahwa selain pemeluk Islam adalah kafir. Kitab suci Agama Kristen dikatakan juga sudah banyak yang dirobah-robah dan yang paling membuat saya tersinggung kata ALL adalah ketika dikatakan bahwa yang disalib bukan Yesus tapi adalah penghianat yang diserupakan dengan Yesus (ALL, Pelajar Kristen SMAN 6, *wawancara*, 24-10-2014). Hal ini tampak sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh guru Agama Islam SMAN 6. Menurutnya hal itu harus disampaikan untuk memperkuat keyakinan pelajar muslim. Ia juga mengakui kalau ada di antara pelajar Kristen yang menangis setelah mendengar materi pelajarannya dan mengadu pada guru Bimbingan Konseling. Namun guru BK justru menjawab ungkap guru bersangkutan, “ya memang begitulah ajaran Islam.” (N, Guru Agama Islam senior SMAN 6 Padang, *wawancara*, 21-10-2014). Hal yang sama juga dialami oleh SLB pelajar Kristen SMKN 2. Ia tidak habis pikir mengapa guru Agama Islam di sekolahnya waktu kelas XI selalu menyindir-nyindir dan menyudutkan agamanya. Meski tidak terkait langsung, ada saja materi yang nanti akan menyudutkannya di ruang sekolah yang hanya ada 4 orang siswa Kristennya. Untung katanya ia mempunyai banyak teman-teman muslim yang suka menghibur dan baik hati. Pernah juga, ia curhat pada orang tuanya. Orang tuanya marah dan mau datang menjumpai guru tersebut, namun ia larang karena khawatir dengan keberlanjutan sekolahnya (SLB, Pelajar Kristen SMKN 2, *wawancara*, 27-10-2014).



Gambar 3: Inilah model pakaian seragam sekolah yang dipakai pelajar Kristen SMKN 2 persis seperti yang dipakai pelajar muslim sekolah bersangkutan
(sumber gambar dokumen tim peneliti)

Menanggapi perilaku pelajar Kristen di atas, seorang pemuka Kristen di kota ini, WS, menarik nafas panjang. Ia tampak kikuk dan cukup lama berfikir sebelum merespon ketika penulis bertanya, “apakah perilaku pelajar Kristen di atas memiliki pijakan normatif dari Alkitab atau landasan empiris dalam tradisi kekristenan”? Walau kemudian ia menjawab “, ”yach ngak ada bang. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau dan mampu untuk itu. Mungkin ya karena pertimbangan itu tadi, misalnya biaya. Kan di sekolah negeri lebih murah biaya dibanding sekolah swasta atau yayasan” (WS, pemuka Kristen Kota Padang, wawancara, 25-10-2014).

“Lama berfikir” seakan memberi isyarat bahwa yang dilakukan pelajar Kristen seperti yang direpresentasikan oleh NZ, ITW dan SM adalah sesuatu yang tidak lazim, aneh bahkan mungkin terbilang nekad karena samasekali tidak memiliki landasan baik dari sisi normatif ayat-ayat Injil maupun dari sisi tradisi yang tumbuh

dan hidup di kalangan penganut Kristen. Ketidaklaziman tersebut mungkin setara dengan andai hal yang sama terjadi di kalangan siswa muslim yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen, maka kecil kemungkinan ia akan keluar dari cap “kafir”, “murtad” dan sejenisnya.

Namun apakah dengan begitu mereka sudah kehilangan jati diri sebagai penganut Kristen yang taat atau setidaknya terpengaruh oleh berbagai program dan kegiatan keislaman di sekolah mereka? Hal ini mengingat sebagian mengakui sudah sejak kelas III SD terlibat dalam berbagai program dan kegiatan-kegiatan keislaman di atas. Jika ukurannya “sudah terbiasa” seperti pernyataan NZ dan “nyaris menyamai” seperti yang ditampakkan SM, dapat dikatakan mereka sudah terpengaruh kalau tidak akan dikatakan kehilangan jati diri sebagai penganut suatu agama yang baik. Ini disebabkan karena agama tidak hanya sekedar petunjuk dan pengarah perilaku, tapi dalam batas tertentu juga memberi batasan bentuk suatu perilaku jika dihubungkan dengan agama lain. Hanya saja bila ditelusuri lebih jauh mereka tidak hanya memiliki sikap toleran seperti yang sudah diuraikan, tapi juga penganut Kristen yang militan. Hanya militansi sikap beragama mereka ditujukan ke dalam, bukan keluar. AP, ketua OSIS SMKN 2 memberikan penilaian kalau pelajar Kristen SMKN 2 termasuk yang fanatik terhadap mereka. Walaupun pelajar Kristen hadir dalam acara kultum atau ikut belajar pendidikan Agama Islam menurutnya lebih sekedar partisipasi mereka karena bersekolah di sekolah yang mayoritas pelajar adalah muslim. Kitapun menurut AP memang mengharapkan agar mereka menunjukkan partisipasi tersebut. Mereka, lanjutnya, tidak mau ikut-ikutan menjadi pelaksana acara; hanya sekedar hadir saja. Meski kalau lebaran mereka juga sering datang ke rumah pelajar yang muslim (FGD dengan sejumlah pelajar Muslim SMKN 2 Padang, 17-09-2014).

Sepengetahuan Y, Guru senior PAI SMKN 2, baru satu orang pelajar Kristen yang pindah ke agama Islam yang menurut dugaannya karena sering mengikuti pelajaran PAI yang ia ampu (Y, *wawancara*, 17-09-2014). Sebaliknya tidak jarang justru pelajar Kristen merasa tersudutkan dengan pola pengajaran Agama Islam yang selalu dikait-kaitkannya dengan agama Kristen. Alih-alih mencari simpati malah antipati seperti yang dialami Susi. Ia tak habis pikir kenapa guru tersebut selalu mengait-gaitkan materi PAI dengan agamanya yang ujung-ujung membuat ia tersudut dan merasa direndahkan. Ia bahkan pernah mengeluhkan hal tersebut pada orang tuanya. Orang tuanyapun marah, dan ingin menemui guru yang bersangkutan. Namun ia larang karena khawatir dengan kelangsungan sekolahnya (SLB, Pelajar Kristen SMKN 2, *wawancara*, 27-10-2014). Hal yang sama juga dialami Ahyur, pelajar Kristen SMAN 6. Ia bahkan sampai menangis dan mengadukan ke guru BK ketika guru Agama Islam di sekolahnya menyatakan, bahwa yang disalib itu bukan Yesus, melainkan pengkhianat yang diserupakan dengan Isa, Yudas Iskariot. “Yach tersinggunglah saya pak, masak dikatakan yang disalib itu dikatakan pengkhianat. Kayak dia saja yang paling benar pak.” (ALL, Pelajar Kristen SMAN 6, *wawancara*, 24-10-2014) Ia sama sekali tidak terpengaruh dengan ajaran Islam yang terus menerus diinternalisasikan di sekolahnya. Baginya ini lebih sebagai jalan untuk mengenal perbedaan dan persamaan di antara agama-agama. Ahyur sendiri mengaku sering diajak teman-temannya untuk pindah agama ke Islam. Lalu karena keseringan ia katakan, “sekarang begini saja, aku pindah ke agamamu, nanti kamu pindah pula ke agamaku, biar kita saling rasain.” NZ yang mengaku sudah terbiasa dengan program dan kegiatan keislaman pada sekolah bahkan mengkritik teman-teman muslimnya yang harus diabsen dulu untuk sholat, “masak diabsen, sholat itu kan untuk dia” (NZ, pelajar Kristen SMKN 2, *wawancara*, 28-10-2014).

Lalu bagaimana sesungguhnya mereka memaknai Kristen sebagai agama dan identitas laten pada diri mereka dengan identitas keislaman menifes hasil bentukan ruang publik sekolah? Keberagaman bagi mereka tampaknya lebih merupakan urusan dalam, iman atau kepercayaan. Kendati NZ misalnya tidak mau mengungkapkan simpul-simpul keimanannya, namun ia selalu mengingat pesan pendetanya untuk tidak terpengaruh dan jangan sampai menyangkal Tuhan kendati terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai program dan kegiatan keislaman di sekolahnya (NZ, pelajar Kristen SMKN 2, wawancara, 28-10-2014). Kata iman sendiri dalam agama Kristen memang mengacu pada rasa percaya pada Allah dan percaya pada firman-Nya. Percaya pada Allah mencakup arti bahwa ia benar dan dapat diandalkan, mempercayakan diri pada-Nya dan taat serta setia pada-Nya. Sementara percaya pada firman-Nya berarti percaya dan menerima apa yang sudah difirmankan-Nya, termasuk percaya pada Yesus Kristus sang juru selamat. (<http://www.alkitab.or.id/biblika/RuangIstilah4.htm> di akses tgl 21 maret 2015 jam 06.00). Karena agama lebih merupakan urusan iman, maka bagi NZ beribadah tidak mesti di gereja. “kita dapat beribadah di mana saja, kan Tuhan berada di mana-mana. Dan beribadah itu tidak perlu dipamerkan, dilihat orang. Kita bisa saja berdo’a dalam hati (NZ, pelajar Kristen SMKN 2, wawancara, 28-10-2014).

Dengan pola pemahaman seperti itu, N tampak telah merasionalisasikan pilihannya ketika memilih untuk bersekolah di sekolah negeri di Kota Padang. Kendati harus terlibat dalam kegiatan kultum dan mengenakan busana muslimah, namun tidak dimaknainya sebagai masalah iman dan ibadah. Iman dan ibadah urusan dalam dan itulah yang ia maknai sebagai agama yang sesungguhnya, sementara keterlibatannya dengan kegiatan keislaman lebih merupakan urusan luar yang tidak ada sangkut

pautnya dengan agama. Lagi pula menurutnya, di samping tidak terdapat ketentuan agamanya dalam soal tersebut, seperti yang juga dipahami oleh temannya ITW, Maria saja berjilbab. Dengan cara seperti ini, ia tampak enjoy menjalani berbagai kegiatan keislaman sekolahnya. Sehingga dengan demikian ketika ditanya apakah ia menjalaninya dengan sebuah keterpaksaan? Dengan lugas seperti yang dikatakannya, tak tahu lagi apakah ini keterpaksaan atau bukan. Yang jelas menurut merasa sudah biasa atau terbiasa saja. Ia juga tidak merasa tersisih ketika kegiatan keagamaannya tidak mendapat ruang representasi karena menurutnya di sekolahnya mayoritas memang pelajar muslim. (NZ, pelajar Kristen SMKN 2, wawancara, 28-10-2014).

Pemahaman serupa juga tampaknya yang memuluskan SM untuk memperagakan berbagai kegiatan keislaman seperti mengucapkan “Assalamu’alaikum” , astagfirullah dan masaallah, sama seperti yang lazim dilakukan oleh teman-teman muslimnya. Suatu kali, ia bertutur, “sebenarnya pelajar Kristen tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kultum pak. Tapi hanya sekedar untuk ‘meramai-ramaikan.’ Segan pula dengan kawan-kawan muslim” (SM, pelajar Kristen SMAN 6, wawancara, 10-11-2014). Ini menunjukkan kalau ia sudah memisahkan antara wilayah agama- iman dan bukan agama karena keikutsertaannya dalam kegiatan kultum lebih dimaknai sekedar meramai-ramaikan dan merasa segan dengan kawan-kawan muslimnya kalau tidak menghadiri kegiatan tersebut. Sikap serupa juga ditunjukkan ITW yang sering dijadikan model oleh sekolah tentang rapinya seorang Kristen berjilbab bagi kebanyakan teman-teman muslimahnya, termasuk turut membantu mengambilkan absensi sholat teman-teman muslim di tempat sholat. Cara pandang tersebut, menggunakan perspektif ST Sunardi, menempatkan agama pada sikap yang mempercayai hidup, penekanan pada hidup dan cara hidup dan yang terpenting

menurutnya bahwa agama menyangkut soal perjumpaan dengan yang kudus atau Tuhan. (ST Sumnardi dalam Th. Sumartana dkk, 1991)

BAB IV

MENGALAMI MENJADI YANG BERBEDA

Pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia karena dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. (Fatvuhul Mu'in, 2011: 287) Dari kerangka ini memilih sekolah formal baik untuk tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK bukanlah persoalan sederhana; sekedar bersekolah atau hanya untuk mengurangi pengendalian orang tua dengan melimpahkan tugas dan wewenang mendidik kepada sekolah. Keputusan paling penting kedua sebagai orang tua, selain memutuskan untuk memiliki anak, adalah menentukan pilihan sekolah terbaik untuk putra-putrinya. Ia dianggap penting karena dengan mendaftarkan anak di sekolah yang tepat akan menempatkannya pada jalur pendidikan yang berkualitas dan menjanjikan keberhasilan dalam kehidupan di masa mendatang (<http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/18/08280233/Pilih.Sekolah.yang.Tepat..Apa.Saja.Pertim-bangannya> diakses tanggal 19 Nopember 2013 jam 22.30 WIB)

Tidak semua orang tua memiliki kesempatan untuk memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka, misalnya saja karena keterbatasan finansial, keterbatasan jumlah pilihan sekolah di sekitar

tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi cukup banyak juga orang tua yang memiliki kebebasan dalam menentukan sekolah yang terbaik untuk anak-anak mereka. Meski pilihan tersebut harus dimusyawarahkan pula dengan sang anak karena merekalah yang sesungguhnya akan bersekolah. Lalu bagaimana dengan pelajar yang menjatuhkan pilihan ke SMA Don Bosco Padang yang terbuka dan beragam? Faktor dan alasan apa saja yang mendorong sang anak dan pertimbangan orang tua untuk bersekolah di situ?.

A. Memilih untuk Berbeda

Dikalangan pelajar Muslim putra, SMA Don Bosco Padang tampak menjadi pilihan belajar di antara sekolah-sekolah yang ada. Meski terdapat sekolah-sekolah favorit di kota ini seperti SMA 1, SMA 3 dan SMA 10, mereka tidak mendaftarkan diri pada sekolah-sekolah tersebut. Mereka justru tertarik masuk SMA Don Bosco. Tentu saja tidak asal tertarik, menggunakan teori rasionalitas Marx Weber (Veeger, K.J,1986), ada rasionalitas tertentu (tujuan) yang mendorong mereka untuk bersekolah di sana. AU RA misalnya tertarik masuk SMA Don Bosco Padang karena ciri keragaman sekolah tersebut. Ia yang sebelumnya sekolah di SMP Frater yang terbuka bagi keragaman etnik dan agama ini, beragumen bahwa semakin kaya sekolah dengan keragaman, maka sosialisasinya terutama dengan teman-teman sebaya akan semakin baik; semakin banyak teman. Bahkan salah satu kualitas sekolah ia lihat dari pergaulan antar teman-teman yang saling terbuka dan beragam. Di samping itu, memperkuat argumennya tentang keragaman ini, guru-gurunya juga sangat menghargai pelajarnya tanpa melihat latar belakang perbedaan suku dan agama. Inilah kelebihan SMA Don Bosco yang membuatnya tertarik untuk mendaftar. Untuk itu, ia tidak mempersoalkan jarak tempuh dan biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah di sana. Terkait dengan soal biaya, meski

tergolong mahal orang tua katanya tetap akan mengusahakan kalau sekolah tersebut dianggap cocok untuk anak-anaknya, ungkap putra pertama dari dua orang bersaudara ini (AU RA, *wawancara*, 03-11-2013).

Agak berbeda dari AU RA yang mengedepankan ciri keragaman, IJ tertarik karena peraturan sekolahnya yang serba ketat. SMA Don Bosco memang sejak dari dulu terkenal untuk masalah ini. Secara dramatik salah seorang guru sekolah tersebut menggambarkan bahwa, “saat ujian, jangankan suara pensil jatuh, suara penjahit jatuh sekalipun dapat didengar.” begitu tertibnya pelajar-pelajar SMA Don Bosco (L, *wawancara*, 22-10-2013). Orang tua menurut IJ memiliki obsesi dan harapan dengan peraturan yang serba ketat tersebut akan dapat mengantarkan sang anak pada gerbang kesuksesan. Masih berbeda dari AU RA yang mencirikan kualitas SMA Don Bosco (dalam hal ini guru) pada sisi penghargaan pada keragaman, ia meletakkan kualitas SMA Don Bosco pada standar formal. Selain peraturannya ketat, yang mendorongnya masuk SMA Don Bosco adalah pertama, karena berakreditasi A dengan nilai tertinggi dari SMA lain di Sumatera Barat. Kedua, ia melihat kualitas guru dari pengakuan negara ketika yang bersangkutan sudah mendapatkan sertifikasi pendidik dan guru-guru SMA Don Bosco menurutnya sudah banyak yang memiliki sertifikat tersebut. Ketiga, kualitas pelajar SMA Don Bosco ia lihat dari prestasi-prestasi yang diraih baik di daerah maupun di tingkat nasional. Sama seperti AU RA, ia juga tidak terlalu mempersoalkan biaya sekolah di SMA Don Bosco meski keduanya mengakui belum pernah mendapatkan beasiswa atau keringanan biaya pendidikan selama bersekolah di sana (IJ, *wawancara*, 03-11-2013).

Hanya saja tidak demikian halnya dengan pelajar Muslim puteri. Bagi mereka, SMA Don Bosco semula bukanlah pilihan untuk melanjutkan studi, melainkan lebih sebagai sekolah alternatif dalam

pengertian mereka tidak menempatkan SMA Don Bosco sebagai pilihan utama. Namun harus diakui bahwa mereka menempatkan SMA Don Bosco sebagai alternatif tidak semata karena faktor/dorongan luar yang dapat dipahami sebagai tindakan tradisional (K.J. Veeger, 1986). Hal ini ditunjukkan dengan sebelum menempatkan SMA Don Bosco sebagai alternatif untuk bersekolah, mereka sudah mencoba peruntungan pada sekolah-sekolah negeri. CRR yang meski sudah bersekolah di SMP Frater (berafiliasi dengan Katolik dan multikultural) sudah mendaftar dan lulus pada sekolah negeri di Medan; tanah kelahiran sang bunda, MS. Namun untuk pindah ke Padang banyak persyaratan yang harus dipenuhi, maka kemudian ia mendaftar pada SMA 2 Padang dan diterima. Hanya saja karena trauma dengan pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Sekolah) pada sekolah-sekolah negeri ketika itu, ia keluar dan bersekolah di SMA Don Bosco. “Jadi, ya sekolah saja di SMA Don Bosco” begitu ia memberi alasan (CRR, *wawancara*, 22-10-2013).

Pengalaman yang kurang lebih sama juga dialami oleh NM. Pada tahap awal ia juga mengikuti seleksi untuk masuk sekolah negeri. Hanya berbeda dari CRR, ia tidak lulus. Untuk selanjutnya ketika kesempatan untuk mendaftar di sekolah negeri masih terbuka, ia mulai tidak percaya diri antara memilih SMA-SMA negeri atau SMA Don Bosco. Maka meski ia mencoba lagi mendaftar pada sekolah negeri, namun pada saat bersamaan ia mendaftar pula pada SMA Don Bosco. Sambil menunggu hasil seleksi sekolah negeri keluar, ternyata hasil seleksi di SMA Don Bosco lebih dahulu diumumkan. “SMA Don Bosco itu cerdas pula. Sebelum pengumuman sekolah negeri, ia sudah lebih dahulu keluar” tutur sang ayah melengkapi cerita sang anak. Dan NM termasuk salah seorang yang lulus (EB, *wawancara*, 04-11-2013) Mempertimbangkan pengalaman sebelumnya yang tidak lulus pada sekolah negeri maka NM segera mendaftar ulang pada SMA Don Bosco dan berketetapan hati untuk

melanjutkan studinya meski pada akhirnya ia lulus juga pada sekolah negeri (NM, *wawancara*, 19-10-2013).

Ketika ditanya mengapa ke SMA Don Bosco yang terbuka bagi etnik dan agama? Berbeda dengan alasan AU RA dan IJ, CRR menyebut lebih karena faktor kakak-kakaknya yang dulu juga bersekolah di SMP Frater terus melanjutkan ke SMA Don Bosco. Menurut anak keempat dari 4 bersaudara ini, kakak pertama dan keduanya sudah berhasil menjadi dokter, sementara kakak ketiganya sedang kuliah pula pada perguruan tinggi favorit di Sumatera Barat, Universitas Andalas Padang. Keberhasilan kakak telah menjadi inspirasinya untuk masuk SMA Don Bosco. Sementara NM tak banyak memberikan alasan selain karena dorongan teman-teman SMPnya yang juga banyak mendaftar ke SMA Don Bosco. Terkait dengan soal biaya sekolah, baik CRR, anak bidan yang buka praktek ini maupun NM, anak pemilik toko peralatan olah raga terkenal di kota Padang ini senyum-senyum saja. Mereka tampak tak terlalu mempersoalkan biaya sekolah, termasuk juga jarak tempuh untuk sampai ke sekolah.

Apakah tidak terdapat kekhawatiran bahwa keterbukaan etnik dan agama tersebut dapat mempengaruhi identitas/agama? Baik pelajar Muslim putera maupun puteri yang sudah terbiasa dengan keragaman ini tidak merasakan kekhawatiran tersebut. AU RA misalnya memiliki pandangan tersendiri terhadap masalah ini. Dalam soal identitas/agama lebih mereka lihat sebagai masalah privat, artinya tergantung pada pribadi yang bersangkutan. Belum tentu sekolah menurutnya dapat membentuk atau merubah karakter seseorang. Oleh sebab itu, ia merasa tidak perlu harus sekolah pada sekolah negeri yang relatif lebih homogen dari segi agama atau pada sekolah-sekolah keagamaan. IJ kemudian memperkuat argumen AU RA, “tergantung pada iman seseorang. Kalau imannya kuat ia tidak akan terpengaruh” (IJ. *wawancara*, 03-11-2013).

Bagaimana dengan pandangan orang tua pelajar Muslim? Bagi kedua orang tua CRR yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji pada tahun 2013 ini, memasukan anak-anaknya ke sekolah Kristen, tidak hanya sekedar bersekolah. Namun sudah melalui pertimbangan dan sejumlah rasionalisasi yang sangat matang. Hal ini terlihat setidaknya 3 putra-putrinya pernah mengemukakan pendidikan di sekolah Kristen, termasuk putri bungsunya, CRR. Mengapa mereka memasukan anak-anak ke sekolah Kristen, termasuk putri bungsunya CRR? Sang ibu, MS bertutur, *pertama* dari segi psikologi anak. Menurutnya, anak-anak apalagi perempuan pada usia remaja membutuhkan pengawasan ekstra ketat dari orang tua karena tantangan terberat yang harus dihadapi oleh orang tua pada masa ini adalah masa pubertas, masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Salah satu ciri penting dari periode adalah rasa ingin tahu dan ingin mencoba segala sesuatu yang dilakukan orang dewasa. Tidak jarang pada masa ini anak-anak tergiur pada perilaku negatif seperti mencoba narkoba, minum-minumam keras, penyalahgunaan obat atau perilaku seks pranikah. Ini jelas membutuhkan pengawasan ekstra ketat dan ia mendapatkan hal tersebut di SMA Don Bosco lewat peraturannya yang serba ketat (skor minus untuk setiap pelanggaran tata tertib sekolah apalagi terhadap perilaku negatif di atas) dan ia merasa terbantu sekali untuk pengawasan anak dengan disiplin yang serba ketat tersebut. *Kedua*, pengawasan dan evaluasi guru pada murid berjalan saban waktu baik terhadap hal-hal yang positif maupun aspek negatif dari sang anak. Hal tersebut langsung dikomunikasikan pada orang tua yang terkadang tanpa sepengetahuan sang anak. *Ketiga*, fasilitas dan bahan ajar yang serba modern mengikuti perkembangan dan dinamika dunia pendidikan. Hal ini menurutnya berbanding terbalik dengan kebanyakan sekolah-sekolah negeri. “Kami mendapatkan semua apa yang kami mau” ungkap BA memperkuat alasan istrinya (MS dan BA, *wawancara*, 07-11-2013).

Sama seperti orang tua CRR, EB, orang tua NM juga mengarisbawahi soal fasilitas sekolah yang menurutnya sangat memadai untuk sebuah sekolah swasta di kota Padang; bersih, rapi, disiplinnya bagus, guru-gurunya professional dan sungguh-sungguh dalam mengajar. Sesuatu yang menurutnya kurang didapatkan pada sekolah negeri. Inilah hal-hal yang mendorongnya memasukan NM untuk bersekolah ke SMA Don Bosco. Hanya saja ia agak mengeluhkan soal fasilitas ibadah anak yang tidak disediakan di lingkungan sekolah sehingga harus mencari keluar dari lingkungan sekolah (EB, *wawancara*, 04-11-2013). Memang menurut N, salah seorang guru SMA Don Bosco, sarana ibadah dalam bentuk rumah ibadah masing-masing tidak tersedia di lingkungan sekolah. Namun tempat yang bersih untuk sholat ada dalam lingkungan sekolah. Kalau hal ini disediakan untuk pelajar Muslim misalnya maka pelajar yang lain akan menuntut hal yang sama sementara lokasi sekolah tidak memungkinkan untuk itu (N, *wawancara*, 22-10-2013). EB juga berharap kalau suatu saat SMA Don Bosco terbuka pada pelajar Muslim puteri untuk memakai pakaian muslimah (pakai jilbab) karena bagaimanapun menurutnya sekolah tersebut berada di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

Harapan EB tentu saja tidak mengada-ada jika ditautkan dengan visi SMA Don Bosco yang sebelumnya disebut-sebut mengembangkan pendidikan keragaman. Perlakuan dan kebijakan yang beragam terhadap keberagaman sejatinya adalah tuntutan keragaman itu sendiri. Terlebih di samping institusi ini berada di ranah Minang yang mayoritas beragama Islam, komposisi pelajar kelas tiga; pelajar Muslim pun merupakan mayoritas kedua (42.63 %) setelah pelajar Kristen bila digabung Katolik dengan Protestan (50.77 %). Jumlahnya pun hampir berimbang. Jika dipisah (pelajar Katolik 36.82 %, pelajar Protestan 13.95 %) maka mayoritas

pelajar kelas tiga SMA Don Bosco adalah pelajar Muslim. Bahwa hal tersebut “dikhawatirkan akan mengancam kemajemukan yang terdapat pada sekolah”, lebih terpulang pada pihak sekolah yang mengelola keberagaman tersebut dan kesiapan mental untuk melihat keragaman sebagai sesuatu yang unik. Bukan sebaliknya, merupakan ancaman terhadap struktur keragaman sehingga yang dikedepankan “hanya” persamaan. Hal ini juga kemudian menjadi tampak aneh ketika pada saat yang sama guru-guru muslimah diberi keleluasaan untuk mengenakan pakaian muslimah (jilbab), namun pelajar Muslim putri hanya diberi keleluasaan yang sama pada saat-saat peringatan hari-hari besar keagamaan (CRR dan NM, *wawancara*, 19-11-2013).

Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa keterbukaan ini akan mempengaruhi identitas/agama? BA, orang tua CRR sudah membekali anak-anaknya di rumah dengan pendidikan agama yang baik. Ia sering mendatangkan ustad khusus untuk pengajaran mengaji dan masalah-masalah ibadah. Untuk tingkat SD semua anak-anaknya sekolah pada sekolah Islam (SD Adabiyah), baru ketika masuk usia remaja ia masukan ke sekolah Kristen karena alasan-alasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Lagi pula menurutnya yang kita cari ke sana adalah kualitas pendidikan bukan agamanya. Bukankah Islam menganjurkan kita ungkap BA untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Mengapa tidak ke Arab saja kalau selalu dikhawatirkan hal tersebut. Ia malah lebih khawatir memasukan anaknya ke sekolah negeri atau ke sekolah agama yang pengawasan terhadap pelajarnya longgar. Terhadap hal ini, ibunya CRR telah membuktikan sendiri kalau ia sama sekali tidak terpengaruh meski dibesarkan dan sekolah di lingkungan Kristen. Ia juga membuktikan kalau selama sekolah tidak merasakan adanya misi agama atau upaya-upaya untuk mengkristenkan seseorang lewat pendidikan (BA dan MS, *wawancara*, 07-11-2013).

Sama seperti orang tua CRR, EB orang tua NM juga tidak mengkhawatirkan hal tersebut untuk anak tingkat SLTA karena mereka sudah dapat mencerna dan menimbang segala sesuatu. Kecuali untuk anak-anak yang masih menempuh pendidikan dasar, SD. Sama seperti BA, ia juga membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama di rumah atau di mesjid dengan wirid remaja. Ia selalu mengingatkan NM kalau kelihatan sudah mulai lalai sholat jangan-jangan terpengaruh oleh lingkungan sekolahnya yang terbuka tersebut. Lagi pula menurut pengamatan EB, NM tidak terlalu banyak bergaul dengan teman-teman non muslim. Kebanyakan teman-temannya masih berasal dari SMPnya dulu (EB, *wawancara*, 04-11-2013).

B. Belajar untuk Memahami

Sama seperti AU RA dan IJ, bagi pelajar Kristen SMA Don Bosco tampak lebih merupakan pilihan dari sekolah-sekolah yang ada. Berbeda dengan pelajar Muslim putri di atas, mereka tidak mendaftarkan diri ke sekolah-sekolah negeri atau SMA swasta yang lain seperti ke SMA Xaverius yang diperuntukan untuk murid-murid Katolik atau ke SMA Kalam Kudus bagi yang Protestan. Dengan akreditasi A dan para alumni yang banyak berkiprah di tengah-tengah masyarakat sudah cukup memastikan langkah mereka untuk bersekolah di SMA Don Bosco. Hal ini didukung pula oleh fasilitas pendidikan yang memadai, guru-guru yang berkualitas; berusaha membuat anak didiknya untuk lebih mengerti dan pola pergaulan yang saling terhubung/terbuka. Terhadap kualitas ini, AWP memastikan kalau seandainya SMA Don Bosco berada dipinggiran kota tetap akan menjadi pilihannya meski untuk itu butuh pengorbanan. Ia sendiri membuktikannya hampir setiap hari pulang pergi mengendarai motor dari rumahnya di perumahan Belimbing Kuranji yang berada di pinggirin kota ke sekolah pilihannya yang berada

di ;pusat kota yang menghabiskan jarak tempuh hampir satu jam. “Untuk mencapai cita-cita memang butuh pengorbanan” demikian AWP meneguhkan tekadnya.

Sama dengan AWP, BAT juga tak mempersoalkan jarak tempuh untuk sebuah sekolah yang dianggapnya berkualitas. Buktinya sebelum masuk SMA Don Bosco Padang, seperti yang diakui sang ayah YH, ia sudah mendaftar pada SMA Don Bosco Yogyakarta namun belum lulus. Artinya andaikan ia lulus tentu tidak sekedar jarak tempuh yang menjadi persoalan, namun juga akan berpisah dengan kedua orang tuanya yang bekerja dan tinggal di kota Padang. Hanya saja bagi H jarak tempuh dari rumah ke sekolah termasuk yang menjadi pertimbangan. Ia sendiri tinggal di Jondul Rawang Padang yang menghabiskan kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk sampai ke sekolah. Andai SMA Don Bosco berada di pinggiran kota, ia akan mencari sekolah Katolik lain tapi tetap sekolah yang terbuka juga terhadap keragaman (AWP, BAT dan H, wawancara, 19-10-2013).

Bagaimana dengan soal biaya? Semuanya menganggap hampir sama saja dengan SMA negeri di kota Padang. Hanya saja mereka mendapatkan keringanan dalam soal biaya. BAT pernah mendapatkan dana bos sebanyak Rp. 700 ribu setahun. H juga 1 juta per tahun. Sementara AWP mengaku mendapat keringanan biaya masuk dan uang SPP lantaran orang tuanya guru di yayasan Prayoga yang menaungi berbagai lembaga pendidikan termasuk SMA Don Bosco (AWP, BAT dan H, wawancara, 19-10-2013). Tapi menurut mereka SMA Don Bosco memberlakukan uang masuk dan uang SPP tidak sama untuk setiap pelajar dan diberlakukan pula subsidi silang. Bagi yang tidak mampu ada keringanan, ada pula beasiswa. Hal ini dibenarkan oleh N salah seorang guru di sekolah tersebut. Menurut N, yang sudah 10 tahun lebih bergabung dengan SMA Don Bosco ini, bahkan bagi pelajar yang tidak mampu selain

memperoleh keringanan dalam jumlah biaya pendidikan, juga masih dapat mencil biaya sekolah yang sudah diringankan tersebut meski hal tersebut tidak diumumkan secara terbuka (N, *wawancara*, 18-19-2013).

Mengapa memilih sekolah yang multikultural? Baik AWP, BAT dan H justru mencari sekolah yang terbuka ini karena di sinilah mereka menemukan banyak keragaman baik etnik maupun agama. AWP menambahkan “Sama-sama itu gak enak, gak ada beragamnya. bosan lama-lama”. Sama dengan pelajar Muslim di atas, mereka juga sepakat menyebut bahwa inilah salah satu kelebihan SMA Don Bosco dibandingkan dengan SMA lain seperti SMA Adabiyah di kota Padang. Sebuah cara pandang yang mungkin terasa asing bagi pelajar-pelajar lain yang kurang bersosialisasi atau sama sekali tidak mengenal keragaman.

Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa keterbukaan tersebut akan mempengaruhi identitas (agama)? Sama dengan pelajar Muslim di atas, menurut BAT dan H hal tersebut tergantung iman masing-masing. Yang jelas kita ini bangsa yang beragam masing-masing harus saling menyesuaikan imbuhan BAT yang dalam keluarga besar sudah biasanya dengan keragaman agama. Sama seperti BAT dan H, AWP juga menganggab hal tersebut tergantung pada diri masing-masing dalam menjalankan agamanya. Ia menambahkan bahwa di SMA Don Bosco semua peserta didik mendapatkan pelayanan yang sama termasuk dalam pelajaran agama dan mengadakan kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan hari besar agama masing-masing. Misalnya untuk pelajar Muslim sudah pernah diadakan perlombaan kaligrafi dan untuk pelajar Kristen lomba pemahaman kitab suci. Lagi pula, menurut BAT lulusan SD dan SMP Yos Sudarso ini, kalau ia misalnya diterima di sekolah umum yang mayoritas muslim, tinggal menyesuaikan saja. Perbedaan etnik dan agama baginya tidak menjadi persoalan, bukan merupakan ancaman

tetapi sesuatu yang biasa saja. Hanya saja H menimpali kalau bagi pelajar putera tentu tidak masalah. “Tapi bagi yang perempuan kan harus berjilbab. Agama saya melarang hal tersebut” (H, *wawancara*, 19-10-2013) Pandangan H mungkin saja keliru karena sebetulnya dalam agama Kristen, tidak ada ketentuan khusus menyangkut masalah pakaian. Hanya saja seperti yang digaribawahi oleh salah seorang tokoh agama Katolik ”kan tidak pantas seorang Kristen memakai pakaian tersebut. Kalau mereka memakai kan sama dengan melecehkan pakaian muslim.” (WS, *wawancara*, 22-10-2013).

Lalu bagaimana pula pendapat orang tua pelajar Kristen? Mengapa mereka memasukan anak-anak ke sekolah yang terbuka ini? WS, orang tua AWP misalnya memang memiliki tujuan tersendiri dengan pilihan tersebut. Dengan memilih tinggal di lingkungan yang majemuk termasuk di sekolah menurutnya merupakan sebuah pembelajaran ril bagi sang anak agar tidak eksklusif. Bahwa tuntutan, pengaruh atau gesekan tersebut sudah ada sejak awal kehidupan.. Dan realitas keragaman adalah ruang untuk belajar. Jika orang tua memberikan proteksi agar lebih militan-esklusif dengan memasukan anak-anak ke sekolah-sekolah eksklusif (agama tertentu) menurutnya toh mereka dapat menemukan cara sendiri untuk sampai pada keterbukaan lewat dunia yang saling tersambung (lewat teknologi). Ia menyebut hal itu sebagai dialog kehidupan. Jika keterbukaan dianggap sebagai ruang bagi keterpengaruhan, justru di situlah integritas iman dipertaruhkan dan diuji karena iman dan agamanya bertemu dengan iman dan agama orang lain. Baginya hal ini bukan ancaman tapi adalah peluang untuk mengatakan bahwa iman dan identitas saya adalah Katolik. Kekhawatiran baginya lebih merupakan ketidaksiapan saja (WS, *wawancara*, 22-10-2013).

Sementara itu cara pandang dan sikap BAT yang tampak cukup “liberal” di atas tentu tidak muncul tiba-tiba. Selain mengalami sosialisasi di lingkungan sekolah dari SD dan SMP Yos Sudarso,

juga sosialisasi yang intens di lingkungan keluarga. Sang ayah, YH yang berasal dari Yogyakarta memang sudah terbiasa dengan keragaman termasuk keragaman agama. Ia sendiri sampai usia SMP masih muslim dan pandai membaca Al-Qur'an. Di samping Alkitab, ia masih menyimpan Al-Qur'an di almarinya. Namun karena tinggal dan sering bergaul dengan tante-tantennya yang beragama Katolik lalu memutuskan untuk masuk ke agama Katolik. Sementara ibunya masih tetap muslim sampai sekarang. Bahkan ia ingin kalau ibu segera menunaikan ibadah haji dan ia sudah mengusahakan sejumlah biaya namun belum berhasil. Itulah bakti yang ingin ia tunjukkan pada sang bunda tercintanya. Baginya agama memang lebih merupakan persoalan iman atau privat. Yang penting bagaimana kalau orang beragama apapun bisa menunjukkan perilaku yang baik. Ia tidak pernah membatasi BAT dalam bergaul karena yang bersangkutan sudah harus dibiasakan mencerna, memahami dan memutuskan sendiri apa yang terbaik untuknya termasuk perbedaan-perbedaan suku dan agama. Oleh sebab itu, YH memang sejak semula tidak tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke SMA Xaverius yang khusus untuk pelajar Katolik. Sama seperti dirinya, kalau pada akhirnya akibat dari pergaulan itu sang anak memutuskan apa yang terbaik baginya termasuk berubah keyakinan baginya tidak masalah. Selain alasan ini, sang ayah memang terdorong karena nama besar yang disandang oleh sekolah-sekolah Don Bosco karena alumni banyak yang sukses di tengah-tengah masyarakat. BAT sendiri semula sudah mendaftar pada SMA Don Bosco Yogyakarta namun karena tidak lulus, ia masuk SMA Don Bosco Padang (YH, *wawancara*, 13-10-2013).

Sama dengan WS dan YH, L orang tua H terdorong memasukan anaknya ke SMA Don Bosco juga karena pendidikannya berkualitas, pelayanannya bagus. Mamang biayanya tergolong mahal namun hal tersebut sebanding dengan pelayanan pendidikan yang diterima sang

anak, pihak sekolah tak segan-segan berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak di sekolah. L juga mengarisbawahi soal disiplin yang tidak hanya berjalan saat anak masih dalam lingkungan sekolah, namun terbawa juga sampai ke rumah. Ia mengkonkritkan soal disiplin ini pada tawuran yang menurutnya banyak terjadi di sekolah-sekolah umum, sementara ia belum pernah mendengar kejadian serupa di SMA Don Bosco. Mengapa memasukan anak ke sekolah yang terbuka bagi keragaman, bukan SMA Xaverius atau SMA kalam Kudus? Menurut L disamping kualitas sekolahnya masih kurang, anak-anak juga tidak mengenal perbedaan. Perbedaan tutur ibu yang biasa tinggal di lingkungan yang beragaman ini, tak dapat dielakan. Anak-anak harus dibiasakan juga dengan perbedaan dan hal ini ia dapatkan di SMA Don Bosco. Mengapa tidak ke sekolah negeri? Senada dengan jawaban sang anak, L beralasan karena di sekolah-sekolah negeri diwajibkan berpakaian muslim, “agama kami katanya tidak pernah menganjurkan yang namanya jilbab”. Sementara di SMA Don Bosco, semua pelajar berpakaian yang sama sehingga tidak terlihat perbedaan satu sama lain. Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa keterbukaan tersebut akan mempengaruhi iman? Dengan lugas L menjawab “tidak”. Menurutnya, L boleh bergaul dengan siapa saja asalkan dalam pergaulan jarak tetap harus dijaga; jangan sampai terlalu dekat yang dapat mempengaruhi iman atau keyakinan (L, *wawancara*, 10-11-2013).

C. Bersama untuk Berprestasi

Tak dapat dipungkiri bahwa kualitas sekolah terutama guru dan sarana serta prasarana adalah salah satu daya tarik untuk memilih sebuah sekolah karena hal tersebut dianggap sebagai jantungnya pendidikan. Sebegitu jauh, komponen inilah yang sering dilirik untuk menakar proses-proses keberhasilan sebuah institusi pendidikan. Tak heran, jika kemudian kualitas guru dan infrastruktur tersebut

terkadang menjadi skala prioritas pertimbangan pelajar dan orang tua mengalahkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kultural dan ideologis.

Dalam kenyataannya sebagian institusi-institusi pendidikan yang dikelola oleh umat Kristiani telah menyahuti harapan tersebut, termasuk SMA Don Bosco Padang. Lembaga pendidikan ini telah mempersembahkan hal tersebut kepada banyak pelajar dan orang tua termasuk pelajar dan orang tua muslim dengan akreditasi A. Nilai total yang diperolehpun paling tinggi dari semua SMU/SMK yang ada di Sumatera Barat yaitu 96.53 disusul oleh SMA 1 pada peringkat kedua dengan total nilai 93.66 dan pada urutan ketiga bertengger SMA 3 dengan jumlah nilai 92.58 (<http://www.ban-sm.or.id/provinsi/sumatera-barat/akreditasi> di akses tanggal 24 Nop.2013). Terakreditasi A dengan total nilai paling tinggi tentu saja tidak hanya merupakan kebanggaan bagi sekolah yang bersangkutan dan para orang tua, namun juga bagi para pelajar karena memberikan harapan dan kepercayaan diri bahwa mereka memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu. Dengan layanan pendidikan yang bermutu ditambah pula banyaknya lulusan yang berhasil menembus perguruan tinggi favorit di dalam maupun di luar negeri (<http://donboscopadang.wordpress.com/kelas-akselerasi/> diakses tanggal 2 Nopember 2013), semakin meneguhkan keyakinan mereka untuk masuk SMA Don Bosco. Di sini rasionalitas harapan/ impian memiliki pijakan kuat pada kenyataan. Indikasinya meskipun sekolah ini milik yayasan Katolik, namun yang bersekolah pada lembaga ini tidak hanya pelajar-pelajar Katolik. Melainkan juga pelajar-pelajar Protestan, Islam, Budha dan Hindu. Mereka datang dari berbagai suku bangsa, dari segenap penjuru nusantara.

Jika ditelusuri lebih jauh beberapa komponen keunggulan yang menjadi daya tarik tersebut dapat dilihat dalam tabel perbandingan dengan SMA favorit lainnya di Kota Padang berikut:

No	Komponen Akreditasi	Komponen Nilai		
		SMA DB	SMA 1	SMA 3
01	Standar Isi	97	93.33	94.00
02	Standar Proses	95	92.50	85.00
03	Standar Kompetensi Lulusan	95	96.00	92.00
04	Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan	97	93.75	95.00
05	Standar Sarana dan Prasarana	95	93.33	90.00
06	Standar Pengelolaan	96	96.25	92.50
07	Standar Pembiayaan	97	90.00	94.00
08	Standar Penilaian Pendidikan	95	96.25	93.75

Untuk beberapa komponen tampak SMA Don Bosco lebih unggul dari 2 SMA lainnya. *Pertama*, komponen standar isi SMA Donbosco memperoleh nilai 97, sementara SMA 1 memperoleh nilai 93.33 dan SMA 3 memperoleh nilai 90.00. *Kedua*, standar proses SMA Don Bosco memperoleh nilai 95, SMA 1 memperoleh nilai 92.50 dan SMA 3 memperoleh nilai 85.00, *ketiga*, standar tenaga pendidik dan kependidikan SMA Don Bosco memperoleh nilai 97, SMA 1 memperoleh nilai 93.75 dan SMA 3 memperoleh nilai 95.00. *keempat*, standar sarana dan prasarana SMA Don Bosco memperoleh nilai 95, SMA 1 memperoleh nilai 93.33 dan SMA 3 memperoleh nilai 90.00. *Kelima*, standar pembiayaan SMA Don Bosco memperoleh nilai 97, SMA1 memperoleh nilai 90.00 dan SMA 3 memperoleh nilai 94.00.

Pertanyaan yang menarik diajukan adalah apakah potensi keragaman etnik dan agama yang disebutkan sebelumnya berimplikasi pula terhadap beberapa keunggulan tersebut? Tentu saja isu ini membutuhkan penelitian tersendiri. Hanya saja jika dihubungkan dengan beberapa kisi-kisi instrumen akreditasi, tampak bahwa keragaman tersebut telah ikut menaikkan nilai akreditasi SMA Don Bosco. Meski hanya terbatas pada aspek standar kompetensi lulusan.

Dari 25 butir instrumen akreditasi untuk standar kompetensi lulusan, setidaknya terdapat 5 butir instrumen yang secara eksplisit memuat unsur keragaman. *Pertama*, disebutkan bahwa “Siswa memperoleh pengalaman untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya” (http://www.ban-sm.or.id/uploads/6_Instr_Lampiran.pdf diakses tgl 24 nopember 2013). Kegiatan ini sebagaimana di sekolah-sekolah lain diinisiasi oleh guru seni budaya yang dalam pengembangannya digerakan oleh OSIS dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler termasuk kegiatan seni budaya. Pada point tersebut pelajar SMA Don Bosco telah menunjukkan prestasinya untuk tingkat kota Padang, dengan diraihinya juara 1 lomba baca puisi oleh Afra Nisa Efi (Islam) pelajar akselerasi senior pada semester ganjil tahun pelajar 2012/2013 (http://donbosco-pdg.sch.id/?page_id=10 diakses tanggal 3 Desember 2013 jam 06.00). Prestasi ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa “SMA Don Bosco memfasilitasi siswanya untuk mengekspresikan diri dalam kegiatan seni dan budaya”.

Kedua “Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasi karya seni dan budaya”. Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika ada peringatan ulang tahun sekolah dan momen-momen tertentu seperti pada pembukaan *education Fair* yang baru-baru ini diadakan. Siswa dari berbagai daerah dengan khazanah seni budayanya dapat menampilkan atraksi budayanya untuk memeriahkan acara dimaksud. Tidak hanya sampai di situ. Pada ajang kompetisi pelajar-pelajar SMA telah membuktikannya dengan diraihinya juara 2 English Solo Song Festival tingkat Kota Padang oleh Raisa, pelajar kelas XII IPA-3. Di samping itu SMA Don Bosco sendiri pernah menjadi tuan rumah Singing Contest Bunkasai (budaya Jepang) dan Anime Bunkasai untuk tingkat kota Padang. Pada Singing Contest Bunkasai (budaya Jepang), Vinda Sandra Kivano, pelajar kelas X SMA Don Bosco mendapat juara I sementara untuk Anime

Bungkasai Irvansyah kelas XI IPA-4 memperoleh juara II. Yang tampak unik adalah bahwa semua kegiatan di atas diikuti oleh pelajar dari beragam etnik dan agama. Afra Nisa Efi, Raisa dan Irvansyah sendiri misalnya adalah pelajar Muslim yang menunjukkan dedikasi dan kebolehnya pada sekolah Kristen. Sementara Vinda Sandra Kivano adalah pelajar Kristen yang berdedikasi untuk sekolah dan agamanya.

Ketiga, “Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.” Untuk kegiatan ini selain membiasakan dan mewajibkan pergi melawat bila ada kemalangan termasuk juga pergi melihat bila ada di antara komponen sekolah tanpa melihat perbedaan suku dan agama, juga membiasakan pelajar dalam kegiatan upacara bendera dan kegiatan yang bernuansa kepedulian sosial. Misalnya gotong royong bersama masyarakat yang baru-baru ini berlangsung di Jalan Khairil Anwar, sekitar sekolah. Dalam struktur OSIS kegiatan tersebut diakomodasi pada seksi Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS). Kelompok ini sengaja dimunculkan karena daerah Sumatera Barat apalagi kota Padang termasuk daerah rawan bencana. Bersama tim Basarnas mereka mensosialisasikan cara-cara agar terhindar dari bencana dan penanggulangannya. Hanya saja pada tingkat yang lebih operasional kegiatan di atas sudah diambil alih oleh Remapala (Remaja Pencinta Alam) meski di antara anggotanya sebagian juga menjadi pengurus seksi KSBS. Lembaga sukarela bentukan pelajar-pelajar SMA Don Bosco dari beragam etnis dan agama ini dari segi dana maupun operasionalisasi kegiatan bersifat independen, tanpa dukungan dari pihak sekolah, Hanya saja pada tingkat yang lebih operasional kegiatan di atas sudah diambil alih oleh Remapala (Remaja Pencinta Alam) meski di antara anggotanya sebagian juga menjadi pengurus seksi KSBS. Lembaga sukarela bentukan pelajar-

pelajar SMA Don Bosco dari beragam etnis dan agama ini dari segi dana maupun operasionalisasi kegiatan bersifat independen, tanpa dukungan dari pihak sekolah. Ketika banjir bandang melanda kota Padang, 24 Juli 2012, pelajar-pelajar SMA Don Bosco dari beragam etnik dan agama ini bahu-membahu menghimpun dana, pakaian bekas, makanan dan minuman untuk disumbangkan kepada para korban (AWP dan CRR, *wawancara*, 22 Nopember 2013).

Keempat, “Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat”. Ini sebagaimana yang disyaratkan dalam instrumen akreditasi setidaknya terlihat pada hampir 80.% silabus pendidikan kewarganegaraan dan IPS SMA Don Bosco memuat kegiatan pembelajaran dan kemampuan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain di dalam masyarakat. Untuk silabus pendidikan kewarganegaraan misalnya pada bab Pancasila sebagai ideologi terbuka dibicarakan berbagai hal yang terkait dengan bagaimana memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Di antara sub temanya adalah sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka; menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai permusyawaratan/perwakilan dan nilai-nilai keadilan sosial. Pada sub bab sistem pemerintahan juga dibicarakan misalnya tentang sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia.²² Meskipun dalam silabus misalnya berbicara tentang peranan pers dalam masyarakat demokrasi, namun selalu saja dalam relasinya dengan masyarakat dan pemerintah.

Dan yang paling penting, *kelima* adalah, “siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global”. Hal

22. Lihat, daftar isi silabus pendidikan kewarganegaraan SMA kelas XII yang juga menjadi pedoman bagi SMA Don Bosco

ini dibuktikan dengan sikap mereka yang pada umumnya akan menghadiri undangan pernikahan dari teman atau kenalan yang berbeda suku dan agama (pelajar Muslim 89.15 %, pelajar Katolik 92 %, pelajar Protestan 100 %. Sedikit sekali di antara mereka yang tidak mau menghadiri (pelajar Muslim 1.20 %), ragu-ragu (pelajar Muslim 7.22 %, pelajar Katolik 04.00 %) atau tidak menunjukkan sikap terhadap hal tersebut (pelajar Muslim 1.20 %, pelajar Katolik 2.66 %). Selain itu, mereka juga akan pergi melayat manakala ada teman atau kenalan yang berbeda suku dan agama meninggal dunia. (pelajar Muslim 87.95 %, pelajar Katolik 92 %, pelajar Protestan 93.10 %. Hanya 2.40 % pelajar Muslim, 1.33 % pelajar Katolik yang tidak pergi melayat. Pada sisi lain seluruh pelajar Protestan menyatakan kesetujuan mereka untuk pergi melayat. Meski masih tetap ada di antara mereka yang menunjukkan sikap ragu-ragu (3.61 % pelajar Muslim dan pelajar Katolik 1.33 %) atau tidak menentukan sikap sama sekali (pelajar Muslim 3.61 % dan pelajar Katolik 5.33 % dan pelajar Protestan 6.89 %).

Menghadiri undangan pernikahan dari teman atau kenalan yang berlainan suku dan agama

a. Pelajar Muslim

No	Sikap	Jumlah	Persentase
01	Menghadiri	74 orang	89.15 %
02	Tidak menghadiri	1 orang	1.20 %
03	Ragu-ragu	6 orang	7.22 %
04	Tidak tahu	1 orang	1.20 %
05	Kosong	1 orang	1.20 %
	Total	83 orang	

b. Pelajar Katolik

No	Sikap	Jumlah	Persentase
01	Menghadiri	69 orang	92 %

02	Tidak menghadiri		
03	Ragu-ragu	3 orang	4 %
04	Tidak tahu	2 orang	2.66 %
05	Kosong	1 orang	1.33 %
	Total	75 orang	

c. Pelajar Protestan

No	Sikap	Jumlah	Persentase
01	Menghadiri	29 orang	100 %
02	Tidak menghadiri	-	
03	Ragu-ragu	-	
04	Tidak tahu	-	
05	Kosong	-	
	Total	29 orang	

Melayat, bila teman atau kenalan yang berbeda suku dan agama meninggal dunia?

a. Pelajar Muslim

No	Sikap	Jumlah	Persentase
01	Pergi melayat	74 orang	87.95 %
02	Tidak pergi melayat	2 orang	2.40 %
03	Ragu-ragu	3 orang	3.61 %
04	Tidak tahu	3 orang	3.61 %
05	Kosong	1 orang	1.20 %
	Total	83 orang	

b. Pelajar Katolik

No	Sikap	Jumlah	Persentase
01	Pergi melayat	69 orang	92 %
02	Tidak pergi melayat	1 orang	1.33 %
03	Ragu-ragu	1 orang	1.33 %
04	Tidak tahu	4 orang	5.33 %
	Total	75 orang	

c. Pelajar Protestan

No	Sikap	Jumlah	Persentase
01	Pergi melayat	27 orang	93.10 %
02	Tidak pergi melayat		
03	Ragu-ragu		
04	Tidak tahu	2 orang	6.89 %
05	Kosong		
	Total	29 orang	

Jika sikap toleran secara teoritis muncul dari pengalaman (www. peace-generation.org, diakses 22 Oktober 2013), maka berbagai latar belakang keragaman pengalaman pelajar SMA Don Bosco di atas telah membuktikan hal tersebut. Apakah gejala yang berlawanan dengan beberapa hasil riset sebelumnya yang menyebutkan bahwa pelajar-pelajar sekolah umum cenderung eksklusif dan radikal ini, menunjukkan bahwa sikap toleran mereka muncul karena kurangnya pengetahuan keagamaan? Jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar dari sekolah khusus keagamaan tentu saja ia apalagi akses mereka untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan tersebut hanya 2 jam dalam seminggu. Namun mereka tak hanya mencukupkan diri dengan belajar agama di sekolah. Sebagai bukti 93.97 % pelajar Muslim, 74.66 % pelajar Katolik dan 89.65 % pelajar Protestan masih menambah pengetahuan keagamaan di luar sekolah. Bahkan umumnya mereka masih menambah pengetahuan tentang masalah keyakinan atau akidah (pelajar Islam 44.57 %, pelajar Katolik 44 % dan Protestan 55.17 %) yang biasanya ditujukan untuk memperkuat identitas. Dari kerangka ini tampak bahwa sikap toleran tak berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman namun lewat data-data di atas cukup berakar pada pengalaman

D. Mengalami untuk Menjadi Multikulturalis

Dalam teori konstruksi sosial dinyatakan bahwa realitas dibentuk secara sosial. Teori ini menekankan tentang realitas keadaan dan

pengalaman tentang sesuatu diketahui dan diinterpretasikan melalui aktivitas sosial. Juga disebutkan bahwa masyarakat adalah produk manusia dan antara masyarakat dan manusia terjadi dialektika dalam proses pencarian makna, memperoleh makna kehidupan dari proses dialektika tersebut melalui tiga tahap yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Irwan Abdullah, 2010)

I. Penyesuaian Diri dengan Keragaman

Eksternalisasi merupakan sebuah proses atau ekspresi diri manusia di dalam membangun tatanan kehidupan (Irwan Abdullah, 2010). Ekspresi tersebut meliputi respon mental dan perilaku yang berusaha untuk mengatasi dan menguasai kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya baik berupa ketegangan-ketegangan, frustrasi dan konflik-konflik. Hal ini dimaksudkan supaya terjadi keselarasan antara tuntutan dari dalam diri dengan tuntutan atau harapan dari lingkungan tempat tinggal. Dalam bahasa lain proses ini sering disebut sebagai proses penyesuaian diri.

Penyesuaian diri dapat diartikan sebagai proses adaptasi, konformitas, penguasaan, dan kematangan emosional. Ia lebih merupakan proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi penyesuaian dengan lingkungannya. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami stres atau depresi akibat kegagalan mereka dalam melakukan penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan yang ada dan kompleks. Di sinilah pentingnya pendidikan termasuk juga pengalaman baik dalam keluarga, lingkungan sosial/tempat tinggal sebagai media bagi proses penyesuaian diri. Makna keberhasilan pendidikan seseorang terletak pada sejauh mana yang telah dipelajari atau dialaminya itu dapat membantu dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan lingkungannya. Kondisi fisik, mental dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan

yang kemungkinan akan berkembang ke proses penyesuaian yang baik atau tidak baik (Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, 2012)

Pengalaman awal ketika pertama kali masuk ke lingkungan SMA Donbosco Padang yang sangat beragam dari segi etnik maupun agama, bagi pelajar Muslim yang kaya dengan pengalaman keragaman dianggap “biasa-biasa saja”. CRR, AU RA dan IJ yang sama-sama berasal dari SMP Frater yang terbuka bagi keragaman etnik dan agama ini menganggap tak ada sesuatu yang berubah dengan diri mereka ketika berada di lingkungan SMA Don Bosco. Mereka merasa dekat dengan semua terutama dengan teman-teman yang berbeda suku dan agama sama seperti ketika masih belajar di SMP Frater dahulu. Mereka beralasan mungkin karena sudah terbiasa dengan hal tersebut. Namun hal yang sama tak dialami oleh NM. Ia merasakan adanya perasaan “sedikit beda” dengan yang lain. Namun apakah perasaan tersebut berakar pada nilai-nilai budaya atau pandangan--pandangan keagamaan? Ia menjawab “lebih karena kurang terbiasa dengan hal tersebut”. Ini terlihat ketika NM tampak kebingungan dan merasa asing saat peneliti mencoba mengelaborasi lebih jauh apakah kecanggungan tersebut berakar dalam pandangan-pandangan keagamaan. Misalnya pengaruh dari klaim normatif keagamaan bahwa “sesungguhnya agama yang paling mulia dan diridhai di sisi Allah adalah Islam”. NM yang meski tinggal di lingkungan yang berbeda suku dan agama ini, tetap merasakan kecanggungan tersebut karena ia berasal dari sekolah umum yang kurang memiliki teman-teman yang berbeda etnis dan agama. “Paling kalau ada yah satu dualah pak” ungkapnya mengalas kecanggungan tersebut. Selebihnya mayoritas beragama Islam termasuk guru-guru yang mengajar dengan seragam busana muslimah bagi yang perempuan.. tutur mantan siswi SMP 12 Padang ini (CRR dan NM, *wawancara*, 13-10-2013, AU RA dan IJ, *wawancara*, 03-11-2013).

Tidak hanya NM, AWP (pelajar Kristen) juga merasakan perasan sedikit berbeda dengan yang lain tersebut meski sebelumnya sama seperti CRR, AU RA dan IJ yang juga bersekolah di SMP Frater. Hanya saja berbeda dengan NM, perasaan beda tersebut memang berakar pada nilai. Namun nilai yang dimaksud juga bukan bersumber pada agama, melainkan pada budaya. Ia berasal dari Jawa, dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi kultur Jawa. Sehari-hari terbiasa berbicara lembut. Agak merasa tidak pas menurutnya ketika mendengar teman-temannya dari etnis Batak misalnya yang bersuara agak keras. Baginya perbedaan agama tidak terlalu dihiraukan dan di SMA Don Bosco hal tersebut dirasakannya tidak menonjol. Meskipun begitu, baik NM maupun AWP hanya merasakan hal tersebut pada tahun awal bersekolah di SMA Don Bosco. Pada tahun-tahun berikutnya mereka mengaku sudah bisa menyesuaikan diri terutama dengan teman-teman yang berbeda suku dan agama. AWP menambahkan, “ya dicoba menyesuaikan. Kalau kita sudah tahu suaranya keras, ya dipahami sajalah” mengambil contoh karakter teman-temannya dari etnis Batak (AWP, *wawancara*, 19-10-2013)

Namun perasaan serupa tidak dialami oleh teman AWP yang lain, BAT dan H. Kedua pelajar Kristen ini sama dengan CRR, AU RA dan IJ (pelajar Muslim) tidak merasakan perasaan beda tersebut. Menurut BAT, “kita ini kan dari Indonesia bhinneka tunggal ika yang memang sudah beragam” jadi walaupun kita memang sudah tahu teman-teman berbeda suku dan agama, tapi itu tak menimbulkan perasaan beda. Kita kan sama-sama belajar” ungkapnya. Malah senada dengan BAT, H menilai bahwa perbedaan tersebut tidak menonjol di SMA Don Bosco karena semua siswa dengan atribut yang sama (misalnya perempuan tidak ada yang berjilbab) dan diperlakukan sebagai teman. Sehingga kadang-kadang menurutnya kita tidak tahu apa suku dan agama dari teman-teman tersebut (BAT

dan H, *wawancara*, 19-10-2013). Kita baru tahu dan perbedaan mulai tampak ulas AWP, ketika berdoa sebelum pelajaran dimulai sesuai dengan bacaan dan cara agama masing-masing. Perbedaan juga tak terelakan saat belajar agama di mana pelajar berhimpun sesama agama dan diajar oleh guru agama masing-masing atau saat peringatan hari-hari keagamaan. Selebihnya hari-hari mereka lebih banyak diwarnai oleh ikatan kebersamaan.

Sama dengan CRR, AU RA dan IJ, H dan BAT juga berasal dari sekolah yang terbuka bagi keragaman. H, keturunan Tionghoa ini berasal dari SMP Maria salah satu SLTP yang berada dalam naungan Yayasan Proyoga Padang. Sehari-hari tinggal bersama keluarga di Jondul Rawang, Padang, lingkungan yang sangat beragam juga. Silaturahmi pada hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dengan tetangga yang beragama Islam sudah biasa ia lakukan. Sementara BAT, meski tinggal di lingkungan mayoritas muslim, tetapi tidak merasa terasing dalam lingkungan tersebut. Sehari-hari ia biasa bergaul dengan teman atau tetangganya yang muslim. Pulang atau pergi ke sekolah terkadang di antar oleh teman-temannya yang muslim. Ini dibenarkan sang ayah, YH yang sehari-hari bekerja pada sebuah rumah sakit swasta terkenal di kota Padang yaitu Yos Sudarso. Ketika lebaran Idul Fitri datang menurut bapak dua anak ini, ia bersama anggota keluarga selalu menyempatkan diri untuk silaturahmi ke rumah tetangganya yang muslim. Ia juga ikut menyumbang pembangunan mesjid di lingkungannya. Saat idul kurbanpun ia sering kebagian daging kurban. Hanya saja pada saat hari-hari besar keagamaannya seperti Natal dalam tiga tahun terakhir sangat sedikit tetangganya yang muslim datang ke rumah. Namun ia mengakui, mungkin karena ada kesepakatan (maksudnya fatwa MUI) begitu, sehingga ia mengerti juga mengapa tetangganya kurang merespon hari-hari besar keagamaannya (YH, *wawancara*, 18-10-2013).

Apakah dalam proses penyesuaian diri mereka memiliki kiat-kiat khusus agar saling diterima oleh teman-teman yang berbeda suku dan agama misalnya dengan mempelajari bahasa yang mereka gunakan? Kalau menyangkut bahasa daerah atau etnik masing-masing pada dasarnya baik pelajar Muslim maupun pelajar Kristen berusaha untuk saling memahami dan saling menyesuaikan. AU RA dan IJ misalnya berusaha untuk mempelajari dan mengucapkan bahasa teman-teman etnis Cina di Kampong Pondok. Sebaliknya, teman-teman tersebut menurut mereka juga berusaha mempelajari dan mengucapkan bahasa mereka yaitu bahasa Minang. Walaupun sering salah-salah dalam pengucapan dan belum tentu paham dengan bahasa masing-masing, namun mereka sudah saling membiasakan dalam pergaulan sehari-hari. Sementara CRR dan NM tak sampai sejauh itu. Mereka lebih sering menggunakan bahasa nasional saja, bahasa Indonesia. Untuk menambah keakraban dengan teman-teman yang berbeda suku dan agama mereka lebih senang dengan bahasa gaul saja seperti “lu” atau “lho” untuk lawan bicara dan “gua” sebagai akunya subjek bicara. Sebaliknya, pelajar Kristen juga mengaku begitu. Lalu bagaimana dengan bahasa khas keagamaan? Bagi AU RA, mengucapkan salam ala Islam, “assalamu’alaikum” tidak hanya ia tujukan terhadap teman-temannya yang beragama Islam, tetapi juga terhadap teman-teman yang beragama Kristen. Sebaliknya, teman-temannya tersebut juga melakukan hal yang sama. AWP (pelajar Kristen) membenarkan hal tersebut. Di samping memiliki rasa ingin tahu dan berusaha mempelajari bahasa etnik teman-temannya, ia juga sering mengucapkan “Assalamualaikum” sambil bercanda untuk menambah keakraban dengan teman-teman muslim, meski tidak semuanya senang dengan ucapan tersebut. Namun CRR, NM dan IJ tidak melakukan hal serupa. Menurut IJ, “kan terlarang mengucapkan “assalamu’alaikum” terhadap teman-teman non muslim. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan teman-teman tersebut, ia hanya menyebut nama saja saat bertemu

atau berpapasan.” (IJ, wawancara 13-10-2013). Sementara, BAT dan H, (pelajar Kristen) lain lebih senang mengucapkan salam gaul saja. Misalnya kalau ketemu. Hoi, halo.....! Mengapa tidak seperti Alvia? Menurut BAT dan H, hal tersebut terlalu formal dan kaku.

Apakah dengan semuanya ini kemudian ruang gerak mereka jadi terbatas? Apakah perbedaan-perbedaan etnik, agama dan bahasa membuat interaksi mereka terkotak-kotak? Pada dasarnya baik pelajar Muslim maupun pelajar Kristen menjawab “tidak”. Tapi tergantung kecenderungan masing-masing teman juga ulas CRR; ada yang terbuka dan ada yang agak tertutup. Ia melihat teman-temannya dari etnis Tionghoa agak cenderung tertutup dan membatasi pergaulan. Hanya saja mereka mengakui bahwa kedekatan hubungan dalam pergaulan terkadang ditentukan juga oleh ikatan-ikatan primordial kesukuan dan keagamaan. Lebih dari itu, yang tersembunyi dan tak terkatakan menurut MHA yang baru 1 tahun ini menjadi alumni SMA Don Bosco adalah bahwa kesuksesan dalam menjalin interaksi ditentukan juga oleh status sosial; kekayaan dan jabatan orang tua. “kalau orang tuanya kaya apalagi mempunyai jabatan penting pula, maka mereka (maksudnya teman-teman yang tampak tertutup tersebut) akan mendekat. Menurut MHA, perbedaan etnik dan agama tidak terasa di lingkungan sekolah tersebut (MHA, wawancara, 02-11-2013).

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa *pertama*, pelajar yang memiliki latar belakang keragaman etnik dan agama baik dari kalangan Muslim maupun Kristen tampak lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan keragaman yang baru. Itulah yang ditunjukkan oleh CRR, AU RA, IJ, BAT dan H. meskipun begitu mereka tetap memegang nilai-nilai tertentu dalam pergaulan seperti sikap IJ yang tidak mau mengucapkan “assalamu’alaikum” terhadap teman-teman yang beragama lain. Sebaliknya, kekurangan pengalaman keragaman tampak menjadi salah satu kendala dalam

proses penyesuaian seperti yang dialami oleh NM walau hal tersebut dirasakannya pada tahun pertama. Tetapi tidak lantas latar belakang keragaman tersebut memudahkan semua pelajar untuk melakukan proses penyesuaian diri seperti yang dialami oleh Alvian. Kultur Jawa yang terbiasa berbicara lembut memunculkan perasaan sedikit beda ketika harus menyesuaikan diri dengan teman-temannya yang bersuara agak keras meski sebelumnya berasal dari sekolah multikultural. Di sini tampak proses pembiasaan yang menjadi langkah awal dari pelebagaan atau proses pembudayaan dapat mengendalikan dan mengatur perilaku individu (Irwan Abdullah, 2010).

Kedua, dari sudut komposisi berdasarkan agama mayoritas pelajar SMA Don Bosco adalah pelajar Kristen (52,52%). Sementara pelajar Muslim menjadi minoritas kedua (41,91 %) setelah pelajar Kristen. Namun dalam proses penyesuaian diri tidak hanya kelompok minoritas yang berusaha menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas seperti yang ditunjukkan oleh AU RA (pelajar Muslim) tapi juga dilakukan oleh kelompok yang secara kultural mayoritas seperti yang dilakukan oleh AWP. Hal ini menunjukkan bahwa tak selamanya kelompok minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan dari golongan mayoritas (Koentjaraningrat, 2009). Temuan ini memperlihatkan bahwa kelompok yang budayanya mayoritas juga berusaha melakukan hal yang sama. Meski tak semua mereka melakukan hal tersebut baik kelompok yang mayoritas secara budaya maupun minoritas secara budaya. Hal ini sekaligus membantah teori bahwa dalam posisi seperti itu proses penyesuaian budaya akan cenderung kearah asimilatif. Bila intensitas pergaulan ini berlangsung dalam waktu lama bukan tidak mungkin lambat laun golongan minoritas akan kehilangan kepribadian kebudayaannya sehingga masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.

2. Penerimaan keragaman

Sedangkan objektivasi merupakan suatu proses bagaimana menjadikan suatu tatanan kehidupan yang dibangun manusia sebagai suatu realitas yang terpisah dengan subjektivitasnya. Dalam konteks ini terjadi proses pelembagaan atau institusionalisasi dunia intersubjektif. Proses-proses pembiasaan disebut-sebut sebagai langkah awal dari pelembagaan. Tindakan-tindakan berpola yang sudah dijadikan kebiasaan, membentuk lembaga-lembaga yang merupakan milik bersama. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian mengendalikan dan mengatur perilaku individu (Irwan Abdullah, 2010).

Nilai-nilai budaya yang hadir dan menjadi penyangga keragaman dalam realitas sosial dapat ditemukan dalam berbagai basis kebudayaan seperti dalam lembaga-lembaga sosial, ajaran-ajaran agama, mitos-mitos, simbol dan praktek sosial lainnya. Nilai-nilai ini bersifat objektif karena kebudayaan adalah milik bersama. Berbagai nilai budaya di atas diobjektivasikan dan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Jika dioperasionalkan terhadap problem riset ini maka objektivasi lebih dimaknai sebagai proses penerimaan terhadap keragaman atau perbedaan yang melibatkan kesadaran eksternal maupun internal. Perbedaan apalagi yang berakar pada nilai dan ideologi tidak mudah untuk dipahami dan diterima. Ia membutuhkan kesadaran eksternal maupun internal tersebut. Lalu bagaimana pelajar SMA Don Bosco dapat menerima keragaman etnik dan agama pada lingkungan sekolah tersebut? Pertanyaan penelitian ini akan digali dalam tiga aspek; pertama rekognisi, kedua representasi dan ketiga redistribusi.

a) **Rekognisi; Toleransi dan Keterbukaan Nilai**

Rekognisi dapat dipahami sebagai pengakuan atau penghargaan terhadap keragaman. Pada tingkat politik formal rekognisi dapat

dilihat dari sejauhmana negara pada tingkat pusat atau daerah menghormati dan mengakui berbagai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Pengakuan tersebut setidaknya tereskpresi pada konstitusi dan kebijakan negara yang menegaskan jaminan konstitusi tersebut.²³ Sementara itu, dalam pergaulan sehari-hari ukuran rekognisi dapat dilihat dari sejauhmana entitas-entitas plural dalam masyarakat menghormati dan mengakui berbagai perbedaan dan keragaman dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, penerimaan pelajar Mulsim dan Kristen SMA Don Bosco terhadap keragaman etnik dan agama tercermin dalam bentuk sikap toleransi dan sikap inklusif. Sikap toleran tersebut tampak ketika peneliti memunculkan pertanyaan “bagaimana sikap adik-adik bila ada undangan pernikahan dari teman atau kenalan yang berlainan suku dan agama”? mereka menjawab akan “menghadiri”. CRR, AU RA dan IJ menyebut hal tersebut sebagai wujud saling menghargai dan untuk menjaga kebersamaan. “Segan kalau tidak pergi karena sudah merasa seperti keluarga besar.” Ungkap AU RA. Lalu bagaimana dengan makanan? CRR menimpali, “kan kita dapat memilih misalnya ikan atau udang tanpa harus bertanya soal mana makanan yang halal dan yang haram dalam kenduri tersebut. Jadi kita saja yang menyadari hal itu” (CRR, *wawancara*, 13-10-2013). NM juga menjawab “akan menghadiri” walaupun belum pernah mendapat undangan kenduri dari teman atau kenalan yang berbeda suku dan agama. Ia juga ragu apakah akan memakan atau tidak makanan dalam acara kenduri tersebut. Sebaliknya, dikalangan pelajar Kristen yang tidak memiliki aturan khusus dalam soal makanan kecuali Kristen Advent

23. Zainal Abidin Bagir dkk, *op.cit.*, h. 42. Pengakuan tersebut bukan hanya dalam konteks hak-hak sipil dan politik, melainkan juga pada hak-hak sosial, ekonomi dan kultural termasuk pengakuan dan penghormatan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Juga penghormatan pada identitas budaya dan hak tradisionalnya.

juga memberikan jawaban yang sama, “akan menghadiri”. Sama seperti pelajar Muslim, mereka beralasan “segan kalau tidak pergi apalagi teman dekat. hal itu merupakan bagian dari toleransi dan rasa kemanusiaan karena sudah merasa sama-sama”(BAT dan H, *wawancara*, 19-10-2013).

Lalu bagaimana pula bila teman atau kenalan yang berbeda suku dan agama meninggal dunia? Mereka juga sepakat menjawab “pergi melayat”. Sama dengan alasan di atas, ini juga bahagian dari rasa kemanusiaan dan kebersamaan. Tradisi pergi melayat rupanya juga merupakan kewajiban sekolah ketika ada di antara komponen sekolah mengalami musibah; baik guru, teman atau karyawan sekolah semua akan pergi melayat. Baru-baru ini mereka baru saja kehilangan salah seorang guru senior pada sekolah tersebut, ibu Yenita guru Bahasa Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum.

Jika hal di atas merepresentasi sikap toleran, maka mereka telah menunjukkan makna toleransi yang substansial yaitu kesiapan dan kemampuan batin untuk kerasan bersama orang lain yang berbeda secara hakiki meski jelas terdapat konflik dengan pemahaman mereka tentang apa yang baik dan jalan yang layak. Menjadi toleran adalah membolehkan/membiarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri, menghargai orang lain, asal usul dan latar belakang mereka selalu bermakna menolak membicarakan pada orang lain apa yang harus ia lakukan dan bukan keinginan untuk mempengaruhi mereka agar mengikuti ide kita dan demi kemajuan tertentu (Zakiyuddin Baidhawiy, 2005).

Mereka juga bersikap inklusif, saling terbuka dalam mendiskusikan nilai-nilai tertentu dari agama masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga saling pengertian dan persamaan sehingga dengan begitu masing-masing mengetahui persamaan dan perbedaan di antara mereka dan dapat pula menentukan sikap

terhadap persamaan dan perbedaan tersebut. Pelajar Muslim pernah menanyakan pada teman-teman Kristen tentang masalah keyakinan pada Tuhan Yesus (IJ); tentang ibadah dan apa saja larangan dalam agama Kristen; tentang makanan apa yang boleh dimakan (NM) bahkan bertanya apakah benar orang Kristen menyembah berhala (CRR)? Sebaliknya, Pelajar Kristen juga sering menanyakan soal-soal keislaman; tulisan bahasa Arab itu seperti apa (AWP); Mengapa dalam Islam ada makanan yang haram (H); bagaimana puasa dalam Islam (BAT). Namun hal tersebut memang masih sebatas keingintahuan tidak dalam bentuk diskusi-diskusi kelompok atau yang lebih terorganisir dan mendalam. Jika hal ini masih dalam kerangka toleransi, maka inilah yang disebut dengan toleransi dalam bentuknya yang solid yang mengandung dialog untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan perbedaan serta saling pengakuan. Ini berbeda dengan toleransi dekoratif yang tidak memuat komitmen dan hanya puas dengan dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu pasif dalam mempertemukan kebaikan (nilai) di antara mereka. (Ibid) Dalam proses demokratisasi yang semakin nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, sikap toleransi semakin niscaya untuk merawat kebhinnekaan yang juga semakin nyata dan transparan.

b) Representasi Substantif

Sebagaimana rekognisi, representasi atau keterwakilan juga diperlukan dalam sebuah keragaman. Ia diperlukan untuk menghadirkan dan mempertemukan aspirasi warga yang beragam di ranah publik termasuk pada institusi pendidikan. Untuk itu representasi mensyaratkan partisipasi, keterlibatan dan keterwakilan aspirasi yang beragam tersebut dalam proses pengambilan keputusan tentang hidup bersama dan setelah itu akan diikuti oleh kontestasi ide-ide yang akan dipilih melalui mekanisme pemilihan. Dari kerangka ini setidaknya terdapat 4 konsep representasi; *pertama*, representasi formalistik yang dijalankan oleh lembaga perwakilan

formal (parlemen). *Kedua*, representasi simbolik yang meliputi keterwakilan terutama kultural dan kepercayaan. Tingkat keterwakilannya dilihat sebagai tingkat penerimaan dari orang atau kelompok yang diwakilinya. *Ketiga*, representasi deskriptif adalah tingkat kemiripan antara yang mewakili dengan yang diwakili. Kemiripan meliputi kesamaan berbasis kewilayahan, komunitas, kelompok dan gender. *Keempat* representasi substantif yaitu aktifitas memperjuangkan kepentingan tertentu yang direpresentasikan dalam ranah publik. Tingkat keterwakilan dapat dilihat dari sejauhmana wakil dapat memperjuangkan kepentingan yang diwakili (Zainal Abidin dkk, op.cit)

Lalu bagaimana politik representasi dikalangan pelajar Muslim dan Kristen SMA Don Bosco? Dalam persepsi pelajar Muslim dan Kristen SMA Don Bosco, teman-teman dan guru-guru yang berbeda suku dan agama adalah ruang kebersamaan. Belajar bersama teman-teman dan diajar oleh guru yang berbeda suku dan agama sudah menjadi tidak hanya menu harian tapi juga menu tahunan. Apalagi bagi yang berasal dari sekolah yang terbuka dan beragama. Sehingga tampak tidak relevan pertanyaan, "bagaimana perasaan adik-adik ketika belajar satu ruangan dengan teman-teman yang berbeda suku dan agama". Sama tidak relevannya dengan pertanyaan, "Bagaimana pula perasaan adik-adik ketika diajar oleh guru-guru yang berbeda suku dan agama". Bagi mereka yang penting gurunya profesional; mampu membuat pelajarinya mengerti dengan pelajaran yang disampaikan. (BAT, pelajar Kristen). CRR (pelajar Muslim) menambahkan, "itu kan sama saja dengan sekolah umum yang untuk mata pelajaran umum juga mungkin akan diasuh oleh guru yang tidak satu etik dan agama dengan para murid serta belajar agama dengan guru agama masing-masing."

Begitu juga dengan siapa yang akan menjadi ketua kelas. Mereka tidak lagi mempersoalkan siapa mewakili siapa dalam warna

kesukuan dan keagamaan. Jika terhadap guru-guru mereka berharap kompetensi dan profesionalitas, maka untuk ketua kelas mereka mensyaratkan, “yang penting bisa memimpin, bertanggung jawab dan dapat merangkul. CRR sendiri (pelajar Muslim) sudah dua kali menjadi ketua kelas selama bersekolah di SMA Don Bosco.

Lalu bagaimana dengan kepengurusan OSIS sebagai satu-satu organisasi intra sekolah yang mengorganisir berbeagai kegiatan pelajar termasuk kegiatan ekstrakurikuler? Secara normatif, dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) memang mensyaratkan beberapa hal di antaranya “Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; memiliki budi pekerti luhur dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman; memiliki bakat sebagai pemimpin siswa; dan memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai ([http://osissmadbpdg.wordpress.com/category/acara-osis/ diakses tanggal 3 Nopember 2013](http://osissmadbpdg.wordpress.com/category/acara-osis/)). Dan tidak ada persyaratan atau pertimbangan yang berkaitan dengan representasi gender, etnik maupun agama termasuk azas mayoritas dan minoritas. Hanya saja dalam prakteknya menurut pelajar Muslim, untuk jabatan ketua dan wakil ketua OSIS terkadang termasuk juga pengurus ini selalu dijabat oleh pelajar Kristen. AWP (pelajar Kristen) yang aktif dalam kegiatan OSIS membenarkan hal tersebut. Meski ia sendiri tidak tahu mengapa pihak sekolah selalu mengupayakan agar selalu dijabat oleh pelajar Kristen (AWP, *wawancara*, 19-10-2013). N yang sudah 10 tahun lebih mengajar di SMA Don Bosco juga membenarkan hal tersebut. “dulu ketika anaknya bersekolah di situ (tanpa menyebut tahun berapa) ada calon-calon dari pelajar Muslim yang dianggap memenuhi syarat namun tidak jadi terpilih”. Dalam proses pemilihan calon-calon formatur terkadang ditunjuk oleh pihak sekolah, meski pemilihannya dilakukan secara demokratis oleh semua pelajar. Sementara untuk jabatan di bawahnya sampai seksi-seksi terbuka bagi semua pelajar termasuk pelajar Muslim.

Meski ada ketidakpuasan terhadap hal tersebut dan berharap kalau suatu saat ketua atau wakil ketua OSIS dijabat pula oleh pelajar Muslim, mereka tak terlalu mempersoalkan masalah ini. Seperti mewakili ketidakpuasaan pelajar Muslim, CRR berujar, “kasihlah kesempatan kepada mereka. Kalau di sekolah negeri pada umumnya di kota Padang kan mereka harus mengikuti aturan Islam harus pakai jilbab dan mayoritas ketuanya ya muslim” (CRR, *wawancara*, 13-10-2013). Sebagai gambaran dapat dilihat dalam struktur kepengurusan OSIS SMA Don Bosco tahun 2011/2012 berikut:

- **Pengurus Inti**

Ketua	: Rendy (Katolik)
Wakil Ketua	: Jonathan Julian Hersade (Katolik)
Sekretaris I	: Jessica Agustine (Katolik)
Sekretaris II	: Elviani Widya Tanujaya (Katolik)
Bendahara I	: Susanti Arifin (Protestan)
Bendahara II	: Valencia Melvinsy (Katolik)

- **Seksi-Seksi :**

Seksi Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Koordinator	: Randy (Katolik)
Anggota	: Christy Hosen (Katolik)
Anggota	: Fikri Hadimas (<i>Islam</i>)

Seksi Sosial

Koordinator	: Gisela Beta B.P. (Katolik)
Anggota	: Beathrine Yumiko (Katolik)
Anggota	: Handy Putra Wijaya (Budha)
Anggota	: Davin Ivano Winggis (Katolik)

Seksi Pendidikan

Koordinator : Octrine Bethary E.S. (Katolik)

Anggota : Pheigy Taslim (Katolik)

Anggota : Melania (Katolik)

Seksi Bela Negara dan Upacara

Koordinator : Afildo Kurnia Ilahi (*Islam*)

Anggota : Osvaldo (Protestan)

Anggota : Talitha Rhinarda (*Islam*)

Anggota : Paramita Dwitiya Anindita (Islam)

Seksi Persepsi Daya Kreasi Seni(Acara & Seni)

Koordinator : Apfia Anneline Angelica (Katolik)

Anggota : Febriana N. D. (Katolik)

Anggota : Orien Luisa H. (Protestan)

Anggota : Maria Firsta Dea Lova (*Islam*)

Seksi Keterampilan dan Kewiraswastaan

Koordinator : Silvia Yunita Nduru (Protestan)

Anggota : Vito Hamzar (Katolik)

Anggota : Michael Valerie (Protestan)

Seksi Kesegaran Jasmani Dan Daya Kreasi (Olah Raga)

Koordinator : Jason J.W. (Katolik)

Anggota : Bryan Nicholas Bonsaleng (Protestan)

Anggota : Chichi Ayu Maria S. (Katolik)

Seksi Perlengkapan

Koordinator : Puja Ajunda (*Islam*)

Anggota : Yobel Gea (Protestan)

Anggota : Jeffry Handani (Katolik)
Anggota : Joshua Siahaan (Protestan)

Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Jonathan Evan Halim (Katolik)
Anggota : Wulan Arwina (*Islam*)
Anggota : Raisya Tri Melinda (*Islam*)
Anggota : Lady Nadira Rosalie (Protestan)
Anggota : Claudia Mila E.N. (*Islam*)
Anggota : Belinda Megarani (*Islam*)

Seksi Transportasi

Koordinator : Rizki Ade Putra (*Islam*)
Anggota : Gracesinta Abigael (Protestan)
Anggota : William Luis (Katolik)

Seksi ICT

Koordinator : Kelvin
Anggota : Robert Wijaya (Katolik)
Anggota : Nia Monica (*Islam*)

Seksi Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS)

Koordinator : Aldi Amran (*Islam*)
Anggota : Satrio Bhagas Yudhanto (*Islam*)
Anggota : Cicilia Shanti (Katolik)

Sebagai catatan tambahan dapat disebutkan bahwa kepengurusan OSIS dirujuk dari <http://osissmadbpdg.wordpress.com/rincian-tugas-pengurus/> diakses tgl 2 Nopember 2013 jam 60.00. Sedangkan kategori pelajar berdasarkan agama didasarkan pada informasi NM anggota seksi ICT dari kepengurusan OSIS tersebut.

c) **Redistribusi; Akses Beasiswa, Program Akselerasi dan Cerdas Istimewa**

Selain rekognisi dan representasi, sisi lain yang tak kalah pentingnya dalam menjaga keutuhan sebuah keragaman adalah redistribusi; pembagian yang berkaitan dengan masalah pemerataan dan keadilan. Isu utamanya adalah siapa menguasai atau memiliki apa dan bagaimana akses terhadap kepemilikan tersebut. Dari segi aset, jelas bahwa sekolah ini milik Yayasan Prayoga. Sebuah yayasan Katolik yang bergerak dalam bidang pendidikan yang didirikan oleh Keuskupan Padang. Namun dari segi akses, sekolah ini terbuka bagi semua segmen masyarakat termasuk dari berbagai keragaman etnik dan agama. Tentu mereka memiliki peluang yang sama dalam layanan pendidikan. Bagaimana akses mereka terhadap semua layanan pendidikan SMA Don Bosco? Baik pelajar Muslim maupun Kristen mengakui kalau SMA Don Bosco memberikan layanan yang sama terhadap semua peserta didik tanpa diskriminasi berbasis keragaman tersebut. Paling tidak terlihat dalam hal-hal yang krusial seperti pemberian beasiswa bagi yang berprestasi, akses untuk program akselerasi, percepatan proses pendidikan dalam masa 2 tahun dan program istimewa berbakat.

Sebagai gambaran untuk akses mendapatkan beasiswa, dapat dilihat pada distribusi beasiswa dari Januari 2013 – Juni 2013 berikut:

No	Nama	Agama
01	Muhammad Ichsan	Islam
02	Siska Kontantia	Islam
03	Elvi Susanti	Islam
04	Flora Dwi Dara Hexadea	Islam
05	Rita Gusniati	Islam
06	Aminah	Islam
07	Nabella Wijaya	Islam
08	Oriza Putra	Islam

09	Sonia Angelina Putri	Islam
10	Tika Yedo Saputri	Islam
11	Diana Devichairani Ady	Islam
12	Elkhaira Daravioleta	Islam
13	Fikri Hadimas	Islam
14	Puja Ajunda	Islam
15	Aulia Kautsar	Islam
16	Dhea Putri Anjani	Islam
17	Aisy Hibatullah	Islam
18	Sandro Trisno	Islam
19	Jenny	Islam
20	Ressa Octavianti	Islam
21	Cindy Faustina	Islam
22	Edo Prasetia	Islam
23	Ira Nanda	Islam
24	Jessica Cindy	Islam
25	Lentari	Islam
26	Nikyta Desrivinola	Islam
27	Sri Yuliani	Islam
28	Raphel Susanto	Islam
29	Avied Adha Mugani	Islam
30	Febriana Ningsih	Islam
31	Ramadani	Islam
32	Elisia Tania	Katolik
33	Andrew Darmawan Jacob	Katolik
35	Wisca Debora	Katolik
36	Magdalena Susanty	Katolik
37	Gisela Beta Bhinneka Putri	Katolik
38	Jonathan Julian Hersade	Katolik
39	Nova Ratna Dewi	Katolik
40	Lusi Handranto	Katolik
41	Jimmy Setiawan	Katolik
42	Yuri Agnes Weni	Katolik
43	Fernanda Dirga Udri Fatma	Katolik
44	Noni	Katolik
45	Lenny Kusuma	Katolik
46	Vinsensia Julia Japra	Katolik
47	Beathrine Yumiko	Katolik
48	Marsyensia	Katolik

49	Clara Inneke	Katolik
50	Susanti Hengteguhwati	Katolik
51	Cindy Maria	Katolik
52	Fiber Desy Wijaya	Katolik
53	Gabriel Febrian Djaja	Katolik
54	Jason Jini Wiwongso	Katolik
55	Hyasinta Salim	Katolik
56	Jonathan Evan Halim	Katolik
57	Octrine Betharry Eklesia	Katolik
58	Susanti Arifin	Katolik
59	Wibino	Katolik
60	Claudia Raditya Harianto	katolik
61	Dwi Thasya Canita	Katolik
62	Fransiskus Ospaldo	Katolik
63	Hyasintha Salim	Katolik
64	Jessica Agustine Gautama	Katolik
65	Julia Finces R	Katolik
66	Valencia Iskandar	Katolik
67	Desy Simamora	Katolik
68	Fatizonolo Laiya	Katolik
69	Aldo Welly	Katolik
70	Fransiskus Ronny Saputra	Katolik
71	Vonny Vionita	katolik
72	Paulus Joni	Katolik
73	Brigita Gloria	Katolik
74	Melissa	Katolik
75	Cynthia Stefani	Katolik
76	Monica Elisia	Katolik
77	Silvia Yunita Ndruru	Protestan
78	Cicilia Shanti Simamarta	Protestan
79	Elsa Manalu	Protestan
80	Jenifer Deborah Harefa	Protestan
81	Briant Macchristyardillan Mole	Protestan
82	Elisia	Protestan
83	Jonathan Tobing	Protestan
84	Kevin Praselia Wijaya Khairil	Protestan
85	Selpandri Gerhat Junatan	Protestan
86	Hirani	Protestan
87	Roy Meliana Eka Putri S	Protestan

88	Felicia Hariyanti U	Protestan
89	OrienLuisa Hura	Protestan
90	Ranny Magdalena Harefa	Protestan
91	Christian	Protestan
92	Michael Aditya O	Protestan
93	Liriccia Hot	protestan
94	Elviani Widya Tanujaya	Protestan
95	Niko Dwinanta Barus	Protestan
96	Yosi Christin Harefa	Protestan
97	Sri Maharani BR Ginting	Protestan
98	Siddharta Chandra	Budha

Catatan: nama-nama pelajar di atas dirujuk dari <http://donbosco-pdg.sch.id/?p=206#more-206> diakses tgl 28 oktober 2013 jam 1300. Sementara pengkategorian pelajar berdasarkan agama berdasarkan data-data pribadi Natan, guru SMA Don Bosco Padang.

Data-data di atas memperlihatkan bahwa dari segi redistribusi beasiswa pelajar Muslim memperoleh alokasi sebanyak 31 orang, pelajar Katolik sebanyak 44 orang, pelajar Protestan 21 orang dan pelajar Budha 1 orang. Jika ini dipersentasekan maka setara dengan 30.38 % untuk pelajar Muslim, 43.12 % untuk pelajar Katolik, 20.58 % dan untuk pelajar Budha 1.02 %. Kalau kemudian persentase ini dihubungkan misalnya dengan persentase total jumlah pelajar Islam (42.63 %), pelajar Katolik (36.82 %), pelajar Protestan (8.13 %) dan pelajar Budha 0.38 %, maka tampak cukup distributif untuk pelajar dari berbagai agama di atas. Meski tetap yang mendominasi adalah pelajar Katolik dan tentu menjadi wajar saja karena sekolah ini memang dikelola oleh umat Katolik. Lagi pula, beasiswa tentu tidak mempertimbangkan azas pemerataan layaknya pemberian raskin (beras miskin) dari pemerintah, melainkan karena prestasi yang diperoleh oleh yang bersangkutan. Bisa jadi pelajar Katolik lebih berprestasi dari pelajar Islam.

Selain akses untuk mendapatkan beasiswa, SMA Don Bosco juga memberikan peluang yang sama dan terbuka terhadap semua pelajar untuk menempuh proses percepatan pendidikan melalui program akselerasi. Program akselerasi adalah program percepatan

belajar yang berfungsi sebagai wadah pendidikan bagi siswa/i yang CIBI (Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa). Hal ini sesuai dengan amanah UU Pendidikan No. 2 Tahun 1989 BAB VI Pasal 24 ayat 6 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik yang mempunyai kemampuan kecerdasan luar biasa, dapat menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ketentuan ini didukung dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 054/U/1993 Pasal 15 dan 16 yang memberikan keleluasaan kepada sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program belajarnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan untuk kelas regular.

SMA Don Bosco Padang adalah salah satu sekolah yang dipercayakan pemerintah untuk menyelenggarakan program dimaksud sejak tahun pelajaran 2002/2003 dan telah menamatkan 8 (delapan) angkatan pelajar akselerasi dengan hasil Ujian Nasional yang membanggakan dan melanjutkan study di Perguruan Tinggi Negeri/Luar Negeri atau swasta yang terkenal dan berkualitas (http://donbosco-pdg.sch.id/?page_id=32 diakses tgl 3 Nopember 2013). Berikut gambaran distribusi pelajar SMA Don Bosco tahun pelajaran 2013/2014 angkatan ke XI yang mengikuti program akselerasi berbasis agama:

No	Nama	Agama
01	Andrea Dhieta Utama	Katolik
02	Cynthia Utama	Katolik
03	Felix Giovanni Virgo	Katolik
04	Galatia Arthasanauli Nainggolan	Katolik
05	Katherine	Katolik
06	Melati Ayudyah	Katolik
07	Monica Benedick	Katolik
08	Natashia Christy Viony	Katolik
09	Petrina Michelle Halim	Katolik

10	Veronika Indriani Suyadi	Katolik
11	Muhammad Prima Putra	Islam
12	Nicole Rose Marve	Islam
13	Talitha Zhafirah	Islam
14	Mitra Oktavianti Putri Gulo	Protestan
15	Eurike Yemima Sembiring	Protestan

Selain kelas akselerasi, program istimewa lainnya yang terbuka bagi keragaman siswa SMA Don Bosco adalah kelas Cerdas Istimewa (CI) yang dapat ditamatkan dalam waktu 3 Tahun. Kelas ini dibentuk untuk melayani anak –anak yang memiliki kecerdasan istimewa secara khusus dengan memiliki syarat – syarat sebagai berikut :

- Wajib mengikuti Ujian Saringan Masuk (USM) dan psiko test
- Wajib memilih satu mata pelajaran MIPA yang diminati
- Wajib mengikuti perlombaan yang direkomendasikan oleh sekolah
- Melampirkan sertifikat yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah

Siswa yang berminat belajar di kelas Akselerasi dan Cerdas Istimewa (CI) akan diperkaya dengan program plus; TOEFL *Preparation Class*, *On The Job Training*, *Field Trip* dan Pembimbing Akademis Khusus pada setiap siswa (http://donbosco-pdg.sch.id/?page_id=33 diakses tanggal 8 Nopember 2013 jam 2.00). Untuk tahun 2013/2014 ini distribusinya sebagai berikut:

No	Nama	Agama
01	Anastasia Monica Sofian	Katolik
02	Felicia Priscilla Lovely	Katolik
03	Hariyanto Susilo	Katolik
04	Inggrid Rosalia Schimidt	Katolik
05	Ivana lystia	Katolik
06	Lady Angela Tamba	Katolik
07	Loly Elia Tamba	Katolik

08	Maria Ivone Ira Djaja	Katolik
09	Patrick Aura Wibawa	Katolik
10	Rebeca Erinna Jane Eman lee	Katolik
11	Reinaldo	Katolik
12	Tama panutan Alviona	Katolik
13	Yesenia Tiofanny Halim	Katolik
14	Yudit Adythia Putra	katolik
15	Josanda Sudwisutria	Islam
16	Kintan Haura	Islam
17	M. Taufik Hidayat Nasution	Islam
18	Muhammad Ikhsan	Islam
19	Muhammad Syahreza	Islam
20	Radisti Wensy Manwa	Islam
21	Refo Gazi Romulo	Islam
22	Amelia Yesidora Suearihta Pandia	Protestan
23	Eunike Yemima Sembiring	Protestan
24	Ricardo William	Protestan
25	Risavel Abelardo Hutagalung	Protestan
26	Evelyn	Budha
27	Felita	Budha
28	Khanti Lizuardy	Budha
29	Krystle Meridian	Budha
30	Steven Sukma Limanus	Budha

3. Internalisasi Nilai-nilai Keragaman

Internalisasi merupakan proses di mana nilai-nilai umum atau realitas objektif dipelajari kembali oleh individu dan dijadikan sebagai bagian dari hidupnya. Ini menyangkut identifikasi diri individu ke dalam realitas objektif. Untuk mencapai taraf ini individu secara terus menerus berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial dan budayanya, sehingga akhirnya individu-individu dibentuk sebagai suatu pribadi dengan suatu identitas sebagai konsekwensi dari interaksi timbal balik antara apa yang dialami sebagai realitas luar dengan apa yang dialami sebagai apa yang ada pada kesadaran inividu. Dalam ungkapan lain proses inilah yang disebut sebagai sosialisasi.

Pada dasarnya sosialisasi mengandung dua pengertian, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dialami individu saat kanak-kanak sebagai bagian dari anggota masyarakat dan dianggap merupakan tatanan dasar dari sosialisasi sekunder. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah sosialisasi selanjutnya yang mengimbaskan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor-sektor baru dunia objektif masyarakat (Irwan Abdullah, 2010). Sederhananya sosialisasi primer berlangsung dalam keluarga sedangkan sosialisasi sekunder berlangsung dalam masyarakat.

Sosialisasi keragaman etnik bagi pelajar Muslim dan Kristen SMA Don Bosco sudah dimulai dan berlangsung sejak di lingkungan keluarga. Di kalangan pelajar Muslim, keragaman etnik sudah menjadi pengalaman keseharian mereka. CRR terlahir dari pasangan suami istri ayah bersuku Aceh dan ibu dari suku Batak. Karena menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka ia mengikut suku sang ayah, Aceh. Namun lahir dan dibesarkan di Padang, lingkungan kultural masyarakat Minang. NM, IJ dan AU RA meski terlahir dari ayah dan ibu beretnis Minang, tapi dari suku-suku yang berbeda dalam intern masyarakat Minang. Pola perkawinan berbeda suku tersebut mendapat legitimasi kultural dengan adanya larangan perkawinan sesama suku, eksogami. Alhasil mereka juga sebetulnya sudah mengenal perbedaan suku.²⁴

Pelajar Kristen juga begitu. H terlahir dari pasangan suami istri keturunan Tionghoa. Namum sama dengan NM, IJ dan AU RA (pelajar Muslim), juga dari suku yang berbeda dalam masyarakat Tionghoa. Ayah bersuku Lim dan ibu bersuku Tan. Ia sendiri mengikut suku ayah. AWP meski terlahir dari pasangan ayah dan ibu beretnis Jawa tapi tinggal dan dibesarkan di ranah Minang. Sementara BAT terlahir dari ayah bersuku Jawa dan Ibu

24. Diolah dari data survey tanggal 16 September 2013

Flores. Hanya saja berbeda dari semua pelajar sebelumnya, dalam keluarga besar BAT tidak hanya perbedaan etnik yang dibiasakan namun juga perbedaan agama. Ayah, YH, sampai usia SMP masih muslim dan pandai membaca Al-Qur'an. Namun karena tinggal dan sering bergaul dengan tante-tantunya yang beragama Katolik lalu memutuskan untuk masuk ke agama Katolik. Sementara nenek BAT dari pihak ayah masih tetap muslim sampai sekarang. Saudara-saudara sang ayah juga masih banyak yang muslim (YH, *wawancara*, 18-10-2013). Selain berasal dari keluarga yang berbeda suku bahkan berbeda agama seperti BAT, baik pelajar Islam maupun pelajar Kristen berasal dari sekolah yang terbuka bagi keragaman etnik dan agama. Dari terbiasa dan mengalami perbedaan etnik kini menjadi terbiasa dan mengalami langsung keragaman agama. Pelajar Muslim; CRR, AU RA dan IJ sama-sama berasal dari SMP Frater yang masih satu yayasan dengan SMA Don Bosco. NM sebenarnya juga berasal dari sekolah yang terbuka bagi keragaman, SMP umum. Hanya saja paska kebijakan pemda Kota Padang yang memberlakukan kewajiban berpakaian muslim dan muslimah bagi semua siswa dan pelajar di Kota Padang semakin sedikit saja teman-temannya yang berbeda suku dan agama. "Paling ya satu dualah pak" imbuh Nia yang berasal dari SMP 12 Padang ini (NM, *wawancara*, 18-10-2013).

Sementara dikalangan pelajar Kristen meski berbeda asal sekolah namun sekolah mereka juga terbuka bagi keragaman etnik dan agama dan satu yayasan juga dengan asal sekolah CRR, AU RA dan IJ di atas. H berasal dari SMP Maria, AWP dari SMP Frater dan BAT berasal dari SMP Yos Sudarso. Dari sosialisasi primer berlanjut ke sosialisasi sekunder, dalam masyarakat; di lingkungan sekolah.

Sosialisasi sekunder berikutnya berlangsung di SMA Don Bosco Padang. Mereka belajar bersama dengan teman-teman yang berbeda suku dan agama di ruang-ruang kelas antara 7 sampai 8 jam sehari

dan sudah berada di penghujung tahun ketiga pada sekolah tersebut. Diajar oleh guru-guru yang berbeda etnik dan agama pula. Dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut tentu ruang-ruang kelas telah menjadi lembaga yang sangat intens dalam mempertemukan semua keragaman tersebut sehingga pada akhirnya menjadi ruang kebersamaan dalam keragaman atau ruang untuk menyalurkan nilai-nilai kebersamaan. Dengan warna dan model pakaian yang sama, diikat oleh aturan dan tata tertib yang sama dan dalam posisi sama-sama belajar tak heran kalau pada akhirnya mereka tak terlalu menghiraukan perbedaan yang berakar pada etnis dan agama. Bagi pelajar SMA Don Bosco tutur CRR terdapat kebanggaan tersendiri dapat bersekolah di lingkungan seperti ini, sekolah yang mencerminkan bhinneka tunggal ika. sesuatu yang menurut mereka tak banyak dimiliki oleh SMA lain di kota Padang (CRR, *wawancara*, 22-10-2013).

Selain di ruang-ruang kelas mereka masih dapat memupuk nilai-nilai kebersamaan lewat OSIS. Organisasi ini merupakan satu-satunya wadah intra sekolah untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan pelajar. Oleh sebab itu setiap pelajar secara otomatis menjadi anggota OSIS dan keanggotaannya secara otomatis berakhir pula ketika pelajar tamat, keluar dari sekolah atau meninggal dunia (<http://osissmadbpdg.wordpress.com/profil-osis/> diakses tgl 2 Nopember 2013 jam 06.00). Kepengurusan OSIS sendiri terbuka bagi keragaman kecuali untuk jabatan ketua yang biasanya dijabat oleh pelajar Katolik. Meski untuk tahun sekarang kata H dijabat oleh pelajar Protestan (H, *wawancara*, 19-10-2013). Selain pengurus inti, OSIS dilengkapi pula oleh sejumlah seksi atau bidang yang berusaha untuk mengadakan acara-acara dalam rangka memupuk kebersamaan di kalangan pelajar. Di antaranya adalah:

Pertama, seksi Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bertugas di antaranya memperingati hari-hari besar agama dan mengadakan dan mengikuti kegiatan lomba yang bersifat

keagamaan. Peringatan hari-hari besar keagamaan dilaksanakan oleh pelajar masing-masing agama di rumah ibadah masing-masing yang tidak jauh dari lingkungan sekolah karena dalam lingkungan sekolah tidak disediakan rumah ibadah atau ruang ibadah termasuk untuk pelajar Kristen. Sementara untuk kegiatan lomba-lomba dalam rangka memeriahkannya diadakan dalam lingkungan sekolah. Untuk pelajar Muslim misalnya pernah diadakan lomba menulis kaligrafi. Sementara untuk pelajar Kristen ada juga lomba yang khusus untuk kalangan pelajar Kristen, misalnya lomba pemahaman kitab suci, Alkitab. Namun ada juga perlombaan yang bernuansa agama tertentu namun terbuka untuk semua pelajar seperti lomba menghias telur paskah ketika ada peringatan paskah di kalangan umat kristiani (AWP, H, IJ dan AU RA, *wawancara*, 22-10-2013). Kegiatan tersebut terbuka bagi semua kalangan pelajar dari berbagai etnis dan agama. Mereka bebas mengekspresikan kreatifitas dengan menghias telur yang menggambarkan suasana kedamaian saat paskah.

Kedua, seksi sosial. Tugas seksi ini di antaranya melaksanakan bakti sosial/masyarakat dan melaksanakan kegiatan amal/ bakti sosial. Salah satu kegiatan yang dikoordinir oleh seksi ini adalah mengkoordinir kegiatan melayat ke rumah duka bila ada di antara keluarga besar SMA Don Bosco yang meninggal. Ini adalah kegiatan rutin yang mesti diikuti oleh seluruh pelajar SMA Don Bosco. Baik pelajar Muslim maupun Kristen mengakui kalau hal ini merupakan wujud toleransi dan kebersamaan di antara mereka.

Ketiga, Seksi Kesegaran Jasmani Dan Daya Kreasi (Olah Raga) yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Selain basket yang memang sudah terkenal di kalangan pelajar SMA Don Bosco, seni beladiri Capoeira²⁵ juga paling banyak diminati

25. Capoeira adalah sebuah sistem bela diri tradisional yang didirikan di Brasil oleh budak-budak Afrika yang dibawa oleh bangsa Portugis ke Brasil untuk bekerja di perkebunan-perkebunan besar. Pada zaman dahulu mereka melakukan latihan dengan diiringi oleh alat-alat musik tradisional, seperti

oleh pelajar Islam. Hanya beberapa orang saja dari pelajar Kristen tutur WS, salah seorang guru ekstra kurikuler SMA Don Bosco. Ini

berimbau (sebuah lengkungan kayu dengan tali senar yang dipukul dengan sebuah kayu kecil untuk menggetarkannya) dan atabaque (gendang besar), dan ini juga lebih mudah bagi mereka untuk menyembunyikan latihan mereka dalam berbagai macam aktivitas seperti kesenangan dalam pesta yang dilakukan oleh para budak di tempat tinggal mereka yang bernama senzala. Ketika seorang budak melarikan diri ia akan dikejar oleh "pemburu" profesional bersenjata yang bernama capitães-do-mato (kapten hutan). Biasanya capoeira adalah satu-satunya bela diri yang dipakai oleh budak tersebut untuk mempertahankan diri. Pertarungan mereka biasanya terjadi di tempat lapang dalam hutan yang dalam bahasa tupi-guarani (salah satu bahasa pribumi di Brasil) disebut caá-puêra – beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa inilah asal dari nama seni bela diri tersebut. Mereka yang sempat melarikan diri berkumpul di desa-desa yang dipagari yang bernama quilombo, di tempat yang susah dicapai. Quilombo yang paling penting adalah Palmares yang mana penduduknya pernah sampai berjumlah sepuluh ribu dan bertahan hingga kurang lebih selama enam puluh tahun melawan kekuasaan yang mau menginvasi mereka. Ketua mereka yang paling terkenal bernama Zumbi. Ketika hukum untuk menghilangkan perbudakan muncul dan Brasil mulai mengimport pekerja buruh kulit putih dari negara-negara seperti Portugal, Spanyol dan Italia untuk bekerja di pertanian, banyak orang negro terpaksa berpindah tempat tinggal ke kota-kota, dan karena banyak dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan mulai menjadi penjahat. Capoeira, yang sudah menjadi urban dan mulai dipelajari oleh orang-orang kulit putih, di kota-kota seperti Rio de Janeiro, Salvador da Bahia dan Recife, mulai dilihat oleh publik sebagai permainan para penjahat dan orang-orang jalanan, maka muncul hukum untuk melarang Capoeira. Sepertinya pada waktu itulah mereka mulai menggunakan pisau cukur dalam pertarungannya, ini merupakan pengaruh dari pemain capoeira yang berasal dari Portugal dan menyanyikan fado (musik tradisional Portugis yang mirip dengan keroncong). Pada waktu itu juga beberapa sektor yang rasis dari kaum elit Brasil berteriak melawan pengaruh Afrika dalam kebudayaan negara, dan ingin “memutihkan” negara mereka. Setelah kurang lebih setengah abad berada dalam klandestin, dan orang-orang mempelajarinya di jalan-jalan tersembunyi dan di halaman-halaman belakang rumah, Manuel dos Reis Machado, Sang Guru (Mestre) Bimba, mengadakan sebuah pertunjukan untuk Getúlio Vargas, presiden Brasil pada waktu itu, dan ini merupakan permulaan yang baru untuk capoeira. Mulai didirikan akademi-akademi, agar publik dapat mempelajari permainan capoeira. <http://id.wikipedia.org/wiki/Capoeira> diakses tanggal 2 Nopember 2013 jam 18.00

menandakan bahwa ketika anak-anak sudah menemukan minat dan kegemaran yang sama mereka tidak lagi berbicara perbedaan dan pengkotak-kotakan. Padahal menurutnya musik yang mengiringi seni tersebut adalah musik-musik gereja (WS, *wawancara*, 21 Nopember 2013).

4. Bentuk-bentuk Pengalaman Keragaman

Pengalaman seperti yang disebutkan adalah kejadian yang pernah dialami (dijalani, dirasakan, ditanggung dan sebagainya). Ia dapat muncul dalam berbagai bentuk; lucu, mengharukan, menyedihkan, menggemirakan, maupun membanggakan. Dalam interaksi antar budaya atau agama yang seringkali lebih banyak didasarkan atas prasangka ketimbang informasi yang akurat tentang orang lain, *expose* atau peristiwa berjumpa dengan orang lain tersebut menjadi sangat menentukan dan seluruh pandangan atau prasangka tentang orang lain dapat terkoreksi akibat perjumpaan itu. Pelajar Muslim, CRR dan NM sangat terkesan dengan disiplin pelajar-pelajar pada sekolah tersebut terutama dari etnis Tionghoa. Mereka tekun dan tampak sungguh-sungguh dalam belajar. Hanya saja “agak perhitungan”. Maksudnya kurang mau berbagi. Tapi CRR dan NM juga mengakui tidak semuanya begitu. “Ada juga yang sama dengan kita”. Mereka mengakui kalau memiliki beberapa orang teman akrab dari etnis ini (CRR dan NM, *wawancara*, 13-10-2013). Sementara AU RA dalam hal ini memberikan perhatian pada budaya; ia terkesan dengan keunikan budaya etnis Tionghoa seperti barongsai. Pakaiannya warna warni dan gerakannya atraktif. Ia juga terkesan dan merasa senang dengan kebersamaan saat bernyanyi bersama teman yang beragam suku dan agama. Hanya saja IJ yang meski berasal dari Ranah Minang masih tetap terkesan dengan budayanya sendiri. Mengapa? Tanpa dapat merinci lebih lanjut, IJ berargumen “ya karena tradisionalnya”. Berbeda dari CRR dan NM yang tampak kurang mau berbagi

tentang pengalaman-pengalaman lucunya di SMA Donbosco, AU RA dan IJ tak lupa menyimpan pengalaman lucu tersebut. AU RA sambil senyum-senyum dan tak mau menggambarkan, menyebut lucu ketika menyaksikan saat teman-teman yang beragama Hindu berdoa, “tangan di atas kepala” Sama dengan AU RA, IJ juga merasa lucu ketika menyaksikan teman-teman Kristennya berdoa.

Sebaliknya, AWP, pelajar Kristen ini terkesan dengan teman-teman Minang yang pandai dalam berdagang. Biasanya kalau ada kegiatan bazar OSIS, sipenjual adalah teman-temannya dari etnis Minang. Mereka kelihatan pintar menawarkan produk-produk bazar tersebut. Dari situ tampak menurutnya salah satu kelebihan orang Minang adalah kemampuannya dalam berdagang. Ia juga tak lupa mencatat kejadian lucu ketika ada diskusi untuk pelajaran Bahasa Indonesia antara teman etnis Minang dengan etnis Batak yang sama-sama bersuara keras. Sama seperti AU Ra, ia juga terkesan dengan keunikan budaya Cina; pakaiannya yang warna-warni dan pagelaran seni budayanya (AWP, *wawancara*, 19-10-2013). H dan BAT tak mau merinci pengalaman-pengalaman seperti teman-temannya di atas, ”pokoknya senang, suka semuanya” (BAT dan H, *wawancara*, 19-10-2013).

Dengan demikian, semua temuan riset ini pada satu sisi telah memperkuat kerangka pemikiran yang dibangun Farid wajidi dkk (2011) bahwa pengalaman berjumpa, berinteraksi bahkan bekerjasama dengan orang yang berbeda etnik dan agama dapat menumbuhkan sikap toleran, saling menghargai dan menghormati. Ini didasarkan pada asumsi bahwa sikap orang pada orang lain yang berbeda tidak dibentuk berdasarkan pengalaman interaksinya sendiri, tetapi lebih ditentukan oleh serapan atas berbagai persepsi, prasangka, stereotipe, stigma atau *labelling* yang berkembang di lingkungan tempatnya tumbuh. Dalam interaksi antar budaya atau agama yang seringkali lebih banyak didasarkan

atas prasangka ketimbang informasi yang akurat tentang orang lain, maka *expose* atau peristiwa berjumpa dengan orang lain itu sangat menentukan dan seluruh pandangan atau prasangka tentang orang lain dapat terkoreksi akibat perjumpaan tersebut atau meminimal ia akan membangun mekanisme sendiri untuk memeriksanya. Sikap inklusif-akomodatif siswa muslim SMA Don Bosco dalam bentuk pengakuan dan penerimaan terhadap berbagai representasi keragaman di ruang publik sekolah muncul sebagai akumulasi pengalaman keragaman mereka belajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain, bergaul dengan teman atau guru yang berasal dari etnik dan agama tertentu ke teman dan guru dari etnik dan agama yang lain termasuk juga lingkungan tempat tinggal dengan warna tersebut.

Pada sisi lain riset ini juga menemukan bahwa tak selamanya pengetahuan keagamaan dengan pola-pola indoktrinatif, lahiriah dan formalistik dapat memantik sikap eksklusif dan intoleran seperti yang diungkap Farha Ciciek dkk (2009), LaKIP (2011) dan Hairus Salim dkk (2011). Sikap-sikap tersebut boleh jadi muncul dikalangan siswa sekolah umum negeri yang terkooptasi oleh berbagai program dan kegiatan Rohis yang cenderung eksklusif dan intoleran namun minus pengalaman keragaman. Akan tetapi pola-pola yang sama tak cukup mempan menjebol sikap inklusif dan akomodatif siswa muslim SMA Don Bosco yang berakar kuat pada pengalaman nyata keberagaman. Pengalaman sebagai suatu pengetahuan timbul bukan pertama-tama dari pikiran melainkan terutama dari pergaulan dengan dunia (baik orang maupun lingkungan). Pergaulan tersebut bersifat langsung, intuitif dan afektif yang memberikan tekanan pada unsur pasif (*given*). Dalam mengalami sesuatu, orang pertama-tama merasa “kena” atau “disentuh”, lebih dari sekedar aktif mengerjakan atau mengolah hal itu sebagaimana terjadi dalam pemikiran/pemahaman. Karena keinderaan, afeksi dan emosi memainkan peranan besar dalam pengalaman.²⁶

26. Niko Syukur Dister, *Pengalaman dan Motivasi Beragama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 21

Oleh sebab itu, lebih dari sekedar pengetahuan dalam bentuk pengajaran dan indoktrinasi sikap multikultural membutuhkan ruang eksperimen dan ruang publik sekolah cukup efektif untuk menumbuhkan dan membangun hal tersebut. Kendati pemerintah mengakui pendidikan keagamaan sebagai basis untuk memperkuat identitas keagamaan peserta didik namun Undang-Undang SISDIKNAS (No. 20 tahun 2003) mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dalam keseimbangan antara penguatan identitas keagamaan dan identitas kebangsaan yang dibangun di atas nilai-nilai keberagaman. Apalagi di ruang-ruang publik sekolah negeri yang dibiayai oleh negara yang tidak berdasarkan etnik dan agama tertentu. Jika eksperimen nilai-nilai keberagaman tersebut diruangkan, jangan di sekolah-sekolah negeri, di SMA Don Bosco yang kental dengan nuansa kekristenan sekalipun sikap multikultural dapat muncul. Oleh sebab itu, pengalaman benar-benar guru yang terbaik, *experience in the best teacher*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Azra, Azyumardi, (2007), *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta, Institute Pluralism and Multiculturalism Studies (Impulse) dan Kanisius.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori, (2012), *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Abdullah, Irwan, (2010), *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Abdullah, Amin, (2005), *Pendidikan Agama di Era Multikultural Multireligius*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah.
- Abidin Bagir, Zainal dkk, (2011) *Pluralisme Kewargaan Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Yogyakarta, CRCS UGM bekerjasama dengan Mizan, 2011
- Ashadi, Andri, *Pengalaman Multikulturalisme Pelajar Islam dan Kristen SMA Donbosco Padang*, Puslit IAIN Imam Bonjol Padang, 2013 (laporan hasil penelitian)
- Ashadi, Andri *Mengalami Keberagaman Menjadi Multikulturalis: Studi atas Pengalaman Multikulturalisme Siswa Muslim SMA Donbosco*, (Paper dipresentasi pada AICIS XIV STAIN Samarinda, 2014)

- Ashadi, Ashadi, “Adat Basandi Sara’ Sara’ Basandi Kitabullah dalam dalam Perda-Perna di Sumatera Barat: Kontestasi Kepentingan dan Perasaan Terancam,” dalam *Al-Adyan Jurnal Ilmu Perbandingan Agama*, Vol. III, Nomor 1, 2013
- Bagir, Zainal Abidin dkk,(2011) *Pluralisme Kewargaan Arab Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Yogyakarta, CRCS UGM bekerjasama dengan Mizan.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, (2005), *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta, Erlangga.
- Bungin, Burhan, (2006), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Grafindo Persada.
- DB9, Alumni, (2009), *Rekam Jejak Frater Servaas Pendiri SMA Donbosco Padang*, Yogyakarta, Surya Perkasa.
- Djam’annuri, ed, (2000), *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-agama*,(Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta).
- Denzin, K. & Yvonna S. Lincoln, ed, (2009), *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno, dkk., Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dwipayana, Ari, (2003) “Pendidikan Umat: dari Pluralism ke Multikulturalisme,” dalam *Majalah Gema Duta Wacana*.
- Iswanto, Agus, “Integrasi PAI dan PKN Mengupayakan PAI yang berwawasan multicultural” dalam Zainal Abidin EP, (2009), *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*, Jakarta, Badan Litbang Agama.
- Jhonson, Doyle Paul ,(1994), *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*, diterjemahkan dalam Doyle Paul

- Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen*, PT Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, (1973), *Metodologi Penelitian Masyarakat*, LIPI, Jakarta.
- _____, (2009), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Listia, dkk, (2007), *Problematika Pendidikan Agama di sekolah, Hasil Penelitian tentang Pendidikan Agama di Kota Yogyakarta 2004-2006*, Yogyakarta, Dian/Interfidei.
- Lash, Scott dan Mike Featherstone, ed, (2002), *Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture*, (London: Sage Publication, 2002).
- Mas'ud, Abdul Rahman dan A. Salim Ruhana, (2012) *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Mandiri, Tim Fokusindo, (2012), *UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*, Bandung, Fokusindo Mandiri.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Mulkhan, Abdul Munir, "Humanisasi Pendidikan Islam" dalam Mufid A. Busyairi, ed, (2001) Tashwirul Afkar, Edisi 11.
- Press, Tim Permata, (2013) *UNDANG-UNDANG SISDIKNAS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL & PP No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional*

- Rosyada Dede, "Pendidikan Multikultural di Indonesia" dalam Nurus Shalihin dkk (2012), *Mozaik Islam Nusantara, Seri Agama, Budaya, dan Negara*, (Padang, Imam Bonjol Press.
- Ropi, Ismatu, Rohis: dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama" dalam *Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Vol. 72, No. 2, Tahun XXXIV November 2011
- Sekretaris jenderal MPR RI, (2012), *UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jenderal.
- Sefriyono, (2013), *Harmoni dalam Perbedaan: membangun Integrasi dari Bawah Ala Masyarakat Padang Selatan*, Puslit IAIN Imam Bonjol Padang, (laporan hasil penelitian)
- Sabiq, Sayyid, (1973), *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyuddin Abas, Bandung, PT Almaarif.
- Shalihin, Nurus dkk, (2012), *Mozaik Islam Nusantara Seri Agama, Budaya dan Negara*, Padang Imam Bonjol Press.
- Salim HS dkk, Hairus, (2011), *Politik Ruang Publik Sekolah Negosiasi dan Resistensi di Sekolah Menengah Umum Negeri di Yogyakarta*, Yogyakarta, CRCS.
- Tigayanti, Erna, Pendidikan Toleransi, *Harian Republika*, 23 November 2011
- Tim, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim, (1993), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ubaidillah, A dan Abdul Rozak (ed), (2000) *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta, UIN Jakarta.

Veeger, K.J, (1986), *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta, Gramedia.

B. Internet

<http://www.diknaspadang.org/mod.php?mod=sekolah&op=det&id=186&sek=SMA%20DON%20BOSCO%20PADANG>, diakses 2 Januari 2013, jam 09.00.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5775> diakses tgl 2 jan. 2013 jam 9.00

<http://marzanianwar.wordpress.com/2008/03/12/rangkuman-hasil-penelitian-multikulturalisme-dan-kehidupan-beragama/> diakses tanggal 2-1- 2013 jam 09.00

<http://menulisbersamaaswir.blogspot.com/2011/09/pembelajaran-multikultural-dengan.html>, diakses tanggal 6 Januari 2013, jAM 11.00

<http://menulisbersamaaswir.blogspot.com/2011/09/pembelajaran-multikultural-dengan.html>, diakses tanggal Januari 2013, jAM 11.00)

http://id.wikipedia.org/wiki/Paul_F._Knitter diakses tanggal Juni 2012

<http://www.diknaspadang.org/mophp?mod=sekolah&op=at=SMA/MA> diakses 10 Februari 2013

<http://www.diknaspadang.org/mod.p?mod=sekolah&op=sek&kat=SMK> diakses 10 Februari 2013

<http://arrahmah.com/read/2011/04/1212-mayoritas-pelajar-setuju-radikalisme-atas-nama-agama.html>

<http://buntomi.wordpress.com/http://buntomi.wordpress.com/>
diakses tanggal 12 Juni 2013 jam 6.00 Wib.

http://www.elsam.or.id/downloads/1269181690_Tulisan_Monitoring_Perda_-_surur.pdf diakses tgl 13 april 2014 jam 7 00 malam)

<http://www.apakabar.ws/content/view/3429/> diakses tanggal 29 April 2014 jam 06.00

<http://junsu.blog.fisip.uns.ac.id/2013/06/20/definisi-respons-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 23 April 2014 jam 10 WIB

<http://www.dikti.go.id/files/atur/PP17-2010Lengkap.pdf> diakses tanggal 19 April 2014 jam 05.00 WIB. diakses tgl 29 Juni 2014 jam 06.00 WIB

Tempo edisi 8, 14-20 April 2008

<http://www.apakabar.ws/content/view//>diakses tanggal 29 April 2014 jam 14.00

http://www.elsam.or.id/downloads/Tulisan_Monitoring_Perda-surur.pdf diakses tanggal 13 April 2014 jam 19.00 WIB

<http://www.scribd.com/doc/140714869/Pendidikan-Multikultural-Dalam-Pluralisme-Bangsa> diakses tanggal 29 April 2014 jam 20.00

<http://become-teacher.blogspot.com/2013/05/pengertian-kebijakan.html> diakses tanggal 25 Februari 2014 jam 6.00 WIB

<http://junsu.blog.fisip.uns.ac.id/2013/06/20/definisi-respons-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 23 April 2014 jam 10 WIB

<http://bincangmedia.wordpress.com/2011/03/28/relasi-media-dan-konsumtivisme-pada-remaja/> diakses tgl 29 Juni 2014 jam 6.00 WIB

<http://invest.smk2padang.sch.id/html/index.php?id=profil&kode=11&profil=Visi%20dan%20Misi> diak ses tgl 25 September 2014 jam 04. 00

http://www.padang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=54 diakses tgl 5 Oktober 2014 jam 20.00 WIB

<http://203.130.196.151/admin19/detail.php?id=75> diakses tgl 1 Nopember 2014 jam 04.00

<http://download.portalgaruda.org/article.p?article=102529&val=445>, Slamet PH, Pengembangan SMK Model untuk Masa depan, FT Universitas Negeri Yogyakarta, h. 21, diakses tgl 15 Oktober 2014 jam 05.00

C. Peraturan/Kebijakan Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Salinan Lampiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan dan Tata Tertib Pelajar SMKN 2 Padang Tahun 2013/2014

Tata Tertib Siswa/Siswi SMAN 6 Padang Tahun 2014/2015

Dokumen V, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 6 Padang

RPP Pendidikan Agama Islam milik A, Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 6 Padang

TENTANG PENULIS

Andri Ashadi lahir tanggal 08 Oktober 1972 di Kapuh, sebuah jorong “udik” di Kenagarian Bunga Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Anak sulung dari pasangan Ahmad Tajidi dan Yulisma ini menamatkan SI Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1996 dan S2 Jurusan pemikiran Islam PPS IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2000; pernah mengikuti *Shortcourse* Sekolah Pluralisme Kewargaan setara S2 CRCS-UGM tahun 2013. Terhitung sejak 1999 sampai sekarang menjadi dosen tetap pada Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir menekuni dan telah meriset isu-isu multikulturalisme dalam ruang publik sekolah; *Pengalaman Multikulturalisme Dikalangan Pelajar Islam dan Kristen SMA Don Bosco Padang* (2013), *Kebijakan Multikulturalisme terhadap Pelajar Islam dan Kristen: Studi Kasus di SMAN 6 dan SMKN 2 Padang* (2014), dan dua tema riset terbaru yang sedang direncanakan (2015); *Toleransi dan Militansi Beragama Dikalangan Etnis Nias Seberang Palinggam Kota Padang dan Menjadi Muslim Paruh Waktu; Kontestasi Identitas Kekristenan dalam Ruang Publik Muslim*. Menyajikan makalah, *Wawasan Multikulturalisme pada Pendidikan Agama Islam: Mengkaji Sumbangan Ilmu Perbandingan Agama* pada Seminar Antar Bangsa, Universitas Kebangsaan Malaysia (2007), *Mempribumikan Teologi Islam; dari Eksklusif-Apologis ke Inklusif-Transformatif* (2012) pada AICIS-IAIN Sunan

Ampel Surabaya, *Adat basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah dalam Perda-Perna: Kontestasi Kepentingan dan Perasaan Terancam* (2013) dalam acara temu alumni SPK 1 CRCS-UGM, *The Dialectic Between Islam, Adat and Modernity in Madrassas Inclusivism " The Kaum Mudo "* (2013) dalam The Second International Symposium on Empowering Madrasah in The Global Context, Balitbang Kemenag RI, *Mengalami Keberagaman Menjadi Multikulturalis* (2014) pada AICIS STAIN Samarinda, Kalimantan Timur dan menyajikan hasil riset, *Kebijakan Multikulturalisme terhadap Pelajar Islam dan Kristen; Studi Kasus SMAN 6 dan SMKN 2 Padang* pada acara Temu peneliti, 5-7 Mei 2015 di Bappeda Sumatera Barat.